

Modal manusia, urbanisasi, makroekonomi, dan perbankan : perspektif kawasan ASEAN

by Azwardi Azwardi

Submission date: 09-Mar-2023 09:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2032996246

File name: Book_Chapter_ASEAN_Economy_Full.pdf (2.97M)

Word count: 55450

Character count: 341457

**MODAL MANUSIA, URBANISASI,
MAKROEKONOMI, DAN
PERBANKAN: PERSPEKTIF
KAWASAN ASEAN**

Azwardi, dkk.



MODAL MANUSIA, URBANISASI, MAKROEKONOMI, DAN PERBANKAN: PERSPEKTIF KAWASAN ASEAN

TIM PENULIS

1. Dr. Azwardi, S.E., M.Si.
2. Imelda, S.E, M.S.E.
3. Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
4. Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si.
5. Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
6. Mardalena, S.E., M.Si.
7. Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.
8. Ariodillah Hidayat, S.E., M.Si.
9. Dr. Suhel, S.E., M.Si.
10. Gustriani, S.E., M.Si.
11. Alghifari Mahdi Igamo, S.E.,
M.S.E.
12. Nazeli Adnan, S.E., M.Si.
13. Ayu Sagita, S.E.
14. Soni Afriansyah Palka, S.E.
15. Shelly Atika Adriyanti, S.E.
16. Devy Mayang Sari, S.E.
17. Zakenia Choirunnisah, S.E.
18. Andini Fiorentina Valentine,
S.E.
19. Novi Eliza
20. Neldita Natalia Nata
Situmeang
21. Sherly Monica

**Modal Manusia, Urbanisasi, Makroekonomi, Dan Perbankan:
Perspektif Kawasan ASEAN**

Tim Penulis

Editor: Dr. Azwardi, S.E., M.Si.

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2022
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email: unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website: www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021
Anggota IKAPI No. 001/SMS/96

Hak cipta dilindungi undang-undang,
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi,
merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin
tertulis dari Penerbit

Hak Terbit Pada Unsri Press
ISBN :978-623-399-103-2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Bunga Rampai dengan judul “Modal Manusia, Urbanisasi, Makroekonomi, dan Perbankan: Perspektif Kawasan ASEAN”.

Bunga Rampai ini terdiri dari 10 topik yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, membahas tentang fenomena modal manusia, urbanisasi, makroekonomi, dan perbankan yang terjadi di negara-negara yang tergabung di dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Aspek makroekonomi dalam buku ini meliputi pembahasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang menyajikan informasi mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan *trade openness* terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Selanjutnya pembahasan kausalitas antara angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN-5 serta kausalitas antara keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap *foreign direct investment* di negara ASEAN. Aspek makroekonomi lainnya yang dibahas mengenai inflasi yang dikemas dalam topik pengaruh suku bunga, nilai tukar dan *output gap* terhadap inflasi di lima negara ASEAN.

Kajian perbankan mengenai *federal fund rate* dibahas dalam topik *federal fund rate* terhadap kebijakan moneter dan makroekonomi dalam perekonomian terbuka kecil: kasus negara ASEAN-3. Industri perbankan islam dalam komparasi kinerja pada industri perbankan islam Indonesia dan Malaysia: studi pendekatan *Maqashid Syariah Index (MSI)*. Kinerja perbankan dibahas dalam konteks kualitas asset, kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas di negara ASEAN.

Dalam bagian akhir disajikan topik pengaruh pertumbuhan ekonomi dan *economic freedom* terhadap indeks pembangunan manusia di enam negara ASEAN. Hubungan antara urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan *foreign direct investment (FDI)* di enam negara ASEAN serta pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran konsumsi di lima negara ASEAN.

Dengan selesainya Bunga Rampai ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Bunga Rampai ini dan telah bersedia untuk menyumbangkan ide, waktu, dan tenaga sehingga Bunga Rampai ini dapat diterbitkan. Bunga Rampai ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik dalam menambah wawasan serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya

Palembang, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I 10	
Ayu Sagita; Azwardi; Imelda	1
BAB II 26	
Soni Afriansyah Palka; Siti Rohima; Abdul Bashir	17
BAB III 40	
Shelly Atika Adriyanti; Anna Yulianita; Mardalena	31
BAB IV 50	
Devy Mayang Sari; Imam Asngari; Ariodillah Hidayat	41
BAB V 63	
Zakenia Choirunnisah; Siti Rohima; Mardalena	54
BAB VI 93	
Andini Fiorentina Valentine; Suhel; Abdul Bashir	84
BAB VII 110	
Gustriani; Alghifari Mahdi Igamo; Nazeli Adnan;	101
BAB VIII 125	
Novi Eliza; Azwardi; Abdul Bashir	115
BAB IX 139	
Neldita Natama Situmeang; Azwardi; Abdul Bashir	129
BAB X 155	
Sherly Monica; Azwardi; Sukanto	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN Tahun 2018	1
	5

Tabel 1.2 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Ke-1	6
Tabel 1.3 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Ke-2	6
Tabel 1.4 Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara ASEAN	7
Tabel 1.5 Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Keterbukaan Perdagangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di 5 Negara ASEAN	8
Tabel 2.1 Distribusi PDB Total Negara ASEAN Tahun 2010-2018	18
Tabel 2.2 Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tahun 2018	19
Tabel 2.3 Hasil Uji Unit Root	23
Tabel 2.4 Hasil Uji Kointegrasi Johansen Fisher	23
Tabel 2.5 Hasil Uji Kausalitas Granger dengan VECM	24
Tabel 3.1 Hasil Uji Kausalitas Granger antara FDI dan <i>Trade Openness</i>	36
Tabel 3.2 Hasil Uji Kausalitas Granger antara FDI dan <i>Financial Openness</i>	37
Tabel 3.3 Hasil Uji Kausalitas Granger antara FDI dan Pertumbuhan Ekonomi	38
Tabel 4.1 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Regresi Data Panel	48
Tabel 4.2 Hasil Regresi Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Dan Output Gap Terhadap Inflasi Di Lima Negara ASEAN	48
Tabel 4.3 Nilai Intersep Setiap Individu (Negara)	51
Tabel 5.1 Hasil Uji Akar Unit (Stasioneritas) Negara ASEAN-3	62
Tabel 5.2 Penentuan Lag Optimal di Negara ASEAN-3	63
Tabel 5.3 Hasil <i>Forecast Error Variance Decomposition</i> (FEVD) Suku Bunga Kebijakan (Interest Policy Rate) di Negara ASEAN-3	66
Tabel 5.4 Hasil <i>Forecast Error Variance Decomposition</i> (FEVD) Nilai Tukar di Negara ASEAN-3	71
Tabel 5.5 Hasil <i>Forecast Error Variance Decomposition</i> (FEVD) Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-3	75
Tabel 5.6 Hasil <i>Forecast Error Variance Decomposition</i> (FEVD) Inflasi di Negara ASEAN-3	79
Tabel 6.1 Operasional Tiga Tujuan Perbankan Syariah	88
Tabel 6.2 Bobot Rata-Rata Tiga tujuan & Sepuluh Elemen	89
Tabel 6.3 Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia	90
Tabel 6.4 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Pertama Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019	91
Tabel 6.5 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Kedua Bank Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019	92

Tabel 6.6 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Ketiga Bank Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019	93
Tabel 6.7 Indeks Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019	94
Tabel 6.8 Statistik Deskriptif	97
Tabel 6.9 Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk	97
Tabel 6.10 Hasil Uji Beda (Independent Sample T-Test)	98
Tabel 7.1 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan NPL	104
Tabel 7.2 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan CAR	105
Tabel 7.3 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan LDR	105
Tabel 7.4 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan ROA dan ROE	106
Tabel 8. 1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN Tahun 2020	115
Tabel 8. 2 Hasil Statistik Deskriptif	120
Tabel 8. 3 Uji Kesesuaian Model	121
Tabel 8. 4 Hasil Estimasi Regresi Menggunakan Metode FEM	122
Tabel 9. 1 Urbanisasi di Negara ASEAN (%)	129
Tabel 9. 2 Pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN (%) i i	130
Tabel 9. 3 Perkembangan Persentase Foreign Direct Investment Terhadap Gross Domestic Product di 5 Negara ASEAN Tahun 2012-2018	130
Tabel 9. 4 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Indonesia	134
Tabel 9. 5 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Filipina	134
Tabel 9. 6 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Malaysia	135
Tabel 9. 7 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Singapura	135
Tabel 9. 8 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Thailand	136
Tabel 9. 9 Hasil Uji Lag Optimum 5 Negara ASEAN	136
Tabel 9. 10 Hasil Uji Kointegrasi Johansen di 5 Negara ASEAN	137
Tabel 9. 11 Hasil Uji Kausalitas Negara Indonesia	138
Tabel 9. 12 Hasil Uji Kausalitas Negara Filipina	138
Tabel 9. 13 Hasil Uji Kausalitas Negara Singapura	139
Tabel 9. 14 Hasil Uji Kausalitas Negara Thailand	139
Tabel 10. 1 Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Negara-Negara ASEAN-5 tahun 2020 (dalam persen)	146
Tabel 10. 2 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Regresi Data Panel	152

Tabel 10. 3 Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di ASEAN-5	152
Tabel 10. 4 Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di ASEAN-5	153

DAFTAR GAMBAR

1		
Gambar 1.1	PDB ASEAN (triliun US\$) dan PDB Per kapita (US\$) Tahun 2000-2018	2
Gambar 4.1	Perkembangan Inflasi pada tahun 2000-2019	42
Gambar 5.1	Pergerakan Suku Bunga Kebijakan (Interest Policy Rate) Tahun 2004-2019	55
Gambar 5.2	Hasil Uji Stabilitas di Negara ASEAN-3	63
Gambar 5.3	Grafik Impulse Respon Function (IRF) Suku Bunga Kebijakan di Negara ASEAN-3 Terhadap Structural Shock Federal Fund Rate (FFR)	64
Gambar 5.4	Grafik Impulse Respon Function (IRF) Nilai Tukar di Negara ASEAN-3 Terhadap Structural Shock Federal Fund Rate (FFR)	68
Gambar 5.5	Grafik <i>Impulse Respon Function</i> (IRF) Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-3 Terhadap <i>Structural Shock Federal Fund Rate</i> (FFR)	72
Gambar 5.6	Grafik <i>Impulse Respon Function</i> (IRF) Inflasi di Negara ASEAN-3 Terhadap <i>Structural Shock Federal Fund Rate</i> (FFR)	76
Gambar 6.1	Pertumbuhan Aset & <i>Market Share</i> Pada Perbankan Syariah	84
Gambar 7.1	Perkembangan Rasio NPL Negara ASEAN	107
Gambar 7.2	Perkembangan Rasio CAR Negara ASEAN	108
Gambar 7.3	Perkembangan Rasio ROA Negara ASEAN	110
Gambar 7.4	Perkembangan ROE Negara ASEAN	111
Gambar 8. 1	Grafik PDB per Kapita (US\$) ASEAN-6 Tahun 2000-2020	116
Gambar 8. 2	Skor Index Economic Freedom ASEAN-6 Tahun 2000-2020	117
Gambar 10. 1	Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-5, 2010-2020	145

BAB I

1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan *Trade Openness* Terhadap Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN)

Oleh:

Ayu Sagita; Azwardi; Imelda

1. Pendahuluan

1 Alasan berkembangnya ASEAN adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara yang tenteram, mantap, dan sejahtera (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Bangsa-bangsa yang merupakan individu dari ASEAN berkolaborasi dalam bidang pertukaran, bisnis, usaha, pengentasan kemiskinan dan penurunan ketidakseimbangan dalam peningkatan keuangan di kawasan ASEAN. Untuk memahami tujuan ASEAN, beberapa penanda digunakan untuk mengukur pencapaian kemajuan di setiap negara ASEAN. Sebagai aturan umum, penanda yang digunakan untuk mengukur bantuan pemerintah adalah penunjuk keuangan dengan melihat perkembangan total output nasional. Estimasi bantuan pemerintah melalui produk domestik bruto tidak dimaksudkan untuk memaknai pencapaian kemajuan suatu negara **1** sehingga diperlukan penanda yang berbeda dalam memperkirakan kemajuan untuk melihat seberapa besar suatu negara menyelesaikan bantuan pemerintahnya yang harus terlihat melalui **1** le perbaikan manusia.

Berdasarkan Human Advancement Report 2019, UNDP memposisikan 189 negara dunia dalam pencapaian IPM di setiap negara pada tahun 2018.

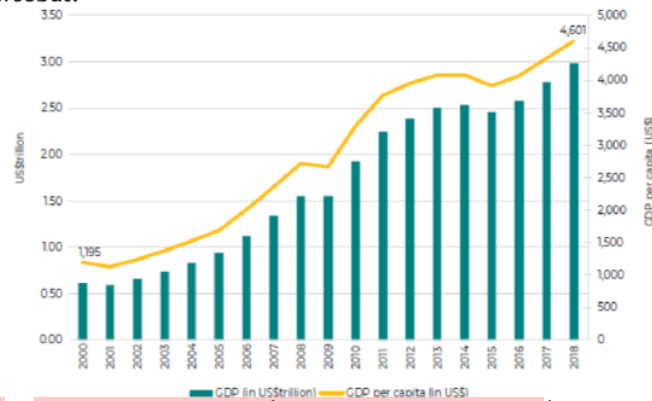
1 Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN Tahun 2018

Negara	Rank Global	Rank ASEAN	HDI (value)
Singapura	9	1	0,935
Brunei Darussalam	43	2	0,845
Malaysia	61	3	0,804
Thailand	77	4	0,765
Philippines	106	5	0,712
Indonesia	111	6	0,707
Vietnam	118	7	0,693
Laos PDR	140	8	0,604
Myanmar	145	9	0,584
Cambodia	146	10	0,581

Sumber: UNDP, 2019. Data diolah **1**

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia merupakan **1** negara yang mencapai nilai IPM sangat tinggi, negara dengan status tinggi adalah Thailand, Filipina, dan Indonesia, sedangkan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja merupakan negara dengan nilai IPM sedang. Kekhasan ini menunjukkan bahwa masih banyak negara ASEAN yang penduduk miskinnya mencapai posisi IPM yang sangat tinggi dan menunjukkan bahwa belum ada perbaikan dalam menggarap sifat SDM di negara-negara ASEAN.

Derajat nilai dan keadaan moneter yang stabil menggambarkan derajat bantuan pemerintah yang merupakan gambaran tercapainya kehidupan yang baik (Santoso et al., 2013). Derajat bantuan pemerintah atau derajat keadaan moneter yang dicapai oleh suatu negara diperkirakan dengan pencapaian pembangunan keuangan dengan melihat besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) negara tersebut.



1
Gambar 1.1 PDB ASEAN (triliun US\$) dan PDB Per kapita (US\$) Tahun 2000-2018
Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

1
Di Asia Tenggara, produk domestik bruto menunjukkan pola positif selama periode 2000 hingga 2018, meskipun pada 2008 hingga 2009 terjadi keadaan darurat moneter di seluruh dunia. Berdasarkan Laporan Angka Kunci ASEAN 2019, 1
Produk Domestik Bruto 10 negara ASEAN yang tergabung secara lengkap senilai US\$ 3,0 triliun dari tahun 2018, hal ini menempatkan ASEAN sebagai negara dengan tingkat perkembangan moneter terbesar kelima di dunia, selain AS, Cina, Jepang dan Jerman yang posisinya di atas (ASEAN Secretariat, 2019).

Perkembangan moneter yang cepat ini secara tegas mempengaruhi ekspektasi yang berkembang untuk kenyamanan sehari-hari, di mana kenaikan ini membayar serta meningkatkan minat untuk tenaga kerja dan produk publik (Afifah et al., 2017). Pengelolaan kebijakan merupakan kewajiban otoritas publik karena menyangkut kepentingan daerah setempat, maka bagian otoritas publik untuk situasi ini adalah melalui alokasi belanja pemerintah yang tidak hanya ditujukan untuk memperluas pembangunan moneter tetapi juga memperluas file perbaikan manusia. Selain itu, faktor dari luar negeri juga dapat mempengaruhi bantuan pemerintah daerah, khususnya dengan memimpin pertukaran antar negara dalam mengatasi kebutuhan tenaga kerja dan produk dalam suatu negara. Jenis hubungan keuangan ini adalah penerimaan pertukaran jenis latihan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan negara dengan mengirim dan membawa masuk. Semakin terbuka perekonomian suatu negara, semakin besar peluang negara itu untuk memiliki opsi untuk melakukan. latihan pertukaran di seluruh dunia yang secara tegas akan mempengaruhi bagian dari pemanfaatan, penciptaan, dan alokasi pendapatan (Sanjaya et al., 2017).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Rostow dan Musgrave mengenali fase perbaikan moneter menjadi lebih cepat dari jadwal, menengah, dan tahap lanjutan. Pada tahap awal pergantian peristiwa keuangan, laju perkembangan pengeluaran pemerintah sangat tinggi karena otoritas publik memberikan tugas mendasar untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan suatu negara dan sebagian besar usaha ini adalah di bidang pelatihan, kesejahteraan, jalan, listrik, dan air bersih (Aladejare, 2013). Di tengah-tengah, tugas otoritas publik semakin besar karena banyaknya kekecewaan pasar yang muncul dari berkembangnya pekerjaan swasta, dan selanjutnya membuat otoritas publik perlu menyediakan tenaga kerja dan produk publik dengan jumlah yang lebih besar dan kualitas yang lebih baik (Mangkoesobroto, 2018). Rostow mengatakan bahwa latihan administrasi dalam perbaikan moneter berada pada tahap tingkat tinggi, beralih dari kerangka pemberian ke pengeluaran yang berfokus pada latihan persahabatan, misalnya, program bantuan pemerintah lanjut usia, proyek administrasi kesejahteraan umum, dan lain-lain (Deswanto et al., 2017).

Hipotesis Adolf Wagner atau biasa disebut Regulasi Wagner adalah hipotesis yang menyatakan bahwa di samping peningkatan pembayaran per kapita dalam suatu perekonomian, agaknya pengeluaran pemerintah juga meningkat, terutama mengingat fakta bahwa otoritas publik harus mengarahkan hubungan yang muncul di mata publik. baik dalam pelatihan, budaya, regulasi, dll (Mangkoesobroto, 2018).

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan moneter adalah kemajuan tindakan keuangan yang mendorong perluasan tenaga kerja dan produk yang diciptakan oleh daerah (Sukirno, 2013). Kuznet mengungkapkan bahwa ada enam kualitas jalannya perkembangan moneter, yaitu; (a) laju perkembangan hasil per kapita dan perluasan penduduk; (b) kecepatan pengembangan yang tinggi dari efisiensi komponen yang lengkap, khususnya efisiensi kerja; (c) tingkat perubahan utama keuangan yang serius; (d) tingkat perubahan filosofis dan sosial yang serius; (e) untuk negara-negara yang telah memulai atau yang ekonominya telah berkembang pada umumnya akan berusaha untuk tiba di berbagai wilayah di planet ini sebagai iklan dan sumber bahan alami; dan (f) persebaran pembangunan keuangan terbatas, baru mencapai 33% dari total penduduk (Swaramarinda & Indriani, 2011).

Hipotesis Perkembangan Gaya Neo-Lama yang dikemukakan oleh Solow dan Swan berpendapat bahwa perkembangan finansial berasal dari penambahan dan kemajuan faktor-faktor penciptaan dan tingkat perputaran mekanis peristiwa (Sukirno, 2013). Hipotesis perkembangan neoklasik juga masuk akal tentang ekonomi terbuka, khususnya ekonomi yang bertukar dan berkontribusi dengan negara lain. Penerimaan ini dipandang sebagai memberdayakan penerimaan yang lebih luas terhadap gagasan penciptaan yang tidak dikenal yang dapat meningkatkan kemajuan dan peningkatan inovatif. Sesuai hipotesis ini, jika negara berkembang menutup ekonomi, itu akan menghambat perkembangan moneter negara tersebut tersebut (Todaro & Smith, 2011).

Hipotesis pembangunan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) memaknai unsur-unsur yang dapat memberdayakan pembangunan finansial secara garis besar yang digambarkan oleh kemajuan-kemajuan masa kini inovasi yang dibutuhkan dalam siklus penciptaan (Maharani & Isnawati, 2014). Widyawati (2017) menjelaskan bahwa hipotesis pembangunan endogen menyatakan bahwa sumber daya manusia dan modal aktual serta pertukaran diperlukan untuk mempercepat pembangunan moneter suatu negara. Mengingat hipotesis ini memperluas penerimaan pertukaran jelas akan mengembangkan inovasi lebih lanjut dan dengan demikian meningkatkan penciptaan, sehingga karena transparansi, negara-negara pertanian membangun manfaat dan efisiensi mereka dengan memanfaatkan kemajuan baru dalam informasi dan inovasi yang menyebabkan negara-negara berkembang menghasilkan lebih banyak ciptaan. luas (Idris et al., 2016).

2.3. Keterbukaan Perdagangan

Seperti yang dikemukakan oleh Rodriquez dan Rodrik, dalam pandangan perkembangan keuangan berdasarkan inovasi endogen, dinyatakan bahwa semakin rendah hambatan pertukaran yang terjadi antar negara, semakin besar dorongan untuk perkembangan hasil dunia secara keseluruhan (Sanjaya et al., 2017). Hal ini memungkinkan negara-negara yang tidak beruntung untuk mendapatkan sumber informasi perantara dan memindahkan inovasi dari negara-negara yang lebih maju, memberdayakan produk dan meningkatkan intensitas dan produktivitas di sektor bisnis dalam negeri dan di seluruh dunia (Sutjipto & Puspitasari, 2016). Bank Dunia mencirikan penerimaan pertukaran sebagai jumlah komoditas dengan impor tenaga kerja dan produk yang dipartisi oleh PDB. Persamaan untuk menghitung transparansi pertukaran adalah (Sanjaya et al., 2017):

$$\text{Keterbukaan Perdagangan} = \frac{\text{Total Ekspor} + \text{Total Impor}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemajuan manusia dilihat dari berbagai bagian mendasar dari kepuasan pribadi, sehingga file peningkatan manusia digunakan sebagai wadah referensi untuk peningkatan sosial dan keuangan yang harus terlihat dari kemajuan peningkatan manusia dalam tiga aspek, yaitu (1) aspek kesejahteraan; (2) aspek instruksi; dan (3) aspek harapan baik untuk kenyamanan sehari-hari (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2018).

3. Hasil Kajian

Studi ini merinci apakah pengeluaran pemerintah dan penerimaan pertukaran mempengaruhi daftar perbaikan manusia dengan pembangunan moneter sebagai variabel perantara. analisis ini dipimpin di 5 negara ASEAN, yakni Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja selama periode 2000-2018. Faktor bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengeluaran pemerintah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan harga konstan 2010

(X1), dan variabel keterbukaan perdagangan dalam persen (X2). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah produk domestik bruto per kapita dalam dolar AS dengan harga konstan 2010 (Y1). Variabel terikat yang digunakan adalah variabel Indeks Pembangunan Manusia dalam satuan *value* (Y2).

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis jalur (*Path Analysis*) dengan data panel. Sebelum mengestimasi menggunakan analisis jalur, maka dilakukan estimasi dengan regresi data panel. Adapun persamaan regresi data panel sebagai berikut (Deswanto et al., 2017):

a. Pengaruh X₁, dan X₂, terhadap Y₁

$$LOG(Y_{1it}) = \alpha_0 + \alpha_1 LOG(X_{1it}) + \alpha_2 LOG(X_{2it}) + \varepsilon_1$$

.....(3.1)

b. Pengaruh X₁, X₂, dan Y₁, terhadap Y₂

$$LOG(Y_{2it}) = \beta_0 + \beta_1 LOG(X_{1it}) + \beta_2 LOG(X_{2it}) + \beta_3 LOG(Y_{1it}) + \varepsilon_2$$

.....(3.2)

Keterangan:

Y_{1it} = pertumbuhan ekonomi di negara i pada tahun t (dalam satuan Dolar AS)

Y_{2it} = Indeks pembangunan manusia di negara i pada tahun t (dalam satuan *value*)

X_{1it} = Pengeluaran pemerintah di negara i pada tahun (dalam satuan Dolar AS)

X_{2it} = *Trade Openness* di negara i pada tahun t (dalam satuan persen)

α₁, α₂, β₁, β₂, β₃ = Koefisien jalur

α₀, β₀ = Konstanta/intersep

i = Negara ke-i yang terdiri dari Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja

t = Periode ke-t yaitu dari tahun 2000-2018

ε₁, ε₂ = *Error term*

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa dalam mengestimasi menggunakan analisis jalur yaitu dengan melihat pengaruh variable langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) berdasarkan pada nilai koefisien hasil regresi. Besarnya pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan oleh besarnya nilai koefisien dari independen ke dependen, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung, dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien pengaruh variabel Independen terhadap variabel *intervening* dengan nilai koefisien pengaruh variabel *inetervening* terhadap variabel dependen.

Analisis jalur hanya dapat mendeteksi seberapa besar pengaruh variabel melalui pengaruh langsung dan tidak langsung, sedangkan untuk mengetahui signifikansi atau tidaknya pengaruh tidak langsung menggunakan uji sobel sebagai berikut :

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

Keterangan:

Sab : Besarnya standar error pengaruh tidak langsung

- a : Jalur variabel independen ke variabel *intervening*
- b : Jalur variabel *intervening* ke variabel dependen
- Sa : Standar error koefisien a
- Sb : Standar error koefisien b

Nilai t dari koefisien ab dibutuhkan dalam menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) bahwa terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel *intervening* (Ghozali, 2016).

3.1. Pemilihan Kesesuaian Model

Untuk mengetahui model mana yang akan digunakan, ada tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu uji Chow untuk melihat kesesuaian model antara *common effect model* dengan *fixed effect model*, dan uji Hausman untuk melihat kesesuaian model antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*, serta uji *Lagrange Multiplier* untuk mengetahui model mana yang akan digunakan antara *common effect model* dan *random effect model*. Output dari uji kelayakan model dalam tinjauan ini terlihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Ke-1

Jenis Pengujian Model	Probabilitas <i>Chi-square</i>	Nilai Signifikansi penelitian	Keterangan
Uji Chow	0.0000	0.05	Menggunakan model FEM
Uji Hausman	0.0205	0.05	Menggunakan model FEM
Uji LM	0.0000	0.05	Menggunakan model REM

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji kesesuaian model pada persamaan ke-1 pada Tabel 1.2 Meskipun uji LM menerima REM karena nilai probabilitas < 0,05 namun uji Chow dan uji hausman sama-sama menyatakan bahwa FEM adalah model yang terbaik karena nilai probabilitas < 0,05. Dengan demikian, model yang terpilih pada persamaan ke-1 yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 1.3 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Ke-2

Jenis Pengujian Model	Probabilitas <i>Chi-square</i>	Nilai Signifikansi penelitian	Keterangan
Uji Chow	0.0000	0.05	Menggunakan model FEM
Uji Hausman	0.0047	0.05	Menggunakan model FEM
Uji LM	0.0000	0.05	Menggunakan model REM

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 9*

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa uji LM menerima REM karena nilai probabilitas < 0,05. Akan tetapi, uji *Chow* dan uji *Hausman* sama-sama menyatakan bahwa FEM adalah model yang terbaik karena nilai probabilitas < 0,05. Dengan demikian, model yang terpilih pada persamaan ke-2 yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Kamboja

Tabel 1.4 Hasil Regresi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara ASEAN

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.036637	0.407659	-17.26106	0.0000
LOG(GOVEX)	0.610975	0.015051	40.59365	0.0000
LOG(TRADE)	0.103763	0.041449	2.503392	0.0141

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 9*

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* yang ditunjukkan oleh Tabel 1.4, selama periode 2000-2018 diketahui bahwa pengeluaran administrasi berdampak pada perkembangan moneter. Nilai positif ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dikoordinasikan oleh organisasi negara di 5 negara ASEAN, terutama Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja, memiliki pilihan untuk meningkatkan pembangunan moneter. Penyelidikan ini sesuai dengan spekulasi Adolf Wagner yang menyatakan bahwa menurut peningkatan pendapatan kapita suatu negara, hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan publik akan meningkat, pada dasarnya karena spesialis publik harus mengawasi koneksi yang signifikan dalam pengajaran, budaya, pedoman, dan sebagainya.

Hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang menggabungkan efek samping eksplorasi yang oleh Maharani & Isnowati (2014) serta Abdullah & Rusdarti (2017) yang menyatakan bahwa belanja administrasi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan keuangan. Kemudian, pada saat itu, Ichvani & Sasana (2019) mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di negara-negara non-industri sebenarnya ingi mendorong siklus kemajuan untuk meningkatkan laju pembangunan keuangan. Sultan & Haque (2018) menunjukkan bahwa konsumsi pemanfaatan administrasi memiliki hubungan positif dan kritis dengan perkembangan moneter yang dilakukan Arab Saudi pada periode 1984 hingga 2015. Penemuan Kimaro et al. (2017) juga menunjukkan bahwa konsumsi penggunaan administrasi berkembang pesat dengan perkembangan moneter di sub-Sahara Afrika dari tahun 2002 hingga 2015. Hal ini seperti penelitian yang dipimpin oleh Swaramarinda & Indriani (2011) yang menyatakan bahwa ada hubungan kritis dan besar antara penggunaan pemerintah dan perkembangan keuangan di Indonesia selama kurun waktu 1997-2007, hal ini dikarenakan penggunaan administrasi mempengaruhi penggunaan barang publik oleh masyarakat, membuat penggunaan masyarakat meningkat dan menambah Produk Domestik Bruto.

Mengingat konsekuensi dari kekambuhan informasi dewan yang menggunakan model dampak yang layak yang ditampilkan pada Tabel 1.4, selama 2000-2018 cenderung terlihat bahwa transparansi pertukaran mempengaruhi perkembangan keuangan. Nilai positif ini menunjukkan bahwa hubungan pertukaran yang dilakukan oleh 5 negara ASEAN khususnya Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja dapat meningkatkan pergerakan keuangan. Dalam pandangan hipotesis perkembangan keuangan gaya lama (Solow-Swan), perkembangan moneter dimulai dari peningkatan dan peningkatan faktor-faktor penciptaan dan tingkat perputaran mekanis peristiwa. Negara-negara non-industri secara keseluruhan masih tunduk pada negara-negara lain untuk membantu kemajuan. Hal ini karena ketidakberdayaan negara untuk memberikan aset, menghasilkan produk, dan melakukan inovasi, sehingga dengan akses pasar dunia, Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja dapat mengatasi masalah bangsanya untuk mengikuti perkembangan moneter. .

Efek samping dari review sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Sutjipto & Puspitasari (2016) dan Olaifa et al. (2013) menyatakan bahwa hubungan pertukaran berdampak pada perkembangan keuangan. Eksplorasi Purnomo dan Mudakir (2019) menunjukkan bahwa hubungan pertukaran pada dasarnya mempengaruhi perkembangan keuangan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Kemudian, Idris et al. (2016) menyatakan bahwa pertukaran telah menjadi salah satu pendorong pemberdayaan pembangunan moneter, konsekuensi dari penelitiannya menunjukkan efek positif pada perkembangan keuangan di negara-negara berkembang. Kemudian, pada saat itu, Suliswanto (2016) juga menunjukkan bahwa hubungan pertukaran secara signifikan mempengaruhi pengaturan Produk Domestik Bruto di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.

3.3. Pengaruh *Government Expenditure*, Trade Openess, Economic Growth terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Kamboja

Tabel 1.5 Hasil Regresi Pengaruh *Government Expenditure*, *Trade Openess*, dan *Economic Growth* terhadap IPM di 5 Negara ASEAN

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.661484	0.224766	-11.84113	0.0000
LOG(GOVEX)	0.031235	0.017599	1.774806	0.0794
LOG(TRADE)	0.001044	0.011294	0.092461	0.9265
LOG(PE)	0.195318	0.028065	6.959378	0.0000

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 9*

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* yang ditunjukkan oleh Tabel 1.5, selama periode 2000-2018 sangat mungkin terlihat bahwa pengeluaran administrasi memiliki dampak positif namun tidak besar pada daftar kemajuan manusia. Hasil yang tidak penting ini menunjukkan bahwa belanja administrasi di 5 negara ASEAN belum terlalu kuat dalam meningkatkan rekor kemajuan manusia. Seperti yang baru-baru ini diperhatikan, bagian dalam memperkirakan catatan kemajuan manusia dibagi

menjadi tiga aspek, khususnya unsur pelatihan, kesejahteraan, dan harapan yang baik untuk kenyamanan sehari-hari. Setiap aspek memiliki kesulitannya sendiri.

Komponen pelatihan merupakan aspek yang harus lebih diperhatikan. Asumsi untuk waktu les yang sangat lama dan lama les yang khas di negara-negara tertentu masih sangat rendah. Sejauh pekerjaan otoritas publik sejauh menciptakan pelatihan, bagian dari rencana keuangan instruksi untuk Vietnam, Thailand, dan Indonesia adalah 20% dari rencana keuangan penggunaan pemerintah lengkap, namun hasil yang diberikan di setiap negara adalah unik. Dengan porsi 20% dari rencana pengeluaran pelatihan ini, lamanya bimbingan belajar untuk penduduk Vietnam berkembang dengan cepat, menunjukkan bahwa bagian dari rencana keuangan ini telah ditetapkan dengan baik. Pemerintah Thailand memberikan pengajaran gratis hingga kelulusan sekolah menengah untuk lebih mengembangkan akses dan sifat pelatihan (KBRI Bangkok, 2014). Meskipun asumsi sekolah yang ditarik oleh penduduk Thailand sangat tinggi, pekerjaan ini tidak memiliki opsi untuk memperluas durasi les yang biasa dilakukan oleh negara bagian Thailand.

World Bank (2013) menyatakan bahwa badan legislatif terdekat Indonesia akan lebih sering menghabiskan sebagian besar rencana keuangan sekolah mereka untuk tingkat gaji dan program sertifikat pendidik, dengan rencana pengeluaran ini berkembang pesat seiring dengan bertambahnya jumlah instruktur secara umum. Meskipun program sertifikat pengajar ini telah lebih mengembangkan bantuan pemerintah pendidik, tidak ada bukti bahwa hal itu mempengaruhi pelaksanaan siswa berkembang lebih lanjut.

Dengan bagian yang lebih sederhana dari rencana keuangan dari Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Bagian dari rencana keuangan pelatihan Filipina hanya 15,3 persen dari rencana keuangan pemerintah yang lengkap (World Bank, 2016). Secara keseluruhan, tingkat pengajaran di Filipina sangat bagus jika dilihat dari durasi bimbingan yang khas. Negara dengan pemenuhan instruktif paling sedikit, lebih spesifiknya jika dilihat dari lama les normal dan lama les biasa, adalah Kamboja, yang membagi sekitar 9% dari anggaran pemerintah yang absolut untuk pelatihan guna bekerja sesuai dengan sifatnya. sekolah. Bagian dari rencana keuangan negara Kamboja ini jelas kecil jika dibandingkan dengan 4 negara ASEAN lainnya. Meskipun demikian, 83% dari aset ini dialokasikan untuk angsuran kompensasi pendidik dan biaya fungsional pelatihan, hanya menyisakan sejumlah kecil aset yang tersisa untuk digunakan dalam memberikan dukungan pembelajaran yang lebih baik seperti aksesibilitas PC dan web.

Selanjutnya, legislatif ASEAN perlu mengaudit dan mengubah contoh pendukung sekolah mereka. Karena walaupun pengajaran merupakan suatu tindakan yang hasilnya tidak dapat dinikmati untuk sementara waktu, hasil dari kemajuan pelatihan sebagai perluasan sifat sumber daya manusia akan terasa mulai dari sekarang. Efek samping dari penelitian ini mendukung pemeriksaan yang diarahkan oleh Yanti et al. (2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran penggunaan administrasi secara tidak relevan mempengaruhi IPM di Indonesia, hal ini karena penyebaran pengeluaran pemerintah masih di bawah 10% dari produk domestik bruto habis pakai, membuat pengeluaran untuk kesejahteraan dan pendidikan menjadi agak sedikit, dan belanja pemerintah absolut untuk pemanfaatan, yang dimanfaatkan oleh pemanfaatan individu, (misalnya

administrasi pelatihan di sekolah/ perguruan tinggi dan administrasi kesejahteraan di puskesmas/ puskesmas) hanya 38,64 persen.

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* yang ditunjukkan oleh Tabel 1.5, selama periode 2000-2018 dapat diketahui bahwa Keterbukaan Perdagangan juga menunjukkan dampak yang tidak penting pada catatan peningkatan manusia. Karena motivasi utama di balik transparansi pertukaran ini bukan untuk meningkatkan kemajuan kualitas manusia tetapi untuk bekerja pada kinerja keuangan suatu negara, di mana suatu negara dapat memperoleh aset, baik aset normal, SDM, maupun inovasi dari berbagai negara untuk mengatasi masalah kerabatnya, dan menjual aset. melimpah ke berbagai negara untuk menciptakan keuntungan. Kehadiran open access ini tidak langsung dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan namun dapat diapresiasi langsung oleh para business visioner yang memanfaatkan cross-line exchange access, dimana para business visioner dapat menjual barang-barang mereka secara lokal serta mendapatkan keuntungan lebih dengan menjual tenaga mereka. dan produk di luar negeri. Sebenarnya, Sekretariat Publik ASEAN menyatakan bahwa ASEAN Financial People group (AEC) dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan moneter karena memiliki 4 poin pendukung, yaitu (a) pasar tunggal dan basis penciptaan; (b) zona moneter yang sangat serius; (c) daerah dengan pergantian peristiwa yang adil dan sederhana; dan (d) wilayah yang terkoordinasi dengan ekonomi dunia. Oleh karena itu, ini masuk akal mengapa penerimaan pertukaran tidak langsung mempengaruhi catatan kemajuan manusia.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Jadoon et al. (2015) menyatakan bahwa dampak besar transparansi pertukaran terhadap sumber daya manusia hanya untuk negara-negara maju mengingat negara-negara maju telah mempersiapkan SDM, sedangkan untuk negara-negara non-industri kehadiran penerimaan pertukaran tidak sama sekali mempengaruhi sumber daya manusia, mengingat fakta bahwa angkatan kerja di negara-negara berkembang orang-orang yang menciptakan kurang berbakat.

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* yang ditunjukkan oleh Tabel 1.5, selama periode 2000-2018 dapat diketahui bahwa Perkembangan moneter mempengaruhi file kemajuan manusia. Nilai positif ini menunjukkan bahwa pembangunan moneter dapat memperluas rekor peningkatan manusia di 5 negara ASEAN, yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja. Produk domestik bruto per kapita di 5 negara ASEAN terus meningkat secara konsisten, meskipun terjadi penurunan karena keadaan darurat, namun setelah itu produk domestik bruto per kapita terus meningkat.

Presentasi moneter besar yang dicapai oleh 5 negara ini sangat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, karena salah satu kualitas pembangunan keuangan yang diungkapkan oleh Kuznet adalah perkembangan hasil per kapita yang tinggi. Semakin tinggi perkembangan moneter maka semakin tinggi pula perkembangan hasil per kapita yang dapat mengubah desain pemanfaatan, untuk itu tingkat daya beli individu semakin tinggi. Daya beli individu merupakan salah satu penanda dalam memastikan file kemajuan manusia, khususnya unsur cara hidup terhormat yang membahas perspektif moneter dengan menggambarkan tingkat bantuan pemerintah melalui kepuasan

pribadi daerah setempat sebagai efek positif. memperluas atau bekerja adil dan persegi nilai dan keadaan keuangan yang stabil. UNDP sendiri menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto yang disesuaikan dengan daya beli dan disempurnakan oleh GNP untuk mengukur cara hidup yang baik bagi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan moneter diprosikan dengan Produk Domestik Bruto per kapita yang dicapai oleh Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja secara lugas. dapat lebih mengembangkan catatan peningkatan manusia.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Fretes (2017) yang menyatakan bahwa perkembangan keuangan berdampak pada catatan peningkatan manusia, semakin tinggi pembangunan moneter akan benar-benar ingin membangun file kemajuan manusia. Chalid & Yusuf (2014) mengatakan bahwa perkembangan moneter berdampak pada daftar peningkatan manusia, sehingga laju pembangunan keuangan harus ditingkatkan sehingga nilai file kemajuan manusia terus berkembang.

3.4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Kamboja

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melihat pengaruh dari pengeluaran pemerintah dan *trade openness* terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil regresi *fixed effect model*, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM sebesar 0.195318 dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.610975. Pengaruh tidak langsung dari pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebesar $0.610975 \times 0.195318 = 0.11933441505$. Dengan demikian, hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran dan *trade openness* terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0.11933441505.

Uji Sobel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel independen ke variabel dependen melalui variabel *intervening*. Hasil uji sobel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab} = \frac{ab}{\sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}} = \frac{0.11933441505}{\sqrt{(0.0003028404)}} = \frac{0.11933441505}{0.01740} = 6.8583$$

Pada signifikansi 5 persen dan jumlah observasi 95 serta jumlah variabel adalah 4 ($df = 95 - 4 = 91$), maka t_{tabel} yang didapat adalah 1.66177. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa $6.8583 > 1.66177$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi selama periode 2000-2018.

Dari segi kesehatan, negara-negara dari tiga negara ASEAN sangat hebat dalam menyelesaikan peningkatan kesejahteraan, khususnya melalui program jaminan kesehatan yang diluncurkan dengan tujuan bahwa semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan. Administrasi yang diberikan dapat mempengaruhi aksesibilitas tenaga kerja yang memiliki apa yang dibutuhkan,

informasi dan dijunjung tinggi oleh kesejahteraan yang memadai, sehingga angkatan kerja akan benar-benar ingin menciptakan tenaga kerja dan produk yang berkualitas, kemudian dapat terjadi peningkatan upah dan juga akan meningkatkan pendapatan kotor. produk domestik per kapita. Peningkatan gaji ini juga dapat berdampak pada IPM untuk situasi ini, khususnya peningkatan harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa dalam peristiwa keuangan, laju pembangunan pengeluaran pemerintah sangat tinggi karena otoritas publik memberikan tugas penting untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan di suatu negara dan sebagian besar negara. spekulasi ini ada di bidang pelatihan, kesejahteraan, jalan, listrik, dan air bersih. Usaha-usaha ini merupakan upaya untuk memperluas catatan kemajuan manusia berdasarkan aspek-aspeknya yang terdiri dari aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, dan aspek kehidupan yang adil.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Juma'eh et al. (2020) bahwa dampak pengeluaran pemerintah pada file peningkatan manusia adalah dampak negatif, khususnya melalui pembangunan keuangan, di mana pengeluaran pemerintah secara langsung sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi pengeluaran pemerintah tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan rekor kemajuan manusia, sementara pembangunan keuangan berdampak pada perluasan daftar peningkatan manusia, sehingga pengeluaran pemerintah secara tidak langsung mempengaruhi IPM melalui pembangunan keuangan.

Berdasarkan hasil regresi data, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM sebesar 0.195318 dan keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.103763. Pengaruh tidak langsung dari keterbukaan perdagangan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi sebesar $0.103763 \times 0.195318 = 0.020266781634$. Dengan demikian, hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0.020266781634. Kemudian, hasil uji sobel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab} = \frac{ab}{\sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}} = \frac{0.020266781634}{\sqrt{(0.000075375)}} = \frac{0.020266781634}{0.008682} = 2,334345$$

Pada signifikansi 5 persen dengan observasi sebesar 95 serta jumlah variabel adalah 4 ($df = 95-4 = 91$), maka t_{tabel} yang didapat adalah 1.66177. Jadi, hasil uji sobel menunjukkan bahwa $2.334345 > 1.66177$, maka keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi selama periode 2000-2018.

Tingkat Keterbukaan Perdagangan adalah 3 dari 5 negara ASEAN, khususnya Vietnam, Kamboja, dan Thailand telah menunjukkan angka yang luar biasa. Vietnam dengan tingkat penerimaan pertukaran 208%, Kamboja dengan tingkat transparansi pertukaran 124%, dan Thailand dengan tingkat transparansi pertukaran 120%, ini menunjukkan bahwa masuk ke sektor bisnis di seluruh dunia telah banyak digunakan oleh 3 ini. bangsa dalam menggerakkan informasi dan inovasi. seperti yang diungkapkan oleh hipotesis perkembangan endogen. Transparansi pertukaran ini dapat meningkatkan pembangunan keuangan secara langsung namun tidak dapat membangun IPM secara langsung.

Mengingat hipotesis perkembangan moneter endogen, transparansi pertukaran jelas akan lebih mengembangkan inovasi dan penciptaan peningkatan, sehingga karena penerimaan, negara-negara agraris membangun manfaat dan efisiensi mereka dengan memanfaatkan kemajuan informasi dan kemajuan baru yang menyebabkan negara-negara berkembang memberikan penciptaan yang lebih luas. , sehingga mencapai pembangunan keuangan. Seperti yang baru-baru ini dipahami, ekspansi dalam pembangunan keuangan merupakan gambaran dari gaya hidup individu yang meningkat. Cara hidup sendiri merupakan salah satu bagian dalam peningkatan IPM, sehingga cenderung dapat disimpulkan bahwa adanya penerimaan devisa akan berdampak baik terhadap catatan kemajuan manusia yang berimplikasi pada pembangunan moneter.

Hamid & Amin (2013) melakukan penelitian yang mendukung hasil penelitian tersebut, yang menyatakan bahwa perdagangan memiliki hubungan positif yang kritis dengan file kemajuan untuk kelas pembayaran, namun ada hubungan yang tidak relevan dengan catatan peningkatan manusia non-bayar, ini menunjukkan bahwa pertukaran terkait dengan peningkatan manusia hanya melalui saluran pembayaran, dan tidak terkait dengan bagian yang berbeda seperti rentang hidup. , tingkat kemahiran dan prestasi instruktif.

4. Kesimpulan

Dilihat dari besarnya bantuan pemerintah daerah di suatu negara, pada umumnya dilihat dari besarnya tingkat perkembangan ekonomi. Estimasi bantuan pemerintah melalui pembangunan moneter tidak cukup untuk memaknai pencapaian kemajuan suatu negara, sehingga diperlukan berbagai petunjuk dalam memperkirakan peningkatan untuk melihat seberapa besar suatu negara menyelesaikan bantuan pemerintahnya yang harus terlihat melalui catatan peningkatan manusianya. Catatan peningkatan manusia yang dibuat oleh UNDP adalah tolok ukur dalam memperkirakan bantuan pemerintah individu terlepas dari perkembangan moneter. Peningkatan fitrah SDM berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. Hal ini karena SDM yang berkualitas sebenarnya akan ingin meningkatkan efisiensi dan menambah kemajuan inovatif yang mempengaruhi bantuan pemerintah secara individu, sehingga IPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat hakikat keberadaan manusia yang dapat mendorong terjadinya keadaan yang efektif.

Pengeluaran pemerintah mungkin dapat membangun laju perkembangan moneter di suatu negara. Semakin diperhatikan konsumsi yang dilakukan oleh otoritas publik, semakin tinggi pula tingkat perekonomian yang dicapai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan moneter, namun tidak secara esensial mempengaruhi file kemajuan manusia di 5 negara ASEAN, yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja. Bagaimanapun, penyelidikan ini menemukan bahwa pengeluaran administrasi secara signifikan mempengaruhi daftar peningkatan manusia melalui pembangunan keuangan di 5 negara ASEAN yang dipertimbangkan, khususnya Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja.

Keterbukaan perdagangan dipandang akan mendorong akses lebih luas pada produksi yang dapat meningkatkan kemajuan teknologi sehingga dapat memajukan perekonomian negara. Keterbukaan Perdagangan di 5 Negara ASEAN yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, ditemukan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A., & Rusdarti. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*, 6(1), 11-18.
- Afifah, A. T., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2017). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1988-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(2), 11-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i1>
- Aladejare, S. A. (2013). Government Spending and Economic Growth: Evidence from Nigeria. *Munich Personal RePEc Archive*, 4(43916), 1-22.
- ASEAN Sekretariat. (2019). *ASEAN Key Figures 2019* (Vol. 2019). ASEAN Sekretariat. www.asean.org
- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2018*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1-12. <https://doi.org/10.31258/je.22.2.p.1-12>
- Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187-210. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. (2017). *ASEAN Selayang Pandang* (22nd ed.). Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
- Fretes, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1-33. <https://doi.org/10.29407/jae.v2i2.864>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (Ke-8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hamid, Z., & Amin, R. M. (2013). Trade and Human Development in OIC Countries : A Panel Data Analysis. *Islamic Economic Studies*, 21(2), 55-70. <https://doi.org/10.12816/0001558>
- 1 Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1342>
- 1 Idris, J., Yusop, Z., & Habibullah, M. S. (2016). Trade Openness and Economic: A Causality Test in Panel Perspective. *International Journal of Business and Society*, 17(2), 281-290. <https://doi.org/10.33736/ijbs.525.2016>
- Jadoon, A. K., Rashid, H. A., & Azeem, A. (2015). Trade Liberalization, Human Capital and Economic Growth: Empirical Evidence from Selected Asian Countries. *Pakistan Economic and Social Review*, 53(1), 113-132.
- 1 Juma'eh, Tiawon, H., & Hukom, A. (2020). Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 40-45.
- KBRI Bangkok. (2014). *Sistem Pendidikan di Thailand*. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok. atdikhudbangkok.org
- 1 Kimaro, E. L., Keong, C. C., & Sea, L. L. (2017). Government Expenditure, Efficiency and Economic Growth: A Panel Analysis of Sub Saharan African Low Income Countries. *African Journal of Economic Review*, 5(2), 34-54. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.264565>
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62-72.
- Mangkoesebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE-UGM, Yogyakarta.
- 1 Olaifa, F. G., Subair, K., & Biala, M. I. (2013). Trade Liberalization and Economic Growth in Nigeria: A Cointegration Analysis. *Journal of Business, Economics & Finance*, 2(3), 43-52. <http://www.ijrdo.org/index.php/bm/article/view/2076>
- 1 Purnomo, R. N., & Mudakir, B. (2019). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007 - 2017). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 20-35. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.2.20-35>
- 1 Sanjaya, M. W., Sudirman, I. W., & Budiasa, I. G. S. (2017). Pengaruh Pendalaman Finansial Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(1), 78-88. <https://doi.org/10.24843/bse.2017.v22.i01.p08>
- Santoso, S. A., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Analisis Pengaruh

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 76-88.

Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.

Suliswanto, M. S. W. (2016). Tingkat Keterbukaan Ekonomi Di Negara Asean-5. *Neo-Bis*, 10(1), 33-48. <https://doi.org/10.21107/nbs.v10i1.1582>

Sultan, Z. A., & Haque, M. I. (2018). Oil Exports and Economic Growth: An Empirical Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(5), 281-287.

Sutjipto, H., & Puspitasari, M. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeri Pemerintah, Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Bruto. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 36-53. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4161>

Swaramarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Econosains*, 9(2), 95-105. <https://doi.org/10.21009/econosains.0092.01>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.

UNDP. (2019). *Human Development Report 2019*. United Nations Development Programme.

Widayati, R. F. (2017). Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional, Modal Manusia dan Aliran Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5 Tahun 1993-2013. *Jurnal Equilibrium, Edisi Khusus*, 58-70. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.419>

World Bank. (2013). *Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik: Memperbaiki Pendanaan Pendidikan di Indonesia*. World Bank.

World Bank. (2016). *Increasing Investment to Improve Basic Education Outcomes in the Philippines*. World Bank.

Yanti, E. F., Indrawati, L. R., & Prasetyanto, P. K. (2018). Analisis Pengaruh PMTB, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Kemiskinan terhadap IPM di Indonesia Periode 2010-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 632-646.

BAB II

1 ANGKA HARAPAN HIDUP DAN KESEHATAN (Kausalitas Antara Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-5)

Oleh:

Soni Afriansyah Palka; Siti Rohima; Abdul Bashir

1. Pendahuluan

1 *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)* adalah sebuah asosiasi yang dipelopori oleh lima negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Asosiasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand terkait dengan Bangkok Statement. Hingga saat ini, otoritas individu dari ASEAN telah berkembang menjadi 10 negara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk memajukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara tanpa henti dengan berbagai jenis partisipasi, salah satunya adalah kerjasama di bidang keuangan. (Sekretariat Publik ASEAN-Indonesia).

Negara-negara yang merupakan individu dari ASEAN melengkapi berbagai jenis partisipasi, salah satunya adalah kerjasama di bidang keuangan. Untuk mengakui salah satu tujuan sebagai ASEAN, untuk lebih spesifik mensukseskan negara-negara ASEAN, digunakan petunjuk-petunjuk yang dapat mengukur tingkat bantuan pemerintah di setiap negara di ASEAN. Salah satu tanda hasil kemajuan teritorial dapat dilihat dari tingkat perkembangan moneter.

Pengembangan keuangan yang diperluas dan layak adalah kondisi penting untuk pergantian peristiwa moneter yang dapat dipertahankan. Karena populasi terus berkembang, pembayaran ekstra diperlukan secara konsisten (Suparno, 2015). Hal ini dapat dipenuhi dengan memperluas hasil total kedua tenaga kerja dan produk atau PDB (Produk Domestik Bruto) secara konsisten. Dengan cara ini, sesuai dengan makroekonomi, gagasan pembangunan keuangan adalah perluasan produk domestik bruto yang juga menyiratkan perluasan pembayaran publik. Sehingga cenderung beralasan bahwa salah satu petunjuk yang dapat mengukur perkembangan keuangan adalah dengan melihat laju PDB (Produk Domestik Bruto) negara tersebut.

Di Negara ASEAN menunjukkan hasil yang positif laju PDB dengan periode 2010-2018. Berikut grafik laju pertumbuhan PDB ekonomi negara di ASEAN pada tahun 2010, 2015 dan 2018.

Tabel 2.1 Distribusi PDB Total Negara ASEAN Tahun 2010-2018

Negara	Distribusi Total PDB di ASEAN (persen)		
	2010	2015	2018
Brunei Darusalam	0,70	0,50	0,50
Indonesia	36,80	34,80	34,90
Kamboja	0,60	0,70	0,80
Laos	0,30	0,60	0,60
Malaysia	13,00	12,20	12,00
Myanmar	2,10	2,40	2,60
Filipina	10,40	11,90	11,50
Singapura	12,40	12,50	12,20
Thailand	17,70	16,40	16,90
Vietnam	6,00	7,90	8,10
ASEAN	100	100	100

Sumber: *The ASEAN secretariat*, 2019. Data diolah

Berdasarkan *ASEAN Integration Report* yang di muat oleh *The ASEAN Secretariat*, Di antara negara-negara bagian ASEAN, ekonomi Indonesia adalah yang terbesar, dengan penyampaian 34,9 persen dari produk domestik Bruto ASEAN pada 2018, disusul oleh Thailand dengan 16,9 persen. Meskipun demikian, nilainya agak menurun mulai sekitar tahun 2010, karena ekonomi yang berbeda di lokal secara bertahap menempel pada pola yang sama ini. Selain itu, negara Vietnam telah berkembang sebesar 2,1 persen dari 6,0 persen produk domestik bruto teritorial pada 2010 menjadi 8,1 persen pada 2018 dan Filipina, dari 10,4 persen pada 2010 menjadi 11,5 persen pada 2018. Apalagi ekonomi kecil Kamboja, Laos, dan Myanmar juga mengalami ekspansi produk domestik bruto dari 2010-2018. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa negara dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi pada tahun 2018 adalah Indonesia, disusul oleh Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, dan Filipina. Berdasarkan uraian di atas, lima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) serta negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di tahun 2018 menjadi objek penelitian ini.

Selain melihat laju perkembangan keuangan dengan memperkirakan nilai Produk Domestik Bruto, petunjuk bantuan pemerintah juga dapat diperkirakan melalui berbagai penanda, khususnya sifat SDM di setiap negara ASEAN. estimasi sifat SDM harus dimungkinkan melalui Daftar Peningkatan Manusia.

File Kemajuan Manusia yang diberikan oleh UNDP pada tahun 1991 membuat masuk akal bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah strategi untuk memperkirakan tingkat kemajuan pergantian peristiwa manusia. Mulai sekitar tahun 1990, UNDP telah menggunakan HDI untuk mengukur upaya suatu negara untuk mencapai pergantian manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak dapat mengukur semua bagian dari peningkatan, itu dapat mengukur bagian-bagian mendasar dari kemajuan manusia yang mencerminkan status kapasitas penting dari populasi. Untuk dapat mengukur tingkat bantuan pemerintah melalui catatan kemajuan manusia, cenderung diukur dengan beberapa aspek,

khususnya aspek kesejahteraan yang mencakup umur panjang dan solid seperti yang diperkirakan oleh petunjuk masa depan, informasi seperti yang diperkirakan oleh orang normal. lama les dan lama les yang khas dan cara hidup yang adil (BPS, 2021). Oleh karena itu, kesejahteraan seperti yang diperkirakan oleh masa depan (AHH) daerah merupakan salah satu penanda mendasar dalam meningkatkan kemajuan manusia seperti yang ditunjukkan oleh UNDP (1990).

Samsubar (dalam Sukartini & Saleh, 2012) melakukan penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa angka harapan hidup (AHH) dan tingkat pendidikan rata-rata mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kesejahteraan adalah syarat utama untuk memperluas efisiensi. Seseorang yang memiliki efisiensi tinggi akan mendapatkan tingkat bantuan pemerintah yang lebih tinggi pula. Untuk mendapatkan harapan yang mewah dan nyaman, suatu negara harus menyediakan kantor administrasi kesejahteraan yang memuaskan untuk membantu peningkatan kualitas SDM. Untuk membantu upaya tersebut, diperlukan mediasi pemerintah. Menurut Menurut Ben-David (2009) kesejahteraan sangat penting daripada pelatihan untuk pengembangan keuangan karena penyakit dianggap dapat berperan dalam memengaruhi perkembangan keuangan. Demikian pula, seperti yang ditunjukkan oleh Yefriza (2015) pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan merupakan elemen penting dalam penurunan angka kematian bayi dan anak serta perluasan masa depan.

Tabel 2.2 Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tahun 2018

Negara	AHH (tahun)	Pengeluaran Pemerintah (Dolar AS)
Singapura	83,14	2234,97
Malaysia	75,99	611,02
Thailand	76,93	551,21
Indonesia	71,51	185,06
Filipina	71,09	128,62

Sumber: World Bank

Angka Harapan Hidup dapat tercermin dari pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan yang juga tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, keanehan yang terjadi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN tidak berbanding lurus dengan masa depan kerabatnya, hal ini dilihat dari masa depan informasi dan pengeluaran pemerintah untuk bidang kesejahteraan di beberapa negara di ASEAN pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2018 di mana Bank Dunia melaporkan dari lima negara di ASEAN, hanya ada satu negara yang memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi, yaitu Singapura pada 83,14 tahun dengan total penggunaan pemerintah di bidang kesejahteraan US\$ 2234,97 dan tertinggi di ASEAN. Jika dilihat dari Produk Domestik Bruto negara-negara ASEAN yang paling menonjol selama 2018, khususnya Indonesia sebesar US\$1,0 triliun, hanya memiliki tingkat harapan hidup sebesar 71,51 tahun dengan

penggunaan pemerintah habis-habisan sebesar US\$185,06, angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis Harrod Domar tentang perkembangan moneter diciptakan pada waktu yang hampir sama oleh Roy Harrod pada tahun 1934 di Inggris dan Evsey Domar pada tahun 1957 di AS. Kedua ahli tersebut menggunakan teknik estimasi yang berbeda, namun memberikan hasil yang serupa, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sangat mirip dan dikenal sebagai hipotesis Harrod-Domar. Seluruh hipotesis merupakan peningkatan dari hipotesis Keynesian. Dalam hipotesis Keynesian, Keynes menerima bahwa perkembangan moneter adalah momen saat ini (keadaan statis), sedangkan Harrod Domar menerima bahwa perkembangan keuangan adalah jangka panjang (keadaan dinamis).

Seperti yang ditunjukkan oleh Keynes, pergerakan keuangan terutama bergantung pada penggunaan penuh yang dibuat dalam perekonomian pada waktu yang acak. Keynes menggarisbawahi pentingnya belanja umum sebagai penggerak utama perekonomian. Konsumsi habis-habisan adalah penggunaan yang dilakukan untuk membeli tenaga kerja dan produk yang diciptakan oleh suatu perekonomian selama periode tertentu.

Teori Pertumbuhan neoklasik memandang hal ini menurut sudut pandang alternatif, lebih spesifik menurut sudut pandang inventaris. Teori yang dibuat oleh Abramovitz dan Solow terletak pada kemajuan variabel-variabel penciptaan (peningkatan modal, pengembangan penduduk, dan pengembangan inovatif). Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis Solow, komponen utama dari perkembangan moneter bukanlah pengembangan modal dan kerja, tetapi komponen utama dari pengembangan finansial adalah kemajuan mekanis dan kemampuan dan kemampuan kerja.

2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menggambarkan strategi otoritas publik suatu negara. Dengan asumsi otoritas publik menyusun strategi akuisisi tenaga kerja dan produk, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus ditanggung oleh otoritas publik untuk melaksanakan pengaturan (Mangkoesebroto, 1993). Dalam Purnomo (1995), hipotesis Bailey tentang kemajuan pengeluaran pemerintah diisolasi menjadi dua: hipotesis skala penuh dan hipotesis miniatur. Model skala besar dapat menggambarkan perkiraan perkembangan pengeluaran pemerintah yang tergambar, sedangkan model miniatur dapat menggambarkan perubahan pada bagian-bagian tertentu dari pengeluaran pemerintah. Makro teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu (a) sebuah model tentang pengeluaran pemerintah; (b) Hukum Wagner; dan (c) Teori Peacock dan Wiseman (Mangkoesebroto, 1993).

Model yang dibuat oleh Rostow dan Musgrave berarti menghubungkan kemajuan penciptaan pemerintah dengan fase-fase perputaran keuangan. Fase

perbaikan moneter dibagi menjadi lebih cepat dari jadwal, setengah jalan dan tahap tingkat tinggi.

Proporsi usaha pemerintah untuk menambah spekulasi sangat penting karena pada tahap awal pergantian peristiwa moneter, otoritas publik harus memberikan kerangka seperti pelatihan, kesejahteraan, dan transportasi. Di fase tengah pergantian peristiwa moneter, usaha publik masih diperlukan agar perkembangan keuangan dapat lepas landas, namun pada tahap ini pekerjaan spekulasi swasta telah meluas. Di tingkat moneter lain, Rostow memahami bahwa dalam pergantian peristiwa keuangan, latihan pemerintah bergeser dari kerangka pemberian ke pengeluaran untuk latihan ramah seperti program usia lanjut, program administrasi kesejahteraan masyarakat, dll.

Regulasi Wagner, sebagaimana digambarkan oleh Mangkoesoebroto, memberikan hipotesis peningkatan belanja pemerintah, yang ternyata semakin signifikan sebagai tingkat GNP, juga didasarkan pada persepsi di AS, Eropa dan Jepang. Hukum membaca dengan teliti "Dalam suatu perekonomian, jika pembayaran per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah akan meningkat".

2.3. Teori Human Capital

Human Capital atau spekulasi sumber daya manusia terkait dengan pengaturan sumber daya manusia, khususnya cara paling umum untuk memperoleh dan memperluas jumlah individu yang memiliki apa yang diperlukan, instruksi dan pengalaman yang menentukan kemajuan keuangan suatu negara. Dari perspektif yang luas, minat pada sumber daya manusia menyiratkan pengeluaran untuk kesejahteraan, pengajaran, dan administrasi sosial. Sumber daya manusia dapat dicirikan sebagai suatu jenis modal yang tidak terlalu terlihat karena berkaitan dengan kemampuan dan informasi yang dibawa oleh orang-orang yang melalui masa sekolah dan persiapan yang lama yang berharga untuk menciptakan tenaga kerja dan produk (Maulana, 2015).

Menurut Todaro dan Smith, sumber daya manusia adalah minat yang berguna pada individu termasuk informasi, kemampuan, kapasitas, pemikiran, kesejahteraan dan area, sering terjadi karena pengeluaran untuk pengajaran, proyek persiapan langsung, dan perawatan medis. Kesejahteraan penting untuk pengembangan keuangan (Todaro & Smith, 2011).

Kesejahteraan mengambil bagian penting dalam membuat angkatan kerja yang berguna dan benar-benar berbakat, yang sangat penting untuk pembangunan moneter suatu negara. Melalui kesejahteraan, efisiensi kerja seseorang dapat meningkat dan selanjutnya gajinya. Gaji ini juga akan mempengaruhi gaji masyarakat negara yang bersangkutan, yang dengan demikian akan meningkatkan gaji dan gaya hidup individu.

2.4. Angka Harapan Hidup

Harapan Hidup adalah tanda delegasi dari catatan perbaikan manusia. (AHH) digunakan sebagai penunjuk untuk mengukur kesejahteraan individu dalam suatu ruang. Masa Depan (AHH) adalah ukuran usia tipikal di mana suatu populasi akan tiba pada jangka waktu tertentu. Semakin baik keadaan keuangan dan manfaat klinis negara, semakin tergambar masa depan penghuninya. Masa depan

penduduk saat memasuki dunia dipandang siap menggambarkan sifat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi individu masa depan di wilayah makan, semakin tinggi sifat kesejahteraan umum (BPS, 2018)

Harapan Hidup ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian bundaran. Ada dua jenis informasi yang digunakan untuk memastikan masa depan, yaitu anak-anak yang masih hidup saat memasuki dunia (ALH) dan anak-anak yang masih hidup (AMH). Kemudian, untuk memastikan rekor masa depan, masa depan terbesar digunakan oleh pedoman UNDP, sejauh mungkin melibatkan jumlah terbesar sebagai file komputasi adalah 85 tahun, dan jumlah yang paling sedikit digunakan adalah 25 tahun (standar UNDP). Jika kesejahteraan, rezeki, dan kondisi ekologis bagus, masa depan akan sangat panjang.

Khas masa depan bayi di suatu ruang atau masa depan yang diketahui saat memasuki dunia (e_0), harus terlihat dari kesejahteraan umum penduduk di daerah tersebut. Akibat dari petunjuk ekstensif yang terkait dengan masa depan menunjukkan bahwa efek samping dari pengembangan wilayah lokal yang kokoh secara langsung terkait dengan pengembangan di masa depan dalam suatu ruang. Sebagai daftar perbaikan manusia, file ini adalah catatan lengkap yang luar biasa yang menggambarkan kemajuan pergantian peristiwa.

3. Hasil Kajian

Penelitian ini menganalisis apakah terdapat hubungan kausalitas antara angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Objek dalam penelitian yaitu 5 negara ASEAN di antaranya Indonesia, Thailand Filipina, Malaysia, dan Singapura selama periode 2000-2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah angka harapan hidup yang diukur dalam satuan tahun, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang diukur dengan satuan Dolar AS konstan 2010, dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan satuan persentase dari GDP.

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode panel *vector error correction model* (VECM) dan Uji Kausalitas *Granger*. Dalam melakukan pengujian model regresi pada PVECM dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu yang pertama uji stasioneritas data, uji kointegrasi, Uji kausalitas granger dan model PVECM. Adapun susunannya sebagai berikut:

3.1. Uji Stasioner (Unit root)

Saat menggunakan papan VECM, tahap awal dalam pengujian adalah benar-benar melihat unit penting atau ketergantungan informasi untuk setiap variabel yang akan digunakan dalam tinjauan. Pengujian akar unit dalam tinjauan penting karena mencakup konsekuensi penilaian eksplorasi apakah informasi yang digunakan adalah informasi tetap atau tidak tetap, yang akan menyebabkan kekambuhan yang menyesatkan. Pemeriksaan yang dipimpin oleh pembuat menggunakan teknik untuk benar-benar melihat keandalan informasi, khususnya tes ADF Fisher. Dengan asumsi nilai kemungkinan ADF Fisher chi Square $< 1,5$ atau 10%, informasi tersebut dianggap tidak tetap.

Tabel 2.3 Hasil Uji Unit Root

No	Variabel	Tingkat Level			Tingkat First Different		
		Statistik ADF Fisher	Probabilitas ADF Fisher	Ket	Statistik ADF Fisher	Probabilitas ADF Fisher	Ket
1	LE	0.60450	1.0000	Non Stasioner	23.5907	0.0088	Stasioner
2	HE	0.00344	1.0000	Non stasioner	19.1133	0.0388	Stasioner
3	GDP	11.5723	0.3147	Non Stasioner	109.348	0.0000	Stasioner

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9

Berdasarkan konsekuensi dari uji akar unit yang menggunakan Fisher's ADF, disadari bahwa tidak semua faktor ditetapkan pada level tersebut. Jika informasi tersebut tidak diperbaiki, diperlukan pengujian tetap di tingkat utama. Jika dilihat dari unit root test menggunakan primary unique, hasilnya menunjukkan bahwa semua faktor tetap dengan nilai kemungkinan yang lebih kecil, tingkat kepentingannya adalah = 5% (0,05). Jadi ketiga faktor yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan pada tingkat primer yang berbeda.

3.2. Uji Kointegrasi

Jika semua variabel lolos uji unit root, langkah selanjutnya ialah melakukan uji kointegrasi untuk setiap variabel pencarian. Uji kointegrasi untuk mengetahui ada tidaknya relasi jangka panjang, yaitu apakah hubungan antar variabel dalam penelitian ini serupa dalam gerak dan stabilitas. Uji kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan Johansen Fisher Panel Cointegration Test dengan tingkat stasioner first different.

Tabel 2.4 Hasil Uji Kointegrasi Johansen Fisher

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Fisher Stat.* (from trace test)	Prob.	Fisher Stat.* (from max-eigen test)	Prob.
None	52.52	0.0000	30.23	0.0008
At most 1	30.39	0.0007	22.85	0.0113
At most 2	17.32	0.0676	17.32	0.0676

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9

Dari hasil tersebut cenderung terlihat bahwa dengan nilai kemungkinan > 5% dapat dikatakan bahwa faktor model memiliki kointegrasi atau memiliki hubungan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa ada hubungan yang stabil atau disesuaikan antara faktor-faktor masa depan, pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan pembangunan moneter jangka panjang. Salah satu prasyarat uji PVECM adalah kointegrasi faktor, selanjutnya tanpa kointegrasi langkah PVECM tidak dapat diselesaikan. Meskipun

demikian, pada pengujian di atas telah ditunjukkan adanya hubungan kointegrasi atau hubungan berlarut-larut, setelah itu waktu pengujian PVECM dapat dilanjutkan.

3.3. Uji Kausalitas Granger dengan model VECM

Model VECM diharapkan dapat melihat hubungan jangka Panjang antara variabel penelitian, dengan menggunakan metode uji *Johansen cointegration*. Namun uji tersebut tidak menunjukkan tentang arah kausalitas antar variabel, oleh karena itu uji kausalitas granger harus dilakukan. Apabila variabel penelitian terkointegrasi, maka VECM berbasis Kausalitas granger adalah teknik yang tepat digunakan untuk menentukan jangka Panjang dan hubungan jangka pendek (Eangle & Granger, 1987) sebagai berikut:

Tabel 2.5 Hasil Uji Kausalitas Granger dengan VECM

Variabel Dependen	Kausalitas Jangka Pendek			Jangka Panjang ECTt-1		
	HE	LE	GDP	HE	LE	GDP
HE	-	2.76966 (0.0162)	2.82862 (0.0645)	-	-0.011081 (0.03127)	0.014566 (0.01771)
LE	1.98103 (0.0757)	-	3.42748 (0.0046)	-0.156495 (0.05047)	-	0.002077 (0.00503)
GDP	3.43286 (0.0046)	2.08705 (0.0616)	-	-2.705533 (0.29179)	-2.509909 (0.29998)	61.98604 55.94388

Sumber: Data diolah dengan *Eviews 9*

Berdasarkan hasil tinjauan menggunakan uji kausalitas Granger, terlihat bahwa pengeluaran administrasi di bidang kesejahteraan mempengaruhi masa depan karena kemungkinannya lebih kecil daripada tingkat kepentingan 5%, yaitu 0,0162 , jadi bisa dikatakan bahwa pengeluaran administrasi di bidang kesejahteraan memiliki hubungan satu arah dengan masa depan untuk sementara. Sementara itu, variabel masa depan tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan karena kemungkinannya lebih menonjol dari 5% dengan kemungkinan 0,0757. Ini cenderung dianggap bahwa masa depan tidak memiliki hubungan satu arah dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan. Hasil penilaian menunjukkan adanya kerjasama yang seimbang antara kedua faktor tersebut.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “proses” yang memperluas pilihan masyarakat (*Human Development Report, 2001*), dalam arti bahwa masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk dapat mengukur hasil dari program peningkatan kesejahteraan di suatu tempat, bagian dari catatan kemajuan manusia, khususnya masa depan, dapat digunakan. Di mana masa depan adalah masa depan pada usia x adalah jumlah khas dari periode kehidupan yang panjang untuk seseorang yang telah menang pada usia x pada tahun tertentu yang masih berada di bawah tingkat kematian

keseluruhan di arena publik atau Masa depan adalah masa depan khas anak lain bentangan panjang rutinitas sehari-hari yang dikandung akan dialami pada tahun tertentu. Masa depan adalah bagian dari pelaksanaan pemerintah dalam bekerja pada bantuan pemerintah individu pada umumnya, dan khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan lebih lanjut.

Bersamaan dengan itu, untuk menggarap tata kehidupan daerah, penting untuk bersyafaat oleh otoritas publik sebagai pemasok administrasi publik, mengingat fondasi bagi kesejahteraan daerah. Hipotesis konsumsi yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave mengaitkan peningkatan pengeluaran pemerintah dengan fase kemajuan keuangan yang dikenali pada tahap awal, tengah, dan akhir. Pada tahap awal pergantian peristiwa moneter, proporsi usaha pemerintah untuk menambah spekulasi sangat penting, karena pada tahap ini otoritas publik harus memberikan kerangka, seperti fondasi di bidang klinis. Administrasi kesejahteraan adalah salah satu administrasi publik yang diberikan oleh otoritas publik, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Sebagai negara non-industri yang benar-benar tidak berdaya terhadap masalah medis, kantor kesejahteraan dan cakupan perawatan kesehatan harus direncanakan dengan cara oleh otoritas publik. Dengan aksesibilitas kerangka kesejahteraan yang memuaskan oleh otoritas publik, adalah normal untuk membangun tingkat kesejahteraan yang dapat diperkirakan oleh masa depan daerah setempat.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Sihalo & Hardiawan (2019) mengenai belanja kesehatan terhadap angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, di mana Anggaran belanja kesehatan pemerintah mempengaruhi angka harapan di Provinsi Jawa Barat. Hasil ini disebabkan karena peningkatan pelayanan kesehatan menunjukkan perkembangan selama 2014-2016. Pada tahun 2016, kenaikan anggaran kesehatan pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat adalah 7 persen. Peningkatan ini menjadi hal yang positif karena berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Jawa Barat. Artinya apabila Pengeluaran di bidang kesehatan mengalami kenaikan, maka akan membawa pengaruh positif terhadap Angka Harapan Hidup pada masyarakat.

Kemudian, konsekuensi penilaian dari uji VECM Board menunjukkan bahwa ada hubungan yang berlarut-larut antara faktor-faktor ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai kemungkinan pengeluaran pemerintah untuk bidang kesejahteraan dengan masa depan sebesar 0,03127 dan masa depan dengan pengeluaran pemerintah pada bidang kesejahteraan sebesar 0,05047 yang lebih kecil dari = 5%, dan hal tersebut benar-benar menunjukkan adanya hubungan. Jangka panjang antara faktor Masa Depan dan Penggunaan Pemerintah di area Kesejahteraan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh (Olusoji et al., 2020) bahwa ada hubungan yang dititik antara faktor Konsumsi Pemerintah di bidang Kesejahteraan dan Masa Depan di Nigeria sesuai dengan Shahraki (2019) yang mengamati bahwa ada hubungan jangka panjang dan sementara antara konsumsi pemerintah daerah Kesejahteraan dan harapan waktu di bumi di Iran.

Berdasarkan hasil uji kausalitas, cenderung terlihat bahwa perkembangan moneter tidak mempengaruhi masa depan dan tidak memiliki hubungan karena kemungkinannya lebih besar daripada tingkat kritis 5%, yaitu 0,0616, sehingga dapat mengatakan bahwa perkembangan keuangan tidak memiliki hubungan satu arah dengan masa depan. Sementara itu, variabel masa depan mempengaruhi

perkembangan keuangan mengingat kemungkinannya di bawah 5% dengan kemungkinan 0,0046, cenderung disimpulkan bahwa masa depan memiliki hubungan kausal dengan perkembangan moneter. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang seimbang antara kedua faktor tersebut.

Hipotesis keuangan masuk akal bahwa perkembangan moneter bergantung pada peningkatan inventaris faktor-faktor penciptaan seperti populasi, pekerjaan, pengumpulan modal, dan tingkat kemajuan inovatif. Pandangan ini bergantung pada penyelidikan tradisional, bahwa ekonomi akan terus menghadapi tingkat bisnis penuh dan batas perangkat keras modal akan tetap digunakan sepenuhnya dalam jangka panjang. Perkembangan moneter mencerminkan perekonomian dalam suatu ruang, semakin tinggi perkembangan keuangan dalam suatu ruang maka diharapkan individu dalam ruang tersebut semakin sejahtera (Handayani et al., 2016). Untuk memiliki pilihan untuk mengukur tingkat bantuan pemerintah di suatu negara, Penanda Kemajuan Manusia dapat digunakan sebagai agen tingkat sifat SDM di negara tersebut. Menurut UNDP, Human Development File (HDI) digunakan untuk mengukur pencapaian peningkatan manusia berdasarkan berbagai komponen dasar kepuasan pribadi. Pengaturan aset manusia adalah cara paling umum untuk mendapatkan dan memperluas jumlah individu dengan kemampuan, pendidikan dan pengalaman yang penting bagi kemajuan keuangan suatu negara. Sejalan dengan itu, penataan SDM dikaitkan dengan kepentingan manusia dan peningkatannya sebagai aset imajinatif dan berguna (Jhingan, 2002). Salah satu petunjuk yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan manusia adalah rentang hidup, yang diperkirakan dengan variabel masa depan (kesejahteraan). Kesejahteraan memiliki batas penyampaian yang sangat besar sehubungan dengan perkembangan keuangan. Kesejahteraan sebagai aparatur untuk menjadikan tenaga kerja yang berguna dan benar-benar berkualitas sangat dibutuhkan dalam pembangunan keuangan suatu negara. Kesejahteraan dapat membangun efisiensi kerja individu, yang akan meningkatkan gajinya. Gaji ini kemudian pada saat itu akan mempengaruhi gaji masyarakat dari negara yang bersangkutan yang kemudian pada saat itu akan meningkatkan gaji dan gaya hidup atau bantuan pemerintah daerah setempat.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Prananda et al. (2018) mengenai dampak masa depan terhadap perkembangan moneter, dimana masa depan mempengaruhi perkembangan keuangan di Indonesia. Ekspansi di masa depan merupakan peningkatan keterbukaan terbuka dengan kesejahteraan dan iklim sehingga akan mempengaruhi peningkatan efisiensi penduduk yang secara tegas akan mempengaruhi laju pembangunan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh *World Health Organization (2003)* yang menyatakan bahwa secara terukur diperkirakan bahwa setiap kenaikan 10% di angka harapan hidup (AHH) saat memasuki dunia akan meningkatkan perkembangan moneter di suatu tempat sekitar 0,3 - 0,4 persen setiap tahun, jika - Faktor perkembangan lainnya tetap ada.

Hasil estimasi uji Panel VECM menunjukkan hubungan jangka Panjang antara Variabel AAH dan pertumbuhan ekonomi dengan melihat nilai dari Probabilitas sebesar $0.00503 < \alpha = 5$ persen yang berarti terdapat hubungan jangka panjang antar variabel AAH dan Pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ecevit (2013) yang menjelaskan

bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara Angka harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi di Negara OECD.

1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah dikaji oleh dua Pandangan. Pertama, Perkembangan ekonomi mempengaruhi seberapa besar pengeluaran pemerintah, semakin maju tingkat perekonomian suatu negara maka ukuran pemerintah juga akan semakin besar, ukuran tersebut dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah, pandangan tersebut dikenal dengan Hukum Wagner. Kemudian pandangan kedua yang dikemukakan oleh Keynes berpendapat sebaliknya, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Tindakan keuangan sebagian besar bergantung pada konsumsi ekonomi habis-habisan pada saat tertentu. Keynes meminta perhatian pada pentingnya pembelanjaan habis-habisan sebagai penggerak fundamental ekonomi. Semua penggunaan adalah penggunaan pada perolehan tenaga kerja dan produk yang diciptakan oleh ekonomi selama jangka waktu tertentu. Penggunaan habis-habisan yang diakui tidak selalu dalam setiap kasus mencapai pekerjaan penuh. Untuk mengatasi hal ini, otoritas publik harus berdampak pada pengeluaran yang besar.

Pengeluaran lengkap terdiri dari empat bagian utama: pengeluaran rencana keuangan, spekulasi area pribadi, pengeluaran pemerintah dan produk bersih. Ada hubungan antara berapa banyak konsumsi total yang diberikan oleh otoritas publik dan hubungannya dengan perkembangan moneter. Selanjutnya, Peraturan Wagner yang disusun oleh Mangkoesobroto, menurut pandangan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad kesembilan belas ratus, menjabarkan hipotesis kemajuan bahwa pengeluaran administrasi menambah peningkatan pada tingkat GNP. Pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Solikin (2018) di beberapa penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki hasil yang beragam. Terdapat penelitian yang membuktikan teori Keynes, hukum Wagner, memiliki hubungan antara kedua-nya (bidirectional) bahkan ada juga yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antara-nya perbedaan negara yang menjadi objek penelitian, Runtun *time series* yang digunakan, perbedaan model empiris dan juga perbedaan teknik analisis yang digunakan. Perbedaan hasil juga di tunjukkan dalam penelitian ini, di mana dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan pengeluaran pemerintah, sedangkan dalam jangka Panjang pengeluaran pemerintah-lah yang memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari hasil uji kausalitas Granger, cenderung terlihat bahwa pembangunan keuangan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan memiliki hubungan sebab akibat satu arah. Perkembangan Keuangan memiliki hubungan sesaat dengan Konsumsi Pemerintah Daerah Kesejahteraan karena kemungkinannya lebih kecil dari tingkat kepentingan 5% dari 0,0046 sehingga dapat dikatakan bahwa Perkembangan Keuangan memiliki hubungan satu arah dengan Penggunaan Pemerintah Daerah Kesehatan. Selain itu, konsumsi area kesejahteraan memiliki hubungan yang berlarut-larut dengan perkembangan moneter karena kemungkinannya di bawah 5% dengan peluang 0,01771. Sangat

1 mungkin dianggap bahwa pengeluaran administrasi di bidang kesejahteraan memiliki hubungan jangka panjang satu arah dengan pembangunan keuangan.

Efek samping dari penelitian ini setara dengan penelitian yang diarahkan oleh Novela & Aimon (2019) yang menemukan bahwa perkembangan keuangan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan satu arah dimana perkembangan moneter mempengaruhi pengeluaran pemerintah sedangkan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi perkembangan moneter. tingkat perkembangan moneter mempengaruhi berapa banyak pengeluaran pemerintah. Kemudian sesuai dengan Solikin (2018), diamati bahwa ada hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan keuangan di 72 negara berkembang. Eksplorasi Suparno (2015) menemukan bahwa pengeluaran administrasi di bidang kesejahteraan mempengaruhi perkembangan moneter dan catatan kemajuan manusia di Wilayah Kalimantan Timur pada tahun 1997-2011. Sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Ramadhani (2014) menyatakan bahwa belanja administrasi mempengaruhi perkembangan moneter di enam negara ASEAN dan selanjutnya didapatkan hasil dimana terdapat hubungan yang berlarut-larut antara faktor perkembangan keuangan dan belanja pemerintah di bidang kesejahteraan. Hasil ini sesuai dengan eksplorasi oleh Mehrara & Musai (2011) di mana ada hubungan yang ditarik antara pengeluaran di bidang kesejahteraan dan pembangunan keuangan di Iran. Hasil ini setara dengan penelitian yang ditemukan oleh Erçelik (2018) yang mengamati bahwa ada hubungan jangka panjang yang kritis antara pengeluaran pemerintah di bidang Kesejahteraan dan perkembangan moneter Turki pada periode 1980-2015.

1 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Kausalitas antara angka harapan hidup, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan satu arah dalam jangka pendek antara angka harapan hidup dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

Kemudian, pada saat itu, pengeluaran otoritas publik di bidang kesejahteraan memiliki hubungan dua arah jangka panjang dengan masa depan di lima negara ASEAN. Sebab, jika pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan meningkat, masa depan juga akan meningkat, yang berarti bahwa peningkatan pengakuan belanja pemerintah di bidang kesejahteraan akan mempengaruhi pertumbuhan di bidang pemerintahan sehingga mempengaruhi masa depan secara konsisten.

Terdapat hubungan satu arah dalam waktu lama dan sekarang antara perkembangan keuangan dan masa depan, dimana masa depan memiliki hubungan sebab akibat dengan perkembangan moneter di lima negara ASEAN dalam jangka panjang dan sesaat yang menunjukkan bahwa setiap ekspansi di masa depan akan mempengaruhi ekspansi di negara-negara ASEAN dan perkembangan moneter.

Pengeluaran kesejahteraan umum memiliki hubungan satu arah dan sementara dengan perkembangan moneter. Dimana dalam perkembangan keuangan sesaat memiliki hubungan kausal dengan pengeluaran pemerintah pada bidang kesejahteraan di lima negara ASEAN, dan itu menyiratkan bahwa

perkembangan moneter akan mempengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan.

Konsumsi di bidang kesejahteraan memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan moneter, yang berarti bahwa pengeluaran administrasi di bidang kesejahteraan akan mempengaruhi sifat kesejahteraan SDM dan akan mempengaruhi tingkat efisiensi yang akan mendorong peningkatan dalam pembangunan keuangan.

5. Daftar Pustaka

- Ben-David, N. (2009). Economic Growth and Its Effect on Public Health. *International Journal of Social Economics*, 36(3), 252-273. <https://doi.org/10.1108/03068290910932747>
- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2018*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2020*. BPS Provinsi Sumatera Selatan
- Ecevit, E. (2013). The Impact of Life Expectancy on Economic Growth: Panel Cointegration and Causality Analyses for OECD Countries. *The International of Journal Science*, 16(1), 1-14.
- Erçelîk, G. (2018). The Relationship between Health Expenditure and Economic Growth in Turkey from 1980 to 2015. *Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM)*, 1(1), 1-8.
- Handayani, N. S., Bendesa, K. ., & Yuliarmi, N. N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama sekolah dan PDRB Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449-3474.
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik*. BPF-UGM, Yogyakarta.
- Maulana, R. (2015). Pengaruh Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 159-165. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i2.14818>
- Mehrara, M., & Musai, M. (2011). Granger Causality Between Health and Economic Growth in Oil Exporting Countries. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 1(8), 103-108.
- Novela, H., & Aimon, H. (2019). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 97-110.
- Ojo Olusoji O., Nwosa Philip I., Alake Olamidev J., & Adebajji Funmilola B. (2020). Health Expenditure and Life Expectancy in Nigeria. *Lead City Journal of the Social Sciences (LCJSS)*, 5(1), 66-71.
- Prananda, D., Idris, & Putri, D. Z. (2018). Dampak Kesehatan Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 578-585.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.5028>
- Shahraki, M. (2019). Public And Private Health Expenditure and Life Expectancy in Iran. *Payesh (Helath Monitor)*, 18(3), 221-230.
- Sihaloho, E. D., & Hardiawan, D. (2019). Pengaruh Belanja Kesehatan dan Angka Kemiskinan Terhadap Angka Harapan Hidup Kabupaten Kota di Jawa Barat. *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 117-128. <https://doi.org/10.35313/eksansi.v11i1.1308>
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha (Jurnal Informasi Keuangan Dan Akuntansi)*, 2(1), 65-89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. *Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 19(1), 1-24.
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1-21. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol5.no1.1-22>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- World Health Organization. (2003). *(WHO) Parliamentarians' Call for Action*. World Health Organization - Regional Office for South-East Asia
- Yefriza. (2015). Managing Public Health Expenditure in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 147-148. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1023414>

BAB III

KETERBUKAAN EKONOMI

(Analisis Kausalitas Antara Keterbukaan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Foreign Direct Investment* di Negara ASEAN)

Oleh:

Shelly Atika Adriyanti; Anna Yulianita; Mardalena

1. Pendahuluan

Kemajuan moneter suatu negara membutuhkan banyak sumber pendanaan. Mata air pendukung bisa muncul dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mata air pendukung yang tumbuh di dalam negeri dapat muncul dari rencana keuangan dan penerbitan perlindungan kewajiban, sementara sumber yang tidak dikenal dapat muncul dari kewajiban yang tidak dikenal dan usaha yang tidak dikenal. Untuk mengatasi masalah perputaran keuangan, salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan mempertimbangkan pendukung keuangan yang tidak dikenal untuk menempatkan sumber daya ke negara yang disebut usaha langsung yang tidak dikenal. Fachrulloh & Kholid (2018) berpendapat bahwa FDI memainkan peran penting bagi perekonomian dunia, dan dapat membuat hubungan keuangan yang cepat, stabil, dan jangka panjang antar negara. Dilihat dari negara asal, FDI merupakan prosedur spekulasi yang berlarut-larut di berbagai negara sebagai upaya bersama.

Pekerjaan modal asing tidak hanya digunakan untuk mengalahkan ketiadaan modal uang atau modal nyata, tetapi juga dapat memberikan keterampilan khusus, spesialis yang mahir, prosedur pembuatan yang dikembangkan lebih lanjut, data pasar, pembaruan produk, serta mirip dengan posisi belajar. untuk spesialis lingkungan. untuk mengembangkan kemampuan baru. Ini sebenarnya ingin membantu mempercepat cara paling umum untuk memperluas peningkatan keuangan suatu negara. Dari klarifikasi sebelumnya, hal ini menunjukkan cara bahwa modal asing dapat membangun tingkat efisiensi, gaji dan pekerjaan umum yang nantinya akan mempengaruhi perluasan upah asli dan pengurangan biaya bagi pembeli, serta memperluas harapan akan kenyamanan sehari-hari (Jingnan, 2012).

Salah satu elemen penentu yang dapat mempengaruhi arus masuk FDI ke suatu negara adalah transparansi keuangan. Transparansi moneter dapat dinilai dari penerimaan nilai tukar dan transparansi moneter. Dalam masa globalisasi yang sedang berlangsung, penerimaan moneter yang lebih luas dari setiap negara semakin tidak dapat dihindari, baik transparansi dalam pertukaran asing (exchange transparency) maupun transparansi di bidang moneter (monetary receptiveness). Dengan penerimaan ekonomi di negara yang menggambarkan lenyapnya hambatan dalam memimpin pertukaran. Hilangnya batas-batas sebagai bea dan non-pungutan, serta portabilitas modal antar negara yang tak terhindarkan, ini membuat daya tarik yang unik sehingga pendukung keuangan yang tidak dikenal pasti dapat memasukkan sumber daya ke dalam suatu negara tanpa tersiksa oleh penghalang saat ini. Mengingat gagasan transparansi

pertukaran dan FDI memiliki hubungan dua arah, semakin tinggi tingkat penerimaan ekonomi pertukaran akan memberi energi pada peluang pendukung keuangan yang tidak dikenal untuk berkontribusi. Usaha juga akan mempengaruhi penerimaan pertukaran, ketika ada peningkatan minat di suatu negara, itu akan meningkatkan faktor penciptaan yang akan mempengaruhi perluasan hasil produksi suatu negara, ketika penciptaan meningkat, latihan pengiriman akan membangun dan akan membangun Produk domestik bruto dan tingkat dari transparansi pertukaran. di negara itu. Sementara itu, transparansi moneter yang menunjukkan kelancaran arus keluar masuk modal yang terjadi di negara yang mendekati modal karena FDI akan membuka posisi terbuka yang lebih luas, meningkatkan gaji individu yang juga akan meningkatkan minat pasar. Dengan asumsi bahwa usaha jatuh, itu akan mempengaruhi latihan penciptaan yang juga akan berkurang, yang akan mempengaruhi hasil yang berkurang. Jika hasil masyarakat berkurang, maka secara umum tingkat perkembangan moneter juga akan berkurang baik sejauh tingkat perkembangan itu sendiri maupun sifat dari perkembangan keuangan dan akan mempengaruhi kelangsungan usaha karena hancurnya keadaan moneter suatu negara.

Hal lain yang dapat mempengaruhi arus masuk spekulasi langsung yang tidak dikenal adalah perkembangan keuangan. Dalam hipotesis kemajuan moneter, disadari bahwa ada hubungan komplementer yang positif antara tingkat perkembangan keuangan dan spekulasi. Semakin tinggi perkembangan moneter suatu negara, dan itu berarti semakin diperhatikan porsi gaji yang dapat ditabung, sehingga semakin menonjol usaha yang akan dilakukan. Untuk situasi ini, usaha adalah komponen dari pengembangan keuangan. Lagi pula, semakin menonjol spekulasi suatu negara, semakin menonjol tingkat perkembangan keuangan yang dapat dicapai. Akibatnya, pembangunan merupakan unsur spekulasi. Usaha memainkan peran penting dalam hal perbaikan publik dan lokal untuk mendorong pembangunan moneter (Jonathan, 2003).

Setiap negara memiliki perkembangan alternatif dari usaha langsung yang tidak dikenal, bergantung pada apakah negara tersebut disebut sebagai negara berkembang atau negara berkembang. Dalam melakukan strategi moneter, negara-negara agraris umumnya membutuhkan modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.

Dalam hubungan antar negara di seluruh dunia, ada dua aliran dalam kerangka keuangan, yaitu kerangka moneter terbuka dan kerangka keuangan tertutup. Negara yang berpegang pada kerangka moneter terbuka adalah negara yang mengelola pertukaran di seluruh dunia dengan negara yang berbeda, sedangkan kerangka keuangan tertutup adalah ekonomi tanpa pertukaran dengan negara yang berbeda.

Afiliasi South East Asia Country (ASEAN) adalah jenis penggabungan seluruh dunia dalam ekonomi terbuka, Hubungan Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN adalah hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kawasan perdagangan yang efisien.

Kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan yang menunjukkan perluasan kawasan modern yang dapat menarik pertimbangan negara-negara jauh untuk memimpin bursa dunia atau menempatkan modal asing di kawasan ASEAN. Seperti yang ditunjukkan oleh Andini (2018), globalisasi dalam perekonomian merupakan salah satu sudut pandang yang menciptakan daya

terima keuangan setiap negara dapat mempengaruhi perluasan latihan pertukaran di seluruh dunia, aliran aset global dan spekulasi langsung/FDI yang tidak dikenal. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam melengkapi penerimaannya dengan menjadikan FDI sebagai salah satu variabel pendukung yang dapat membantu dalam menggarap perputaran keuangan negaranya.

Negara-negara di ASEAN memiliki kapasitas yang menarik untuk menyambut pendukung keuangan asing untuk menyumbangkan modal mereka, misalnya, skala ekonomi, ukuran populasi, area vital, tenaga kerja yang melimpah, kekayaan aset normal, potensi pasar, dan pendekatan moneter terbuka. Dengan penerapan strategi-strategi ini, ASEAN telah menjadi koneksi yang signifikan dalam rantai penciptaan dunia dan telah membuat komitmen besar untuk pengembangan moneter di kawasan ASEAN dan telah menjadi tujuan yang menarik bagi para pendukung keuangan. ASEAN adalah salah satu negara di dunia yang telah mencatat perkembangan keuangan yang sangat tinggi. Ini tidak bisa dibedakan dari kemajuan besar usaha asing ke negara-negara ASEAN.

Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina merupakan empat dari lima negara pembentuk ASEAN dengan status negara non-industri di kawasan ASEAN (*Association South East Asia Nation*). Indonesia dikenang dengan sistem pembayaran pusat yang lebih rendah, di mana negara-negara yang diingat akan aturan ini akan terus berusaha untuk membangun tingkat penerimaan moneter. Negara-negara ini tentu tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan bisnis langsung asing dan pertukaran dunia untuk membantu mendukung perekonomian negara. Bagi negara berkembang, FDI merupakan salah satu sumber aset yang digunakan untuk mendukung perbaikan dan pengembangan moneter. FDI merupakan pilihan sebagai pengganti pemanfaatan obligasi asing dalam siklus perbaikan yang diselesaikan di suatu negara.

Mengingat gambaran yang telah dimaklumi sebelumnya, bahwa dari penerimaan moneter dilihat dari transparansi nilai tukar dan penerimaan moneter serta perkembangan moneter (produk domestik bruto) memainkan peran yang layak sebagai pendorong dalam perkembangan FDI, oleh karena itu Penelitian ini akan membedah hubungan sebab akibat antara tingkat transparansi moneter suatu negara melalui transparansi pertukaran dan transparansi moneter suatu negara, serta perkembangan keuangan terhadap perkembangan asing minat langsung di empat negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Penetapan daerah ujian tersebut dengan alasan Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina merupakan tempat dari lima negara pembentuk ASEAN dengan keadaan dengan negara-negara agraris di kawasan ASEAN (*Association South East Asia Nation*), dengan pengelompokan dari Bank Dunia bahwa Malaysia dan Thailand dan Indonesia dikenang untuk urutan tingkat gaji pusat atas, sedangkan Filipina dikenang untuk karakterisasi tingkat gaji pusat bawah. Dimana negara-negara yang dikenang sebagai pusat pengelompokan akan terus berupaya membangun tingkat penerimaan finansial. Negara-negara ini tentu tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan spekulasi langsung yang tidak dikenal dan pertukaran dunia untuk membantu mendukung perekonomian negara.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. *Foreign Direct Investment*

Investasi adalah jenis penggunaan yang dilakukan dalam membeli barang modal dan perangkat keras yang menjunjung tinggi penciptaan, dimana arahnya adalah untuk menggantikan dan menambah produk modal yang akan digunakan untuk pengiriman tenaga kerja dan produk di kemudian hari. Spekulasi adalah awal dari latihan kemajuan keuangan (Sukirno, 2004). Beberapa hipotesis spekulasi adalah spekulasi yang dikemukakan oleh Rugman pada tahun 1981. Hipotesis ini masuk akal dari dampak faktor alam dengan faktor asimilasi dalam menyelesaikan spekulasi asing atau latihan FDI. Dalam teori ini ada tiga macam faktor alam yang menjadi fokus signifikan, yaitu finansial, nonmoneter dan pemerintah. Variabel keuangan yang dimaksud adalah karya cipta umum, yang dicirikan oleh faktor-faktor di arena publik, menjadi pekerjaan (pekerjaan), modal (modal) tertentu dan dalam faktor inovasi model lanjutan, aksesibilitas aset reguler dan kemampuan eksekutif juga. termasuk. Sedangkan faktor non finansial yang dimaksud adalah faktor politik, sosial, dan sosial di setiap negara yang jelas-jelas unik

Teori berikut diajukan oleh John Dunning pada tahun 1993. Hipotesis ini masuk akal dari tiga kebutuhan yang diharapkan oleh organisasi dengan asumsi akan berpartisipasi dalam usaha/spekulasi yang tidak dikenal, secara spesifik:

a. *Ownership Advantage*

John Dunning menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mendorong perusahaannya untuk terlibat dalam produksi di luar negara asal.

b. *Location Advantage*

Berdasarkan teori pendekatan elektif, persyaran *Location advantage* atau keunggulan spesifik yang dimiliki oleh suatu perusahaan di luar negaranya untuk masuk ke negara tujuan (*Host Country*), seperti *resources endowment*, potensi pasar yang besar dan baik, tersedianya infrastruktur dan kemasyarakatan, stabilitas ekonomi makro, biaya komunikasi, kondisi pasar tenaga kerja, transportasi internasional, tingkat upah yang bersaing, dan juga fasilitas investasi yang diberikan oleh pemerintah kepada investor asing.

c. *Internalization Advantage*

Keunggulan internal menjelaskan tentang keunggulan yang dimiliki perusahaan apabila memilih atau membuka fasilitas produksi daripada alternatif lainnya seperti kegiatan mengekspor atau melakukan *Joint-venture*.

2.2. Keterbukaan Ekonomi

Penerimaan terhadap ekonomi dunia atau lebih sering disebut sebagai transparansi keuangan adalah salah satu dari tiga pemikiran utama Perjanjian Washington, di mana penerimaan moneter dilakukan melalui perkembangan pertukaran dan usaha langsung yang tidak dikenal. Transparansi keuangan menggambarkan tingkat hambatan dalam mengelola pertukaran di seluruh dunia, baik hambatan pungutan dan non-pajak dan portabilitas atau pengembangan

modal yang lebih lancar antar negara. Mengingat hipotesis transparansi moneter membantu semua negara termasuk. Transparansi disurvei dari dua bagian, khususnya penerimaan pertukaran dan transparansi moneter.

Keterbukaan perdagangan atau *trade openness* berasal dari kata *trade* yaitu perdagangan dan *openness* yaitu keterbukaan yaitu melakukan segala sesuatu dengan keterbukaan tanpa ada yang membatasi. Dalam *World Bank*, *trade openness* yang dinyatakan dengan *trade (% of GDP)* yang merupakan jumlah ekspor dan impor barang dan jasa yang diukur melalui sebagai bagian dari *gross domestic product* atau produk domestik bruto. Dikutip dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia, formula dalam menentukan keterbukaan perdagangan adalah:

$$\text{Keterbukaan Perdagangan} = \frac{\text{Total Ekspor} + \text{Total Impor}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Negara-negara yang melengkapi perkembangan pertukaran adalah bangsa-bangsa yang menganut sistem ekonomi terbuka, di mana penghuni bangsa tersebut bertukar dengan penduduk dari berbagai bangsa, baik dalam lingkup keluarga, organisasi, maupun negara. Adam Smith memahami pentingnya penerimaan pertukaran, di mana pertukaran tanpa batas dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang memberikan kelebihan ciptaan suatu negara. Batasan moneter masuk akal sebagai tingkat atau proporsi arus masuk bersih dari spekulasi langsung yang tidak dikenal yang ditambahkan ke usaha portofolio bersih dari total output nasional.

$$\text{Keterbukaan Finansial} = \frac{\text{net inflow FDI} + \text{net portofolio}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Pada penelitian Simorangkir (2008) yang berjudul "*Trade Openness and Its Impact to Indonesia Economy: A Structural VAR Approach*", yang menganalisis keterbukaan finansial yang diukur dari total investasi asing langsung dan arus masuk investasi portofolio yang dibagi Produk Domestik Bruto.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith dalam bukunya *The Wealth Of Nation* (1776) buatlah jika ekonomi akan berkembang dan berkreasi dengan asumsi ada penambahan penduduk yang akan menumbuhkan pasar dan mendukung spesialisasi. Alih-alih Adam Smith, seperti yang ditunjukkan oleh David Ricardo, jika pembangunan penduduk terlalu besar, angkatan kerja akan berlimpah, dan upah akan menurun, sehingga perekonomian menjadi basi, hal ini juga dianut oleh Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga individu akan hidup adil.

Teori Harrod-Domar tentang perkembangan adalah tambahan dari investigasi Keynes tentang pergerakan moneter publik dan isu-isu pekerjaan. Penyelidikan Keynes dinilai kurang memadai karena tidak mengkaji masalah moneter jangka panjang. Hipotesis Harrod-Domar ini menguraikan keadaan yang diperlukan bagi perekonomian untuk berkembang dan tercipta dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menghemat jumlah tertentu dari pembayaran publiknya jika dengan keberuntungan untuk

menggantikan barang modal yang rusak (struktur, peralatan, bahan). Bagaimanapun, untuk mengembangkan ekonomi, diperlukan usaha-usaha baru sebagai modal tambahan. Dengan asumsi kita mengharapkan bahwa ada hubungan moneter langsung antara ukuran persediaan modal (K) dan semua hasil (Y), maka, pada titik itu, setiap ekspansi bersih ke persediaan modal spekulasi akan menghasilkan ekspansi dalam hasil yang lengkap. sesuai dengan proporsi hasil modal. Pada dasarnya, untuk berkembang dengan cepat, setiap perekonomian harus menabung dan menyumbang sebanyak yang dapat diharapkan dari produk domestik brutonya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian disumbangkan, semakin cepat laju perkembangan moneter (Todaro & Smith, 2006).

Model pengembangan neoklasik Solow (*Solow neoclassical development model*) merupakan titik dukungan yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap hipotesis perkembangan neoklasik sehingga pelopornya, Robert Solow, dianugerahi Hadiah Nobel dalam aspek finansial. Pada dasarnya, model ini merupakan penyempurnaan dari detail Harrod-Domar dengan menambahkan elemen berikutnya, khususnya karya, dan menghadirkan variabel otonom ketiga, yaitu inovasi spesifik, ke dalam kondisi pembangunan.

3. Hasil Kajian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kausalitas Granger untuk melihat pengaruh hubungan antara keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap *foreign direct investment*. Periode penelitian ini yaitu 20 tahun dari tahun 2000-2019 dilakukan di empat negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Variabel penelitian yaitu keterbukaan ekonomi yang dinilai dari keterbukaan perdagangan dalam satuan persen dan keterbukaan finansial dalam satuan persen, serta pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. Kemudian, variabel *foreign direct investment* sebagai variabel dependen dalam satuan miliar Dolar AS.

3.1. Hubungan Kausalitas *Foreign Direct Investment* dan Keterbukaan Perdagangan/*Trade Openness*

Tabel 3.1 Hasil Uji Kausalitas Granger antara FDI dan *Trade Openness*

Negara	FDI terhadap TO	TO terhadap FDI	Keterangan
Indonesia	0.4697	0.0013	TO menyebabkan FDI
Malaysia	0.4500	0.0002	TO menyebabkan FDI
Thailand	0.5234	0.0035	TO menyebabkan FDI
Filipina	0.0890	0.0083	TO menyebabkan FDI

Keterangan: FDI (*Foreign Direct Investment*), TO (*Trade Openness*)

Sumber: *World Bank* (diolah), 2000-2019.

Hasil *granger causality test* menunjukkan bahwa terdapat kausalitas satu arah atau *unidirectional causality from X to Y*, dari keterbukaan perdagangan (*Trade Openness*) ke *foreign direct investment* pada negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina yang dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing negara pada hubungan Keterbukaan perdagangan terhadap FDI lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika keterbukaan perdagangan di suatu

1 negara meningkat maka *foreign direct investment* negara tersebut akan meningkat. Namun, tidak berlaku sebaliknya. Sangat mungkin beralasan bahwa transparansi pert¹aran membuat perbedaan dan menyebabkan usaha asing langsung (FDI) di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Konsekuensi dari 1 penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi nilai tukar berpengaruh terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan yang terjadi dalam penerimaan devisa akan semakin mempengaruhi FDI, karena transparansi devisa menunjukkan penerimaan keuangan suatu negara, semakin penting transparansi pertukaran menunjukkan adanya tindakan moneter yang besar dalam suatu negara, dan pengurangan semua jenis batasan Hambatan pertukaran, baik pajak maupun non-pajak, merupakan daya tarik utama bagi para pendukung keuangan yang tidak dikenal untuk menyumbangkan modal mereka, yang selanjutnya memperluas arus masuk FDI.

Konsekuensi dari tinjauan tersebut sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Fachrulloh & Kholid (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi pertukaran mempengaruhi FDI. Kemudian, eksplorasi Hoang (2012) juga menunjukkan hasil yang serupa, lebih spesifik bahwa variabel transparansi ekonomi sangat mempengaruhi aliran FDI. Selain itu, penelitian yang diarahkan oleh Bakar et al. (2012) menunjukkan bahwa variabel transparansi nilai tukar mempengaruhi arus masuk FDI ke Malaysia, dengan demikian variabel penerimaan nilai tukar sebenarnya berperan penting dalam menentukan arus masuk FDI ke Malaysia.

3.2. Hubungan Kausalitas *Foreign Direct Investment* dan Keterbukaan Finansial/*Financial Openness*

Tabel 3.2 Hasil Uji Kausalitas Granger antara FDI dan *Financial Openness*

Negara	FDI terhadap FO	FO terhadap FDI	Keterangan
Indonesia	0.1071	0.0248	FO menyebabkan FDI
Malaysia	0.5999	0.0449	FO menyebabkan FDI
Thailand	0.2840	0.0004	FO menyebabkan FDI
Filipina	0.7125	0.0122	FO menyebabkan FDI

Keterangan: FDI (*Foreign Direct Investment*), FO (*Financial Openness*)

Sumber: *World Bank* (diolah), 2000-2019.

1 *foreign direct investment* dan keterbukaan finansial (*financial openness*) menunjukkan terdapat kausalitas satu arah (*unidirectional causality from X to Y*) dari keterbukaan finansial ke *foreign direct investment* pada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas hubungan FDI terhadap FO lebih kecil dari 0.05, artinya *foreign direct investment* tidak menyebabkan keterbukaan finansial. Sebaliknya, keterbukaan finansial menyebabkan pengaruh terhadap FDI. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi FDI tidak menyebabkan keterbukaan finansial di negara tersebut, dikarenakan terdapat faktor yang menyebabkan keterbukaan finansial.

Faktor transparansi moneter dan FDI memiliki hubungan kausal satu arah, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan moneter menyebabkan FDI namun tidak masalah dalam hal apapun. Menurut Simorangkir (2008) aliran modal masuk dalam FDI akan berdampak pada perekonomian karena akan mempercepat

penambahan modal dan mempercepat pembangunan. Ini berarti bahwa ada lebih sedikit hambatan dalam perdagangan aliran modal, khususnya penerimaan moneter, yang dapat membuat pendukung keuangan tertarik pada pengelolaan uang yang efektif sehingga lebih banyak spekulasi asing mengalir ke suatu negara.

3.3. Hubungan Kausalitas *Foreign Direct Investment* dan pertumbuhan ekonomi

Tabel 3.3 Hasil Uji Kausalitas Granger antara FDI dan Pertumbuhan Ekonomi

Negara	FDI terhadap EG	EG terhadap FDI	Keterangan
Indonesia	0.0060	0.9260	FDI menyebabkan EG
Malaysia	0.8204	0.0245	EG menyebabkan FDI
Thailand	0.0033	0.7934	FDI menyebabkan EG
Filipina	0.0120	0.1048	FDI menyebabkan EG

Keterangan: FDI (*Foreign Direct Investment*), EG (*Economic Growth*)

Sumber: *World Bank* (diolah), 2000-2019.

Variabel *foreign direct investment* dan pertumbuhan ekonomi pada negara Indonesia, Thailand, dan Filipina menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah (*unidirectional causality from Y to X*) dari *foreign direct investment* ke pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas hubungan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari 0.05. yang berarti ketika tingkat *foreign direct investment* meningkat maka akan mempengaruhi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa FDI berperan sebagai pemasok modal dan membantu mendukung usaha dalam negeri, dengan FDI sangat mempengaruhi perekonomian karena perubahan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk negara penerima FDI, dan juga akan bekerja pada pameran sumber daya manusia yang akan mempengaruhi perluasan efisiensi publik. .

Meskipun demikian, di Malaysia faktor-faktor usaha langsung yang tidak dikenal dan pengembangan keuangan memiliki hubungan kausalitas satu arah, kausalitas searah dari X ke Y dari perkembangan moneter hingga spekulasi langsung yang tidak dikenal, sebagaimana ditegaskan oleh nilai kemungkinan hubungan antara pengembangan keuangan dan FDI di Tabel 3.3 lebih sederhana dari 0,05, yang berarti spekulasi langsung yang tidak dikenal tidak mendorong perkembangan keuangan. Kemudian lagi, perkembangan keuangan menyebabkan dan mempengaruhi minat langsung yang asing di Malaysia. Hubungan kausal satu arah antara perkembangan keuangan dan FDI ini tidak sesuai dengan hipotesis perkembangan moneter gaya Neo Lama dan Harrod Domar yang berpendapat bahwa usaha dipandang sebagai salah satu pendorong perkembangan moneter dan spekulasi juga berperan sebagai elemen yang dapat mendorong peningkatan konsumsi total dalam menciptakan pembangunan moneter.

Perkembangan moneter yang tinggi dan stabil yang merupakan indikasi bahwa perekonomian berjalan dengan baik seharusnya memiliki opsi untuk memberikan keuntungan dari usaha yang telah disumbangkan oleh para pendukung keuangan yang tidak dikenal. Karena pada dasarnya para penyandang dana akan tertarik pada pengelolaan uang yang efektif jika suatu ekonomi dapat berkembang secara konsisten, semua dalam semua kondisi perkembangan

moneter di masa lalu adalah pemikiran bagi para penyandang dana yang akan menempatkan sumber daya ke dalam apa yang ada di toko. Muana (2001) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat Unfamiliar Direct Speulation, beberapa di antaranya adalah tingkat perekonomian dan alat pengukur atau asumsi untuk keadaan keuangan masa depan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak (2011) bahwa pilihan pendukung keuangan asing dalam memutuskan untuk menempatkan sumber daya ke negara tujuan ventura dipengaruhi oleh keadaan negara tujuan spekulasi atau disebut faktor penarik dan keadaan dan prosedur negara pendukung keuangan asing atau disebut juga faktor pendorong. Demikian pula, hasil serupa juga ditunjukkan oleh Anwar et al. (2016) menyatakan bahwa perkembangan keuangan mempengaruhi FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam.

Kemudian, pada saat itu, penelitian yang diarahkan oleh Manullang & Hidayat (2014) menggunakan penilaian model VECM menunjukkan bahwa FDI yang ditarik keluar berdampak buruk terhadap perkembangan keuangan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Korespondensi dua arah tidak terjadi di semua negara yang diperiksa. Bagaimanapun, ada hubungan satu arah antara perkembangan moneter dan FDI di Indonesia, dan tidak ada hubungan kausal antara FDI dan perkembangan keuangan di Malaysia dan Thailand.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian terhadap data-data *foreign direct investment*, keterbukaan perdagangan (*trade openness*), keterbukaan finansial (*financial openness*) dan pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2019 di empat negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina) dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- a. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa, Indonesia adalah negara dengan penerima FDI terbesar, disusul oleh Thailand, Malaysia dan Filipina dengan FDI paling sedikit. Sementara itu, Malaysia merupakan negara dengan proporsi penerimaan pertukaran yang paling besar, disusul oleh Thailand, Filipina, dan Indonesia sebagai negara dengan proporsi transparansi pertukaran terkecil dibandingkan dengan negara lain. Thailand merupakan negara dengan proporsi pengungkapan moneter terbesar, disusul oleh Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan proporsi pengungkapan moneter terkecil. Filipina memiliki perkembangan keuangan tipikal yang paling menonjol, disusul oleh Malaysia, Indonesia dan Thailand dengan perkembangan keuangan tipikal terkecil.
- b. Efek samping dari pengujian usaha langsung yang tidak dikenal dan faktor penerimaan pertukaran menunjukkan bahwa ada kausalitas searah satu arah dari X ke Y, dari penerimaan pertukaran hingga spekulasi langsung yang tidak dikenal di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Efek samping dari pengujian faktor-faktor spekulasi langsung yang tidak dikenal dan Transparansi Moneter menunjukkan kausalitas searah dari X ke Y dari penerimaan moneter terhadap FDI di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Konsekuensi dari uji coba faktor usaha langsung

dan pengembangan keuangan yang tidak dikenal memiliki kausalitas satu arah (kausalitas searah dari Y ke X) dari spekulasi langsung yang tidak dikenal ke perkembangan moneter di Indonesia, Thailand, dan Filipina.

5. Daftar Isi

- Andini, A. P. (2018). *Analisis Pengaruh Corruption Perception Index (CPI), Gross Domestic Product (GDP), dan Exchange Rate Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) pada Tahun 2010-2016 di Negara-Negara ASEAN*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anwar, C. J., Kuswanto, & Dewi, S. F. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Foreign Direct Investment (FDI) Di Kawasan Asia Tenggara. *Media Trend*, 11(2), 175-194. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v11i2.1621>
- Bakar, N. A., Mat, S. H. C., & Harun, M. (2012). The Impact of Infrastructure on Foreign Direct Investment: The Case of Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 205-211. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.112>
- Fachrulloh, N. E., & Kholid, M. M. (2018). Analisis Determinan Foreign Direct Investment di Negara Emerging Market Asia Periode 2011-2015. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2).
- Hoang, H. H. (2012). Foreign Direct Investment in Southeast Asia: Determinants and Spatial Distribution. In *Depocen: Vol. Working Pa.*
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press.
- Jonathan, S. H. (2003). Analisis Vector Auto Regresi (VAR) Terhadap Korelasi Antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia. *Journal Keuangan Dan Moneter*, 6(2).
- Manullang, H. A., & Hidayat, P. (2014). Analisis kausalitas antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(9), 547-561.
- Muana, N. (2001). *Makro ekonomi: teori masalah dan kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, I. (2008). The Openness and Its Impact to Indonesian Economy: A Structural Var Approach. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 10(3). <https://doi.org/10.21098/bemp.v10i3.227>
- Sitinjak, R. M. (2011). *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2004). *Teori Pengantar Makroekonomi* (3rd ed.). Rajawali Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

BAB IV

INFLASI

1 (Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar dan *Output Gap* Terhadap Inflasi di Lima Negara ASEAN)

Oleh:

Devy Mayang Sari; Imam Asngari; Ariodillah Hidayat

1. Pendahuluan

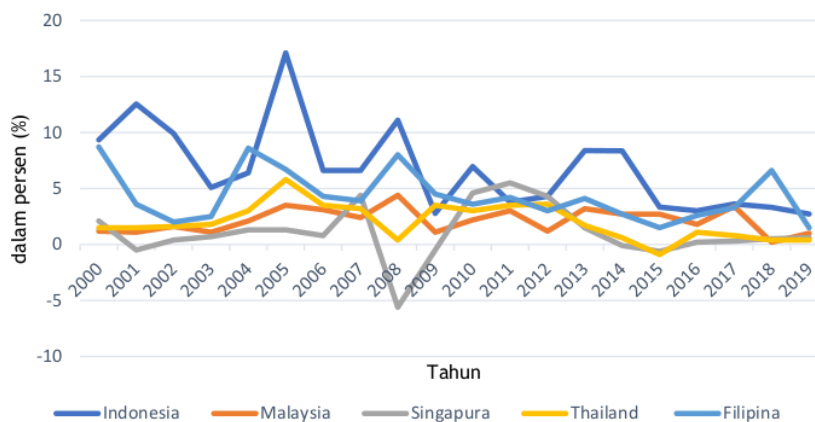
Kekuatan ekonomi suatu negara adalah tolok ukur untuk perputaran keuangan yang dapat dipertahankan. Sejalan dengan itu, masalah stabilitas keuangan juga menjadi masalah yang patut dicontoh, khususnya bagi negara-negara agraris. Hampir setiap negara, baik negara maju maupun non-industri, berurusan dengan masalah ketergantungan dan masalah perkembangan moneter. Salah satu isu yang mendapat perhatian luar biasa di setiap negara adalah pemekaran. Peningkatannya yang selalu berkembang memberikan hambatan bagi pengembangan keuangan menuju pos yang unggul (Sukimo, 2013). Inflasi pada umumnya akan terjadi di negara-negara non-industri maupun negara-negara di ASEAN. Kekecewaan atau kejutan yang tumbuh di dalam negeri akan menyebabkan kebimbangan biaya di pasar dalam negeri dan berakhir dengan ekspansi ekonomi.

Negara-negara ASEAN pada umumnya adalah negara-negara berkembang yang didelegasikan yang belum siap untuk menghadapi fenomena ekonomi. Salah satunya adalah keganjilan Inflasi pada tahun 1997 atau disebut Asian Monetary Emergency yang disebabkan oleh jenis cascading pengaruh devaluasi uang Thailand (Shower) sehingga Indonesia, Singapura, Malaysia dan Filipina juga merasakan dampaknya, untuk spesifik lonjakan biaya barang dagangan yang diimpor dari luar negeri dan penurunan pembangunan. ekonomi. Seperti yang ditunjukkan oleh Bank Dunia, pada tahun 1998 Indonesia mengalami peningkatan ekspansi paling tinggi sebesar 58,4 persen, sementara Thailand sebagai alasan darurat hanya 7,99 persen, disusul Malaysia 5,27 persen, Singapura - 0,26 persen dan Filipina 9,23 persen. Selain itu, pada tahun 1999, laju inflasi dikendalikan sesuai dengan keadaan keuangan di Lima Negara ASEAN.

Hal ini penting untuk menjaga agar inflasi tetap rendah dan stabil di suatu negara agar tidak menimbulkan infeksi makroekonomi yang nantinya akan berdampak pada lemahnya perekonomian. Inflasi yang tinggi dan goyah adalah kesan kecenderungan kenaikan biaya tenaga kerja dan produk secara keseluruhan dan terus-menerus sepanjang jangka waktu tertentu. Perluasan tingkat nilai ini akan berdampak buruk pada kondisi keuangan daerah setempat. Efek pesimistis utama dari ekspansi adalah bahwa ekspansi terkait erat dengan daya beli individu. Sementara itu, daya beli individu sangat bergantung pada upah asli. Ekspansi yang tinggi akan membuat gaji asli individu terus menurun sehingga ekspektasi individu akan kenyamanan sehari-hari juga turun. Kedua, ekspansi yang pada umumnya akan goyah akan membuat kerawanan para pelaku keuangan dalam mengambil keputusan. Ketiga, tingkat pertumbuhan dalam

negeri yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan di negara-negara tetangga membuat biaya pinjaman asli dalam negeri tidak kompetitif sehingga dapat menurunkan nilai rupiah. Kemudian, pada saat itu, dengan asumsi tingkat ekspansi yang rendah dan stabil akan menjadi pemicu perkembangan keuangan (Suseno & Astiyah, 2010).

Salah satu cara untuk memperkirakan ekspansi adalah dengan melihat daftar biaya pembeli. Catatan ini adalah instrumen estimasi yang paling dikenal luas di negara-negara yang benar-benar berkembang seperti AS. File Biaya Pembelanja adalah penunjuk yang memahami mata air yang berbeda dari kenaikan biaya beberapa jenis tenaga kerja dan produk yang dikonsumsi oleh populasi umum pada waktu tertentu (Suseno & Astiyah, 2010). Perluasan dalam File Nilai Pembeli menunjukkan peristiwa ekspansi di suatu negara.



Gambar 4.1 Perkembangan Inflasi pada tahun 2000-2019

Sumber: ASEAN Secretariat, 2019 dan Bank Indonesia

Berdasarkan Gambar 4.1 Dapat dilihat dengan jelas bahwa perkembangan laju pemuaihan dari tahun ke tahun terus berfluktuasi karena mengalami peningkatan yang meragukan dan kadang-kadang berkurang, setelah terjadi penyempitan besar pada tahun 1998. Berdasarkan gambar tersebut di atas, pada tahun 2005 Indonesia mengalami laju ekspansi yang tinggi sebesar 17,1 persen karena adanya ekspansi biaya minyak dunia. Selanjutnya, Malaysia mengalami ekspansi sebesar 3,5 persen, disusul oleh laju ekspansi Singapura sebesar 1,3 persen, setelah itu ekspansi di Thailand dan Filipina masing-masing sebesar 5,8 persen dan 6,7 persen. Kemudian pada tahun 2008 terjadi darurat moneter di seluruh dunia yang difokuskan di AS. Keadaan darurat ini secara luas mempengaruhi perekonomian dunia, terutama bagi negara-negara yang memiliki hubungan keuangan yang sangat dekat dengan AS. Demikian pula, lima negara ASEAN juga merasakan dampaknya, meskipun tidak sebesar keadaan darurat yang terkait dengan uang pada tahun 1998. Kemacetan keuangan dunia yang berkembang dan jatuhnya harga barang-barang di seluruh dunia mendorong

turunnya pengembangan komoditas-komoditas yang digunakan untuk keperluan keluarga, spekulasi dan impor di lima negara ASEAN.

Peningkatan ekspansi temperamental dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, salah satunya adalah variabel biaya pinjaman. Seperti yang ditunjukkan oleh Widiyanto (2017), biaya pembiayaan merupakan salah satu cara kekuatan terkait uang untuk mengontrol persediaan uang tunai yang nantinya akan menjaga keseimbangan tingkat biaya. Tinggi rendahnya biaya pinjaman akan sangat mempengaruhi perekonomian. Biaya pinjaman yang terlalu tinggi akan mendorong pendukung keuangan untuk menyisihkan uang mereka di bank daripada menempatkan sumber daya ke area modern atau penciptaan, dan pertarungan ekspansi yang lebih serius dapat dikendalikan lagi melalui pengaturan biaya pinjaman, serta sebaliknya. Berdasarkan penelitian Maruto (2012) dan Yuliandari & Hariyanti (2016) menyatakan bahwa biaya pembiayaan mempengaruhi inflasi.

Variabel berikut yang mempengaruhi ekspansi adalah skala konversi. Skala swapping merupakan variabel skala penuh yang signifikan dalam perekonomian karena standar konversi digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Ketidakstabilan standar konversi akan mempengaruhi usaha dan pertukaran di seluruh dunia (Mishkin, 2017). Sesuai penelitian Langi et al. (2014) devaluasi nilai uang suatu negara terhadap bentuk moneter negara lain akan meningkatkan biaya membawa barang dagangan, baik bahan alami atau produk setengah jadi yang digunakan untuk siklus produksi. Karena ekspansi biaya impor, itu akan memberdayakan ekspansi biaya homegrown, menyebabkan ekspansi. Mengingat pemeriksaan Islam et al. (2017) dan Larasati & Amri (2017), menyatakan bahwa varians skala swapping mempengaruhi laju inflasi.

Begitu pula variabel lain yang dapat menyebabkan inflasi adalah adanya jurang pemisah antara kelimpahan total bunga yang tidak disesuaikan dengan jumlah stok dalam suatu perekonomian. Lubang ini dikenal sebagai lubang hasil. Lubang hasil dicirikan sebagai perbedaan tingkat antara hasil asli dan hasil yang diharapkan (Mishkin, 2017). Sebagaimana ditunjukkan oleh (Mishkin, 2017) contoh hubungan antara lubang hasil dan pemuaiian untuk mempengaruhi perkembangan hasil yang sebenarnya. Hal ini karena lubang hasil menunjukkan tingkat kenyamanan dan kelambanan pasar organik total. Pointer ini digunakan untuk mengevaluasi ketegangan pada perubahan biaya. Sesuai penelitian yang dipimpin oleh Solihin (2011) dan Janah & Pujiati (2018), dinyatakan bahwa output gap berhubungan positif terhadap inflasi.

Menurut Suseno & Astiyah (2010), ekspansi yang tinggi dan goyah sangat penting untuk diperhatikan mengingat pengaruhnya terhadap perekonomian yang dapat membuat kerentanan para financial entertainer dalam menempuh pilihan-pilihan yang pada akhirnya akan mengganggu perekonomian suatu negara. Masalah pemekaran tentu bukan masalah yang ringan dan mencakup banyak sudut pandang, penting untuk menjaga agar pemekaran yang berat tidak terjadi. Strategi keuangan memainkan peran penting dalam mengendalikan ekspansi, jadi mengenali faktor-faktor terkait uang yang mempengaruhi inflasi adalah fundamental. Variabel yang mempengaruhi ekspansi dari sisi bunga adalah biaya pembiayaan, sedangkan komponen sisi stok dipengaruhi oleh skala konversi. Terlebih lagi, hole hasil menjadi variabel yang signifikan dalam menjawab inflasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum (kebutuhan pokok) mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Jika inflasi terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan buruknya kondisi ekonomi secara menyeluruh (Irham, 2019). Adapun rumus untuk mengukur laju inflasi sebagai berikut:

$$\text{Laju Inflasi} : \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t : Indeks Harga Konsumen Tahun X

IHK_{t-1} : Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya

2.1.1. Teori Kuantitas

Nilai uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Jumlah uang beredar ditentukan oleh bank sentral, sementara jumlah uang yang diminta (*money demand*) ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Tingkat harga ditentukan dan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa mendatang disebut teori kuantitas uang (Suseno & Astiyah, 2010). Menurut teori ini jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Teori ini menerangkan bahwa inflasi timbul hanya disebabkan oleh penambahan jumlah uang beredar di masyarakat dan anggapan masyarakat bahwa harga akan naik (Mishkin, 2017).

2.1.2. Teori Keynes

Hipotesis ini masuk akal karena bukan persediaan uang tunai yang menentukan tingkat biaya. Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi tingkat biaya, misalnya pengeluaran spekulasi, pengeluaran pemerintah dan pengeluaran. Inflasi terjadi karena individu harus hidup melewati batasan-batasan moneter yang merupakan perspektif dari hipotesis ini. Akibatnya, interaksi ekspansi ini dalam keadaan di mana minat individu untuk barang dagangan umumnya melebihi berapa banyak produk yang tersedia atau disebut sebagai *inflationary gap* (Utari et al., 2015).

Inflationary gap terjadi karena daerah itu menemukan cara untuk mendapatkan aset untuk mengubah rencana pembelian mereka menjadi bunga yang layak. Jika animo yang kuat dari semua lapisan masyarakat melebihi hasil yang dapat diperoleh, biaya akan meningkat (Suseno & Astiyah, 2010). Inflasi akan berhenti ketika orang tidak pernah lagi memiliki aset untuk mendanai rencana pembelian mereka dengan harga yang dominan, sehingga bunga yang

berhasil keluar tidak melebihi berapa banyak hasil yang tersedia (lubang inflasi menghilang).

2.1.3. Teori Struktualis

Teori ini sering disebut teori inflasi jangka panjang karena teori ini menunjukkan sebab inflasi yang berasal dari struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang ekspor. Menurut teori ini penambahan produksi barang yang terlalu lambat sehingga tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhannya, akibatnya terjadi kenaikan harga bahan makanan dan juga kelangkaan devisa negara (Suseno & Astiyah, 2010). Menurut teori ini ada beberapa hal yang dapat menimbulkan inflasi dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang adalah:

- a. Kekakuan dari penerimaan ekspor
Kekakuan dari penerimaan ekspor yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan oleh penawaran atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga.
- b. Kekakuan dari penawaran atau produksi bahan makanan di dalam negeri
Kenaikan bahan makanan ini mendorong kenaikan upah karyawan, sehingga meningkatkan biaya produksi yang nantinya akan menaikkan harga barang.

2.2. Suku Bunga

Suku bunga adalah kompensasi yang diperoleh dari kredit menurut standar tradisional. Biaya pembiayaan juga dicirikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh pihak yang mendapatkan kredit (Mishkin, 2017). Biaya pinjaman memengaruhi pilihan individu untuk menyisihkan uang atau menghabiskan uang tunai dalam dana cadangan, kemudian, pada saat itu, biaya pinjaman juga dapat memengaruhi organisasi dan keluarga dengan mengaitkan masa kini dan masa depan (Mishkin, 2017).

Berdasarkan teori Bunga *Fisher Effect*, menyatakan tingkat bunga nominal di negara mana pun akan sama dengan suku bunga riil ditambah tingkat inflasi yang diharapkan. Persamaan fisher sebagai berikut (Mishkin, 2017):

$$i = r + \pi$$

Keterangan:

i	: Suku Bunga Nominal
r	: Suku Bunga Riil
π	: Laju Inflasi

Pada persamaan di atas terlihat bahwa tingkat bunga nominal merupakan penjumlahan di antara tingkat bunga riil dan laju inflasi yang menunjukkan bahwa tingkat bunga dapat berubah karena adanya tingkat bunga riil dan laju inflasi, sehingga terdapat hubungan positif antara tingkat bunga nominal dengan inflasi di mana setiap kenaikan satu persen dalam laju inflasi akan menyebabkan kenaikan satu persen dalam tingkat bunga nominal. Persamaan tersebut juga

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat bunga riil dengan inflasi, jika terjadi inflasi, maka akan menurunkan tingkat bunga riil. Artinya pada saat inflasi meningkat maka suku bunga riil akan turun dan sebaliknya apabila inflasi turun maka tingkat bunga akan meningkat.

2.3. Nilai Tukar

Nilai tukar adalah proporsi satu unit uang tunai asing dengan uang lokal atau biaya uang tunai ketika ditukar dengan uang lain (Mishkin, 2017). Nilai Tukar akan terombang-ambing dalam kerangka skala swapping yang dibatasi oleh instrumen pasar uang (skala konversi free drifting).

Mengingat hipotesis kesetaraan daya beli, standar konversi antara bentuk moneter dua negara setara dengan proporsi tingkat nilai negara itu. Pengaruh pembelian dalam negeri dari uang tunai negara adalah garis besar tingkat nilai negara seperti biaya tunai dari tenaga kerja dan produk referensi. Oleh karena itu, hipotesis PPP dapat meramalkan bahwa penurunan daya beli uang dalam negeri seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tingkat biaya di negara itu akan dikaitkan dengan memburuknya uang tunai negara itu terhadap pasar skala konversi negara-negara lain. Hipotesis ini menunjukkan bahwa ada pertentangan antara penyesuaian nilai homegrown dan penyesuaian nilai tukar.

Inflasi mempengaruhi latihan pertukaran di seluruh dunia. Jika tingkat ekspansi meningkat, bunga uang negara akan berkurang yang akan menghasilkan nilai produk karena harga barang-barang negara yang tidak kompetitif, pada kenyataannya impor akan meningkat karena biaya kebutuhan di negara tersebut ternyata lebih mahal sehingga akan mengimpor bunga untuk kebutuhan yang lebih murah. dari negara lain. Jadi akan ada penurunan uang tunai di negara itu terhadap bentuk moneter yang tidak dikenal. Nilai tukar adalah perbandingan satu unit mata uang asing dengan mata uang domestik atau harga suatu mata uang apabila ditukarkan dengan satu mata uang lainnya. Nilai tukar akan mengalami fluktuasi dalam sistem nilai tukar yang dikendalikan oleh mekanisme pasar mata uang (*free floating exchange rate*).

2.4. Produk Domestik Bruto (PDB)

Total output nasional adalah berapa banyak penciptaan baik tenaga kerja maupun produk yang telah dihasilkan oleh unit-unit penciptaan dalam suatu ruang pada waktu tertentu. Produk domestik bruto dipartisi berdasarkan biaya saat ini dan biaya tetap. Produk domestik bruto dengan biaya berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan konstruksi moneter suatu daerah, sedangkan produk domestik bruto dengan biaya tetap dapat digunakan untuk memutuskan perkembangan keuangan dari satu tahun ke tahun lainnya (Rahardja & Manurung, 2004). Selanjutnya produk domestik bruto dapat digunakan sebagai alat penduga bagi pembangunan keuangan suatu negara, hal ini karena produk domestik bruto menaksir dua hal, yaitu pembayaran absolut dalam perekonomian dan pengeluaran negara yang lengkap untuk tenaga kerja dan produk.

2.5. Output Gap

Output gap merupakan selisih antara output aktual dengan output potensial (Mishkin, 2017). Output gap dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Kesenjangan Output: } \frac{\text{Output Aktual} - \text{Output Potensial}}{\text{Output Potensial}} \times 100$$

Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya, sedangkan output potensial adalah nilai output perekonomian yang optimum yang dapat dianggap permanen dan berkelanjutan (*Sustainable*) dalam jangka menengah tanpa adanya kejutan (*shock*) dan tekanan inflasi. Dengan demikian output gap dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan kelebihan permintaan (*excess demand*) atau kelebihan penawaran (*excess supply*) dalam perekonomian.

2.6. Hodrick-Prescott Filter

Hodrick-Prescott (HP) filter adalah salah satu teknik smoothing yang cukup sederhana yang semakin populer dan banyak digunakan. Selain bersifat basic, HP juga memiliki kemampuan beradaptasi mengikuti perkembangan kualitas pola hasil yang diharapkan (Nasution & Hendranata, 2014). Hasil potensial yang dinilai diperoleh dengan membatasi lubang gabungan antara hasil asli dan hasil yang mungkin, atau:

$$\min \sum_{t=1}^T [(y_t - g_t)^2 + \lambda [(g_{t+1} - g_t) - (g_t - g_{t-1})]^2]$$

Di mana y_t adalah nilai aktual output dan g_t adalah output potensial, serta λ adalah parameter pemulusan estimasi tren output. Tidak ada patokan yang pasti mengenai besarnya nilai λ yang harus digunakan. Namun untuk keperluan praktisnya, maka penggunaan $\lambda=100$ untuk data tahunan banyak digunakan praktisi. Untuk data triwulanan dan bulanan, maka penggunaan masing-masing $\lambda=1600$ dan $\lambda=14400$ banyak disarankan oleh praktisi (Nasution & Hendranata, 2014)

3. Hasil Kajian

Penelitian ini mencakup lima negara ASEAN yakni, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2000-2019. Variabel yang digunakan penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu suku bunga dalam satuan persen, nilai tukar dalam satuan *index* atau *real effective exchange rate*, dan output gap dalam satuan persen. Kemudian, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu inflasi dalam satuan persen.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Inf} = \beta_0 + \beta_1 \text{SK}_{it} + \beta_2 \text{NTR}_{it} + \beta_3 \text{GDP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Inf = Inflasi di negara i tahun t
 SK_{it} = Suku Bunga di negara i tahun t
 NTR_{it} = Mata Uang negara i tahun t
 GDP_{it} = Output Gap di negara i tahun t
 β_0 = Intersep atau Konstanta
 $\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien Regresi
 ε = Error Term

3.1. Pemilihan Kesesuaian Model

Untuk menentukan model mana yang akan digunakan pertama dilakukan uji chow pada data jika hipotesis uji Chow ialah *pooled least square model* maka dilanjutkan uji Hausman terhadap data jika hipotesis untuk uji Hausman ditolak maka model *Fixed Effect* digunakan dalam pemodelan. Selanjutnya, dilakukan uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek waktu atau *cross section* di dalam data. Jika hipotesis *Breush Pagan* tidak ditolak maka dilakukan analisis dengan menggunakan model regresi panel/*pooling*. Hasil pengujian kesesuaian model pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Regresi Data Panel

Jenis Pengujian Model	Probabilitas Chi-square	Nilai Signifikansi penelitian	Keterangan
Uji Chow	0.0000	0.05	Menggunakan model FEM
Uji Hausman	0.0295	0.05	Menggunakan model FEM

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9

Berdasarkan hasil dari pemilihan estimasi regresi data panel yang telah dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* dengan nilai probabilitas < 0.05.

3.2. Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Dan Output Gap Terhadap Inflasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina

Tabel 4.2 Hasil Regresi Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, Dan Output Gap Terhadap Inflasi Di Lima Negara ASEAN

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.282481	1.782189	5.208471	0.0000
SB?	-0.201364	0.063851	-3.153671	0.0022
NTR?	-0.047510	0.015802	-3.006617	0.0034
GDPGAP?	6.407782	2.653291	2.415032	0.0177

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan menggunakan metode *fixed effect* pada Tabel 4.2, variabel Suku Bunga memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0022 yang lebih rendah dari $\alpha = 5$ persen (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara individu, variabel bebas atau independen (Suku Bunga) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Lima Negara ASEAN. Nilai koefisien variabel suku bunga sebesar -0.201364 yang dapat dikatakan bahwa semakin tinggi suku bunga maka akan relatif turun pula tingkat Inflasi di Lima Negara ASEAN. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat dari slope, Jika Suku Bunga meningkat 1 persen per tahun maka inflasi akan relatif turun 0,20 persen. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa suku bunga yang tinggi membuat tingkat inflasi di Lima Negara ASEAN turun.

Setiap kali tingkat inflasi tinggi, di mana biaya umum tenaga kerja dan produk meningkat, bank nasional harus membuat strategi untuk mengurangi ekspansi. Ketika tingkat ekspansi tinggi, untuk mengendalikannya, bank nasional menaikkan biaya pinjaman sehingga tingkat ekspansi berkurang. Ketika biaya pinjaman naik, pembelian menjadi mahal karena biayanya juga naik. Kondisi ini akan menekan minat masyarakat terhadap kredit, sehingga jumlah uang muka semakin berkurang. Dengan asumsi bunga kredit berkurang, pasokan uang tunai lokal juga akan berkurang. Ini menyiratkan bahwa individu memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Dengan demikian, daya beli individu untuk tenaga kerja dan produk rendah. Oleh karena itu, mereka akan membeli lebih sedikit tenaga kerja dan produk. Dengan demikian, daya beli individu yang rendah akan mendorong pengurangan yang dicari untuk tenaga kerja dan produk secara keseluruhan. Pada persediaan yang tepat atau persediaan yang stabil, jelas akan terjadi penurunan tingkat bunga, sehingga biaya tenaga kerja dan produk di pasar akan turun. Dengan turunnya tingkat nilai umum tenaga kerja dan produk, akibatnya akan menurunkan tingkat ekspansi. Hal ini sesuai dengan eksplorasi masa lalu yang oleh Maruto (2012), Deviana (2014), Yuliandari & Hariyanti (2016), Maryam et al. (2014), Maulana (2018) yang menyatakan bahwa biaya pembiayaan berpengaruh negatif terhadap inflasi

Terlihat pada Tabel 4.2, variabel Nilai Tukar memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0034 yang lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara eksklusif, faktor bebas (skala swapping) secara signifikan mempengaruhi ekspansi Lima Negara ASEAN. Nilai koefisien dari variabel standar konversi adalah -0,047510 yang dapat dikatakan bahwa semakin rendah skala swapping atau memburuknya terhadap USD, maka tingkat ekspansi di Lima Negara ASEAN secara umum meningkat. Dilihat dari Tabel 4.2, cenderung dilihat dari sisi miring, dengan asumsi skala swapping meningkat sebesar 1% setiap tahun, ekspansi umumnya akan berkurang sebesar 0,048 persen. Efek samping dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin antusias skala swapping, semakin rendah tingkat ekspansi di lima negara ASEAN.

Setiap kali uang suatu negara meningkat (nilainya meningkat dibandingkan dengan standar moneter yang berbeda), produk lokal menjadi mahal dibandingkan dengan produk asing yang mengharapkan harga lokal stabil di kedua negara (Mishkin, 2017). Kemudian, pada saat itu, ketika uang mendevaluasi, produk lokal menjadi lebih murah dibandingkan dengan produk asing. Ketidakstabilan skala konversi akan mempengaruhi latihan pertukaran dan latihan keuangan suatu negara. Devaluasi nilai uang suatu negara terhadap

bentuk moneter negara lain akan menyebabkan peningkatan biaya untuk mendatangkan produk, misalnya, barang dagangan pembeli, barang modal, dan peningkatan bahan alami modern yang tidak dapat dikirim secara lokal. Atau sebaliknya bisa disebut juga dengan ekspansi impor, yaitu Inflasi khusus yang terjadi di dalam negeri karena dampak kenaikan biaya dari luar negeri. Ekspansi biaya bahan alam yang diimpor menyebabkan kurangnya produk yang dihasilkan. Untuk mengatasi kenaikan biaya impor, pembuat homegrown akan meningkatkan biaya produk kreasi mereka sehingga mereka dapat meningkatkan biaya pada tingkat biaya homegrown, ini adalah kesan dari tingkat ekspansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh, Islam et al. (2017), Triasesiarta & Alfon (2015), Endri (2008) Larasati & Amri (2017), Solihin (2011), dan Achسانی et al. (2009) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang nyaman antara skala konversi asli dan tingkat ekspansi, di mana penurunan skala konversi asli akan mendorong peningkatan dalam tingkat ekspansi.

Pada Tabel 4.2, variabel Output Gap memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0177 yang lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara terpisah faktor bebas (Output Gap) mempengaruhi ekspansi di Lima Negara ASEAN. Nilai koefisien variabel output gap adalah 6.407782, yang dapat dikatakan bahwa semakin tinggi output gap maka semakin tinggi pula tingkat inflasi di lima negara ASEAN. Berdasarkan Tabel 4.2, cenderung dilihat dari kemiringan, dengan asumsi Lubang Hasil meningkat sebesar 1% setiap tahun, ekspansi akan meningkat secara moderat sebesar 6,41 persen. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa output gap yang tinggi membuat laju inflasi di Lima Negara ASEAN meningkat.

Hal ini sesuai dengan hipotesis keuangan yang dominan secara keseluruhan. Setiap kali lubang hasil negatif pada tahun tertentu, bank nasional mungkin mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan keuangan gratis, misalnya, menurunkan biaya pinjaman dan memperluas pasokan uang tunai, sehingga pinjaman meningkat dan akhirnya meningkatkan perkembangan moneter. Kemudian, pada saat itu, dengan asumsi lubang hasil positif, biasanya ditunjukkan oleh bunga yang tidak perlu sehingga biaya akan sering mengalami kenaikan besar atau tingkat ekspansi terlalu tinggi. Keadaan moneter dengan hasil positif lubang biasanya membawa pemanasan. Ketika lubang hasil positif, otoritas keuangan mengurangi pertumbuhan moneter dengan meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi pengembangan pasokan uang tunai, dan dengan demikian mengurangi pengembangan kredit yang dengan demikian akan memutar kembali pembangunan secara umum. Dengan demikian, pada saat perekonomian dalam kondisi berkembang, maka minat terhadap variabel penciptaan akan meningkat dan pada akhirnya akan mendukung peningkatan laju ekspansi. Kemudian lagi, ketika ekonomi sedang dalam kemerosotan, minat untuk elemen-elemen penciptaan cukup kecil dan kemudian, pada saat itu, akan menurunkan tingkat ekspansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Solihin (2011), Els (2015), Ginting (2016) Endri (2008) dan Janah & Pujiati (2018) yang menyatakan bahwa output gap secara tegas berhubungan dengan inflasi.

3.3. Analisis Individu

Analisis Individu merupakan efek dari *Fixed Effect Model* (FEM). Heterogenitas yang dihasilkan setiap kota menggambarkan adanya faktor-faktor atau variabel lain yang dimiliki oleh satu negara yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Dengan kata lain bahwa negara tersebut memiliki keunggulan dari variabel lain di luar variabel dari variabel bebas dalam model.

Tabel 4.3 Nilai Intersep Setiap Individu (Negara)

No	Negara	Rata-Rata Inflasi	Nilai Intersep	Estimasi INF
1	Indonesia	6.758	12.9657	6.7576
2	Malaysia	2.16	7.5214	2.1606
3	Singapura	1.533	7.7102	1.5336
4	Thailand	2.016	7.8382	2.0165
5	Filipina	3.842	10.3767	3.8421

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9 dan Excel

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil intersep menunjukkan koefisien dari estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), nilai intersep menunjukkan bahwa lima negara ASEAN memiliki kecepatan ekspansi yang berbeda-beda yang setara dengan nilai blok setiap negara. Indonesia memiliki nilai intersep yang lebih tinggi dibandingkan empat negara lainnya, yaitu 12,9657 dengan indeks INF sekitar 6,75 persen. Kemudian, pada saat itu, nilai intersep tertinggi kedua setelah Indonesia adalah Filipina sebesar 10,3767 dengan indeks INF sekitar 3,84 persen. Berikutnya adalah Singapura dengan perolehan nilai 7,7102 dan indeks INF terkecil di Lima Negara ASEAN, yaitu sekitar 1,53 persen.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan cenderung disimpulkan bahwa suku bunga mempengaruhi inflasi di lima negara ASEAN. Ini dengan alasan bahwa ketika suku bunga rendah, bunga untuk uang muka meningkat, menyiratkan bahwa lebih banyak uang akan dihabiskan, sehingga ekonomi berkembang dan tingkat inflasi meningkat.

Selain itu, nilai tukar secara signifikan mempengaruhi inflasi di lima negara ASEAN. Hal ini karena devaluasi nilai tukar terhadap standar moneter yang berbeda akan membuat produk impor meningkat dan dapat meningkatkan harga barang dagangan di dalam negeri.

Kemudian, pada titik itu, output g_{it} tersebut sangat berpengaruh terhadap inflasi di Lima Negara ASEAN. Ini karena minat yang berlebihan terhadap tenaga kerja dan produk sehingga biaya akan cukup sering mengalami kenaikan kritis atau tingkat inflasi terlalu tinggi.

Mengingat nilai hasil penelitian, Indonesia dan Filipina memiliki pengukur INF paling penting dengan penilaian Indonesia menjadi 6,75 persen dan Filipina 3,84 persen, secara individual. Pasaunya, inflasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan inflasi terbesar dengan rata-rata sebesar 6,76 persen. Inflasi yang tinggi disebabkan pada tahun 2005 yang mencapai 17,1 persen. Sementara itu, nilai intersep dan hasil INF paling rendah berada di Singapura sebesar 1,53 persen. Koefisien ini merupakan nilai

yang paling rendah dibandingkan dengan lima negara ASEAN lainnya. Laju inflasi selama 20 tahun sebelumnya di Singapura secara umum akan belfluktuasi sebesar 1,53 persen.

5. Daftar Pustaka

Achsani, N. A., Fauzi, A. J. F. A., & Abdullah, P. (2009). Keterkaitan Inflasi Dengan Nilai Tukar Riil : Analisis Komparatif Antara Asean+3, Uni Eropa Dan Amerika Utara. *Majalah Ekonomi Universitas Airlangga*, 19(3), 231-250.

ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Statistical Year Book*.

Deviana, N. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga Sbi, Suku Bunga Kredit Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 81-91.

Els, W. B. and P. J. A. van. (2015). Output Gap and Inflation In The EU. *De Nederlandsche Bank*.

Endri. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 1-13.

Ginting, A. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi : Studi Kasus Di Indonesia Periode Tahun 2004-2014. *Kajian*, 21(1), 37-58.

Irham, F. (2019). *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

Islam, R., Ghani, A. B. A., Mahyudin, E., & Manickam, N. (2017). Determinants of Factors that Affecting Inflation in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 355-364.

Janah, I. U., & Pujiati, A. (2018). Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Ekspektasi dalam Mempengaruhi Inflasi di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 7(4), 384-394. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i4.27719>

Langi, T. M., Masinambow, V., & Siwu, H. (2014). Analisis Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Kurs Terhadap Inflasi Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 44-58.

Larasati, D. M., & Amri. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 535-543.

Maruto, N. W. P. & B. U. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di indonesia periode 2000.1-2011.4. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1, 1-10.

Maryam, H. J., Hashim, M. J., Osman, I., Nura, &, & Elias, L. (2014). the Determinants of Inflation in Malaysia. *International Conference on Accounting, Business and Economics*, August 2014.

- 1 Maulana, I. Al. (2018). *The Impact of Fiscal Policy, Monetary Policy, GDP and Trade towards Inflation among ASEAN-5 Countries in 1985-2016*. 4.
- Mishkin. (2017). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Edisi Sebelas Buku I&II*. Salemba Empat.
- Nasution, D., & Hendranata, A. (2014). *Estimasi Output Gap Indonesia*.
- 1 Rahardja, P., & Manurung, M. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Revisi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- 1 Solihin. (2011). *Konvergensi Inflasi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi : Studi Empiris Di Negara-Negara Asean+6*.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- 1 Suseno, & Astiyah, S. (2010). Inflasi. *Bank Indonesia*, 22(22), 1-68.
- 1 Triasesiarta, N., & Alfon, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 2005-2014 dengan Pendekatan Error Corection Model (ECM). *Institut Bisnis Nusantara*, 18(2), 23-36. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1917>
- 1 Utari, G. A. D., Cristina, R., & Pambudi, S. (2015). Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya. *Bank Indonesia Institute*, 23(23), 1-64.
- Widianto, A. (2017). *Apa Hubungan Suku Bunga dan Inflasi?* Www.Bolasalju.Com.
- 1 Yuliandari, A., & Hariyanti, D. (2016). Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Tingkat Inflasi Di Asean-5. *Media Ekonomi*, 24(1), 17. <https://doi.org/10.25105/me.v24i1.3785>

BAB V

FEDERAL FUND RATE

1
(Analisis Dampak *Federal Fund Rate* Terhadap Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi Dalam Perekonomian Terbuka Kecil: Kasus Negara ASEAN-3)

Oleh:

Zakenia Choirunnisah; Siti Rohima; Mardalena

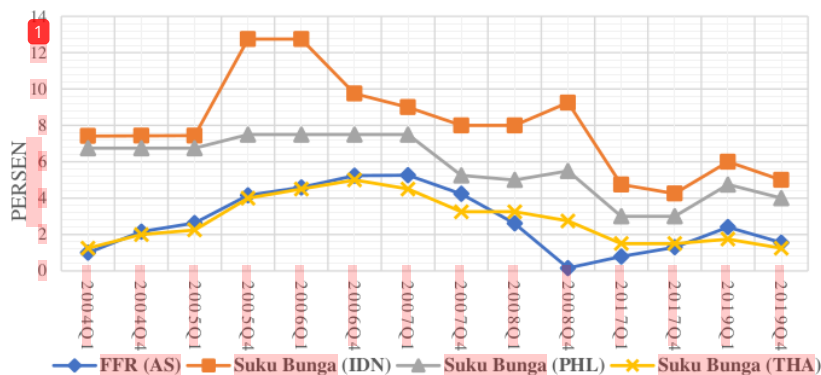
1. Pendahuluan

Selama dua puluh tahun terakhir, ekonomi dunia telah lebih terintegrasi di seluruh dunia, baik secara riil maupun melalui bidang moneter, kemudian memberikan peluang kepada negara-negara agraris yang berpegang pada sistem ekonomi terbuka kecil. Ini karena negara-negara agraris tidak dapat secara bebas memiliki modal tetap, sehingga untuk menaikkan upah, mereka harus sepenuhnya dimasukkan ke dalam perekonomian dunia. Perpaduan ekonomi antar negara juga mempengaruhi pelaksanaan strategi keuangan dan menyebabkan negara-negara yang menganut perekonomian sedikit terbuka menjadi semakin tunduk pada negara lain. Salah satu jenis kombinasi moneter adalah dasar dari Hubungan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Alasan dibentuknya asosiasi ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara, yang tercermin dari pelepasan batas-batas dan kebebasan lintas dan keluar modal.

Adanya perkembangan modal yang bebas ini dapat menunjukkan perkembangan arus modal antar negara yang sangat besar. Seperti yang ditunjukkan oleh Nguyen et al. (2014) bagian utama dari modal bebas adalah bahwa ekonomi dunia menunjukkan perkembangan yang sinkron di sebagian besar faktor keuangan, misalnya, tingkat perdagangan, ekspansi dan perkembangan moneter, kemudian secara keseluruhan transmisi ini dapat dipahami melalui dampak virus. Dampak infeksi ini dapat terjadi dengan asumsi perekonomian dunia sedang negatif, misalnya perubahan strategi terkait uang AS seperti perkembangan *Government Supports Rate* (FFR). Mempertimbangkan bahwa ada beberapa alasan di balik mengapa pentingnya pengaruh perkembangan pengaturan keuangan AS menentukan arah kemajuan ekonomi dunia dan bank-bank nasional di berbagai negara.

Demikian juga pada tahun 2008 ada tambahan masalah masalah moneter seperti darurat moneter. Sesuai laporan *World Economic Outlook* (2009), dampak ini menyebabkan penurunan perkembangan moneter di seluruh dunia, pada awalnya pada tahun 2007 berkembang sebesar 5,2 persen menjadi 3,0 persen dan terus menurun hingga kurang dari 1,1 persen pada tahun-tahun sebelumnya. 2007. 2009. Selain itu, dampak infeksi ini juga telah menyebar ke Indonesia, Filipina, dan Thailand atau dikenal dengan ASEAN-3. Hal ini tergantung pada bagaimana ketiga negara ini memiliki tempat dengan perekonomian yang sedikit terbuka dan juga ditopang oleh penggunaan tarif perdagangan yang bergerak bebas. Dengan demikian, ketiga negara ini sama sekali tidak berdaya jika ada rentetan dari ekonomi dunia seperti AS.

Dengan demikian, keadaan ini memberi tekanan berat pada eksekusi strategi terkait uang dan ketergantungan ekonomi makro. Ada ketakutan akan kemerosotan keuangan yang berkembang dan meluasnya konsekuensi yang merugikan. Selanjutnya, peristiwa darurat ini membuat The Fed sebagai posisi keuangan AS mengubah posisi money related approach melalui Government Subsidized Rate (FFR) yang sebelumnya ditutup menjadi free bearing. Perkembangan Government Asset Rate (FFR) yang dilakukan oleh Federal Reserve juga dijawab oleh perbankan nasional di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand). Reaksi perbankan nasional di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) dengan mengubah arah perkembangan Government Subsidized Rate (FFR) dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Pergerakan Suku Bunga Kebijakan (Interest Policy Rate) Tahun 2004-2019

Sumber: International Monetary Fund dan Federal Reserve Economic Data (FRED)

Berdasarkan Gambar 5.1 menunjukkan tren *Federal Fund Rate* (FFR) mulai mengalami perbaikan pada triwulan pertama tahun 2004 sebesar satu persen dan semakin berkembang, tepatnya pada tahun 2007 triwulan utama mencapai angka tertingginya yaitu 5,26 persen kemudian, kemudian berlanjut pada tahun 2008 ketika keadaan darurat moneter di AS membuat The Fed memangkas *Government Finances Rate* (FFR).) berkali-kali dan terus melakukan pendekatan keuangan gratis dengan menerapkan biaya pinjaman yang obyektif dari jangkauan terjauh yang lebih rendah dari 0 hingga 25 fokus premis (bsp). Penurunan *Government Asset Rate* (FFR) pada tahun 2008 juga dijawab oleh perbankan nasional di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) seperti terlihat pada Gambar 5.1. Hal ini dilakukan untuk meredakan guncangan yang dimulai dari AS dengan membatasi perbedaan biaya pinjaman dengan alasan bahwa keadaan ini dapat mempengaruhi pendukung keuangan yang tidak dikenal.

Eksekusi pendekatan free money related oleh The Fed telah mendorong aliran modal masuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina. Namun, hal lain di luar perkiraan terjadi di Thailand dimana negara ini mencatat kurang 5,1 persen yang saat ini bertahan di 5,3 persen pada tahun 2008. Jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, Indonesia mengalami peningkatan

arus masuk modal yang paling tinggi yaitu 11,9 persen yang baru-baru ini hanya 8,9 persen. Persen menjadi 20,8 persen, sedangkan Filipina juga mengalami peningkatan, meskipun kecil, hanya satu persen dari 1,2 persen pada 2008 menjadi 2,2 persen pada 2009 (ASEAN *Statistical Yearbook*, 2010).

Untuk sementara, The Fed secara andal telah menetapkan biaya pinjaman bebas sepenuhnya dengan maksud untuk memperluas pemanfaatan publik dalam lingkup 0 hingga 25 fokus premis (bsp). Sebenarnya, strategi ini tidak menarik karena belum menunjukkan perbaikan moneter dan justru berdampak memperburuk AS. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, The Fed melakukan pengaturan keuangan yang eksentrik sebagai pilihan untuk mengalahkan ekonomi dunia yang tidak berdaya (Nugroho dan Christian, 2018). Pengaturan keuangan eksentrik ini dikenal sebagai strategi Quantitative Facilitating, pada dasarnya pendekatan ini menggantikan fokus biaya pinjaman menjadi fokus pasokan uang tunai yang sepenuhnya bertujuan untuk memperluas energi ekonomi AS. Strategi Quantitative Facilitating dilakukan ketika AS menghadapi keadaan darurat pada 2007-2009.

Eksekusi strategi Quantitative Facilitating yang berhasil membuat The Fed melanjutkan strategi Tightening atau dikenal dengan istilah penurunan money related boost. Strategi ini dilakukan secara bertahap sebagai tanda perbaikan keuangan di AS, dengan tujuan agar The Fed mulai berniat membenahi likuiditas pada 2013. Hal ini diungkapkan oleh Ben Bernanke saat menjabat sebagai kepala legislatif The Fed, yang akan kemudian diikuti oleh posisi pengaturan keuangan melalui ekspansi biaya pinjaman. Rujukan Tarif Keuangan Pemerintah yang lalu konsisten dalam lingkup 0%.

Penetapan Government Subsidizes Rate (FFR) dilakukan secara bertahap mulai Desember 2015. Deklarasi yang dibuat oleh Government Open Market Advisory group (FOMC) sebagai badan utama dari pertemuan strategi bank nasional AS telah menyetujui untuk menaikkan Suku Bunga Dukungan Administratif. (FFR) beberapa kali dan setiap kenaikan terdiri dari 25 premis fokus (bsp) sehingga jaminan jangkauan pada tahun 2008 dari 0,00-0,25 persen menjadi 1,75-2,00 persen dan dilanjutkan dengan pengaturan Federal Reserve untuk menaikkan Bureaucratic Finances Rate (FFR).) sekali lagi. Hal ini menyebabkan Government Finance Rate (FFR) berada pada titik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 2,41 persen pada triwulan pokok 2019.

Kerentanan berupa penetapan Government Subsidizes Rate (FFR) oleh The Fed telah memicu perbedaan biaya pembiayaan antar negara. Pada akhirnya, kondisi ini akan memperkuat perilaku para financial backer di seluruh dunia yang lebih sering risk-off dan akan menyebabkan pembalikan arus modal karena financial backer akan lebih tertarik menempatkan modalnya di AS untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. menghasilkan modal daripada di negara-negara berkembang seperti negara-negara ASEAN-3. (Indonesia, Filipina, dan Thailand). Hal ini diperkuat dengan laporan otoritas dari *World Economic Outlook* (2015) menyatakan bahwa penetapan Government Finances Rate (FFR) membuat aliran modal negara-negara sektor bisnis berkembang terus melemah kembali. Dengan demikian, aliran modal ini akan mempengaruhi kondisi skala swapping dalam perekonomian dalam negeri (Syarifuddin, 2015).

Pada masa darurat moneter yang dimulai dari AS, nilai perdagangan negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) mengalami penurunan

yang tajam. Hal ini dibuktikan dengan informasi dari aspek Finansial Tukar, rupiah Indonesia sempat menyentuh level 0,0000922 per dolar AS pada kuartal terakhir 2008 dan semakin melemah pada kuartal pertama 2009 menjadi 0,0000867 per dolar AS sedangkan Peso Filipina juga mencatat pelemahan. dari tingkat 0,0211 untuk setiap dolar AS menjadi 0,0208 per dolar AS dan pada waktu yang sama baht Thailand juga terdevaluasi pada tingkat 0,0288 per dolar AS menjadi 0,0282 per dolar AS. Meskipun pada tahun berikutnya tingkat perdagangan di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) mulai menunjukkan pola yang stabil. Namun demikian, pada tahun 2013 skala konversi ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) kembali mencatat pola yang melemah karena rencana Federal Reserve untuk sedikit demi sedikit membenahi Government Supports Rate (FFR) dan perekonomian dunia. mulai menurun, memicu kerentanan dan berdampak pada gentingnya posisi skala konversi di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand).

Dengan demikian, pada tahun 2013 rupiah Indonesia melemah lebih jauh dibandingkan pada saat darurat moneter, secara definitif pada triwulan terakhir tahun 2013 rupiah mencapai derajat 0,0000822 per dolar AS dan terus melemah hingga triwulan kedua dari triwulan terakhir tahun 2015 menjadi 0,0000683 per dolar AS. Dolar Amerika. Seperti Indonesia, Peso Filipina juga melemah pada tingkat 0,0225 per dolar AS dan Peso terdevaluasi lebih lanjut menjadi 0,0214 per dolar AS pada kuartal kedua dari kuartal terakhir 2015, sementara Baht Thailand pada 2013 juga terdevaluasi namun nilainya masih lebih tinggi. dibandingkan pada saat darurat dimana baht Thailand pada kuartal kedua dari kuartal terakhir 2013 tercatat senilai 0,0305 per dolar AS dan pada kuartal kedua dari kuartal terakhir 2015 baht anjlok menjadi senilai 0,0275 per dolar AS. Melemahnya nilai perdagangan di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) juga dipicu oleh perang kurs termasuk AS dan China sehingga kondisi ini berdampak pada varians dalam laju perdagangan Indonesia, Filipina. dan Thailand.

Pengaruh perubahan skala konversi dapat membuat perekonomian suatu negara mengalami kegoyahan dalam hasil yang ditunjukkan oleh perkembangan keuangan. Ini tergantung pada bagaimana ketika skala swapping mendevaluasi, itu dapat mengganggu pameran dasar-dasar ekonomi makro lainnya. Biasanya penurunan skala konversi kemudian dapat digunakan untuk memperluas hasil suatu negara. Bagaimanapun, kondisi ini didukung oleh melemahnya ekonomi dunia. Artinya, menunjukkan berkurangnya popularitas tenaga kerja dan produk dari luar negeri, sehingga akan menimbulkan gangguan pembangunan keuangan yang mencerminkan hasil yang dicapai suatu negara.

Berdasarkan informasi Bank Dunia, menunjukkan bahwa perkembangan moneter di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) terombang-ambing. Pembangunan keuangan merupakan hasil mutlak yang disampaikan oleh suatu negara. Guncangan mulai dari Amerika mempengaruhi tempat hasil homegrown. Pola perkembangan moneter mulai tahun 2007 terus menurun sedikit demi sedikit dan keadaan yang paling parah terjadi pada tahun 2009. Di Indonesia, perkembangan keuangan tahun 2007 mencapai 6,35 persen dan pada tahun 2009 menjadi 4,63 persen, sedangkan untuk Filipina pada tahun 2007 sebesar 6,35 persen. 6,52 persen menurun pada 2009 menjadi 1,45 persen, berbeda dengan Thailand yang perkembangan moneternya negatif, yang

belakangan ini bertahan 5,44 persen pada 2007 dan negatif 0,63 persen pada 2009. Apalagi, sepanjang 2019 perkembangan hasil dalam negeri terus berfluktuasi. (berfluktuasi) mengingat pada tahun 2013 perkembangan keuangan negara-negara maju melemah, disusul pada tahun 2015 dimulainya standarisasi ekonomi AS, yang membawa pada penetapan Government Supports Rate (FFR) oleh The Fed.

Kerentanan keadaan moneter luar (luar negeri) dapat mempengaruhi perkembangan keuangan yang kemudian akan diikuti oleh faktor makroekonomi dalam negeri lainnya seperti ekspansi. Menurut perkembangan dan ekspansi moneter, ada kecocokan, di mana ketika perkembangan keuangan suatu negara tinggi, akan diikuti oleh ekspansi yang rendah dan Tingkat Subsidi Pemerintah (FFR) dan biaya pinjaman strategi yang rendah (Juoro, 2014).

Ditinjau dari informasi aspek **Keuangan Pertukaran**, terlihat bahwa ekspansi di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) selama periode 2002 hingga 2019 mengalami beberapa kali peningkatan yang kritis. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2005 dan 2008 dan selanjutnya untuk tahun berikutnya ekspansi di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) semakin berkurang. Secara eksplisit untuk Thailand, pola berlanjut yang mendorong pengosongan sepanjang tahun 2015 pada triwulan utama dari short 0,57 persen menjadi kurang dari 0,46 persen pada tahun 2016 kemudian terjadi flattening kembali pada tahun 2017 pada triwulan kedua dengan penambahan kurang dari 0,05 persen. Kondisi ini bertolak belakang dengan laju perkembangan moneter di Thailand dimana pada saat pengosongan tahun 2015 namun perkembangan keuangan mengalami peningkatan berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya sebesar 0,98 persen, yang pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,13 persen.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Perekonomian Terbuka

Menurut Warjiyo & Solikin (2003) negara-negara yang menganut sedikit perekonomian terbuka dapat melakukan latihan komoditas dan impor dan dapat melakukan latihan pinjaman dan akuisisi dengan negara yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan bursa dunia secara keseluruhan akan diikuti oleh perbaikan di bidang moneter. Perbaikan di bidang nilai tukar dan moneter di negara-negara yang menganut sedikit perekonomian terbuka kemudian akan mempengaruhi persiapan dan pelaksanaan pendekatan keuangan. Hal ini karena semakin tinggi pertukaran global dan pertukaran moneter suatu negara, semakin tinggi aliran modal asing.

Pada dasarnya, ketika terjadi perluasan keserbagunaan aset antar negara, bank nasional dalam menjalankan strategi terkait uang tidak dapat berjalan dengan bebas. Ini karena anggapan bahwa negara-negara yang menganut sedikit ekonomi terbuka hanyalah wilayah kecil dari ekonomi planet sehingga penyesuaian biaya pembiayaan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang pada dasarnya tidak mempengaruhi tarif premi dunia juga didukung oleh fleksibilitas bebas untuk masuk atau keluar

biaya pinjaman di negara ekonomi terbuka kecil harus setara dengan biaya pembiayaan dunia, sehingga kondisi biaya pembiayaan yang berlaku untuk ekonomi terbuka kecil negara di pasar dapat terdiri uang dunia sebagai berikut (Mankiw, 2016):

$$r = r^*$$

Dimana r adalah biaya pinjaman dalam negeri sedangkan r^* adalah biaya pembiayaan dunia. Oleh karena itu, individu dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan memperoleh jika biaya pinjaman di atas r^* dan sebaliknya, individu dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan meminjam dengan asumsi biaya pinjaman di bawah r^* . Sangat mungkin beralasan bahwa pengaturan biaya pinjaman dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan sepenuhnya ditentukan oleh biaya pinjaman dunia sehingga dalam perekonomian terbuka kecil biaya pinjaman dunia berlaku sebagai variabel eksogen.

2.2. Teori International Fisher Effect (IFE)

Menurut Madura (2011) teori *International Fisher Effect* (IFE) tidak menggunakan selisih laju inflasi, melainkan menggunakan perbedaan tingkat suku bunga untuk menjelaskan mengapa nilai tukar dapat berubah sepanjang waktu. Menurut Ekananda (2014) teori *International Fisher Effect* (IFE) menyatakan bahwa ketika tingkat suku bunga domestik (i_b) lebih rendah dari tingkat suku bunga dunia (i_f) maka, kurs atau nilai tukar domestik (e_b) akan terdepresiasi. Kondisi ini memicu berkurangnya investasi yang masuk dalam perekonomian domestik ketika suku bunga dunia mengalami peningkatan, sehingga persediaan mata uang dalam dolar Amerika Serikat akan berkurang yang pada akhirnya berdampak pada depresiasi nilai tukar. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan kurs yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga dunia secara tidak langsung akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.3. Teori Pertumbuhan Keynes

Hipotesis pembangunan Keynes pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Pemikirannya kemudian disebut dalam hipotesis makroekonomi sebagai Transformasi Keynesian (Pemberontakan Keynesian). Pada dasarnya hipotesis pengembangan Keynes masuk akal bahwa moneter tidak ditentukan oleh bunga total (total interest). Seperti yang ditunjukkan oleh Keynes, total yang memaksa tidak terhambat oleh pengeluaran untuk pemanfaatan, pengeluaran untuk spekulasi, dan pengeluaran pemerintah untuk secara tegas mempengaruhi pergerakan keuangan yang masih mengudara oleh pembangunan moneter (Chalid, 2015).

Selain itu, menurut Mankiw (2016), pandangan Robert Mundell pada awalnya masih merupakan dunia yang tertutup dengan masalah moneter. Namun, daerah dan bangsa akan semakin terbuka. Pandangan ini juga merupakan penggagas model Mundell-Fleming di mana kehadiran ekonomi terbuka menunjukkan adanya latihan komoditas dan impor $\left(NX\right)$ yang dipengaruhi oleh skala swapping $\left(e\right)$. Selanjutnya, produk bersih $\left(NX\right)$ yang penting untuk daerah asing pada dasarnya siap untuk meningkatkan perkembangan keuangan melalui skala swapping sehingga

perkembangan standar konversi akan mempengaruhi nilai dan sumber daya mengingat skala konversi dapat mempengaruhi seberapa besar pendapatan.

2.4. Teori Mundell-Fleming

Hipotesis Mundell-Fleming pertama kali dipresentasikan pada tahun 1963 oleh Pemenang Nobel Robert Mundell dan mending Marcus Fleming (Dornbusch et al., 2011). Sesuai Borondo (2000) dalam Arif dan Tohari (2006) masuk akal bahwa hipotesis Mundell-Fleming adalah jenis struktur ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami transmisi di seluruh dunia karena dampak ekonomi dunia pada sedikit terbuka. ekonomi.

Teori Mundell-Fleming mengharapkan bahwa perekonomian sedikit terbuka dengan keserbagunaan modal yang ideal antar negara (amazing capital portability). Pada umumnya untuk melihat alat transmisi hipotesis Mundell-Fleming harus dapat dilihat melalui jalur pelayaran, hal ini dikarenakan suatu negara akan mengambil suatu kesepakatan dengan menurunkan biaya pinjaman untuk membangun hasil dan mengakibatkan hasil yang disayangkan dalam berbagai bangsa.

2.5. Teori Struktural

Hipotesis primer masuk akal bahwa ekspansi umumnya dianut oleh negara-negara non-industri. Hal ini didukung melalui penelitian atau penelitian terhadap ekspansi di negara-negara agraris yang menunjukkan bahwa ekspansi bukan hanya merupakan ciri finansial tetapi juga berasal dari ciri utama yang dikenal sebagai *cash push expansion* (Kartini, 2019).

Hipotesis primer menekankan bahwa secara keseluruhan desain moneter di negara-negara non-industri masih merupakan contoh agraris sehingga variabel pendukung terjadinya kegoyahan biaya dalam negeri atau yang dikenal dengan ekspansi tidak hanya disebabkan oleh gejolak keuangan yang dimulai dari dalam negeri (interior). namun juga dari hubungan yang tidak dikenal (luar). Perselisihan keuangan yang dimulai dari dalam dapat berupa kekecewaan panen karena perbedaan musim yang cepat dan faktor peristiwa bencana, sedangkan untuk gangguan luar terkait dengan hubungan yang tidak dikenal yang dapat dimulai dari berantakannya kondisi pertukaran, kewajiban yang tidak dikenal dan perdagangan yang tidak dikenal. tarif. Sementara itu, menurut Kartini (2019), kemacetan yang mendasari di negara-negara berkembang disebabkan oleh tiga keadaan, terutama pertama, inventaris yang tidak elastis dari area pertanian. Kedua, simpanan perdagangan asing dibatasi, sehingga hambatan ini membuat kapasitas impor bahan alam dan modal yang dibutuhkan oleh kawasan modern menjadi terbatas. Ketiga, pembatasan pengeluaran pemerintah.

3. Hasil Kajian

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *federal fund rate* (ffr) terhadap suku bunga kebijakan (*interest policy rate*) yaitu menggunakan pendekatan *Structural Vector Autoregression* (SVAR). Periode penelitian yaitu dari kuartal 1 tahun 2002 hingga kuartal 4 tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand. Variabel penelitian

yaitu *Federal Fund Rate* (FFR) dalam satuan persen, suku bunga kebijakan (*Interest Policy Rate*) dalam satuan persen, nilai tukar dalam kurs negara masing-masing terhadap Dolar AS, pertumbuhan ekonomi persen, dan inflasi dalam satuan persen.

Model SVAR yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel yang membentuk lima persamaan, di mana *Federal Fund Rate* (FFR) digunakan untuk mencerminkan suku bunga dunia, suku bunga kebijakan (I) digunakan untuk mencerminkan kebijakan moneter, nilai tukar (NT), inflasi (IF) dan pertumbuhan ekonomi (Y) digunakan untuk mencerminkan variabel makroekonomi di Negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand). Adapun model SVAR yang dibentuk dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_t = \sum_{t=0}^{\infty} (A_i U_{t-i} = A(L)U_t) \quad (2.1)$$

Di mana U_t adalah vektor dengan lima variabel yang digunakan (FFR, I, NT, IF, dan Y) dan A_i merupakan *contemporaneous relations* antar variabel, sedangkan $A(L)$ adalah *finite-order matrix polynomial* dengan operator *Lag L*. Variabel eksternal ditunjukkan oleh *Federal Fund Rate* (FFR) dianggap sebagai variabel independen, sedangkan untuk Negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand) diasumsikan sebagai negara perekonomian terbuka kecil (*small open economy*), asumsi ini mengimplikasikan bahwa variabel domestik (I, NT, IF, dan Y) tidak dapat memengaruhi variabel eksternal. Oleh sebab itu, pengaruh variabel eksternal hanya satu arah terhadap variabel domestik. Dengan demikian, lima persamaan yang dapat dibentuk dalam sistem *Structural Vector Autoregression* (SVAR) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} e_{FFR} &= a_{11}\varepsilon_{FFR} \\ e_I &= a_{21}\varepsilon_{FFR} + \varepsilon_I \\ e_{NT} &= a_{31}\varepsilon_{FFR} + a_{32}\varepsilon_I + \varepsilon_{NT} \\ e_{IF} &= a_{41}\varepsilon_{FFR} + a_{42}\varepsilon_I + a_{43}\varepsilon_{NT} + \varepsilon_{IF} \\ e_Y &= a_{51}\varepsilon_{FFR} + a_{52}\varepsilon_I + a_{53}\varepsilon_{NT} + a_{54}\varepsilon_{IF} + \varepsilon_Y \end{aligned}$$

Model restriksi *Structural Vector Autoregression* (SVAR) yang digunakan dalam penelitian merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wardhono *et al.*, (2020) dengan cara menetapkan spesifikasi $C_0\varepsilon_t = e_t$ selanjutnya C_0 direstriksi sebagai *triangular matrix* sehingga menghasilkan model ke dalam sistem *just identified*. Adanya penetapan matriks C_0 berfungsi untuk mengukur guncangan struktural (*structural shock*) pada variabel endogen dengan begitu matriks C_0 memiliki makna sebagai *impact restrictions* sebagai akibat adanya guncangan struktural.

Model restriksi atau batasan dalam penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$[e_{FFR} e_I e_{NT} e_{IF} e_Y] \\ = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ a_{21} \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ a_{31} \ a_{32} \ 1 \ 0 \ 0 \ a_{41} \ a_{42} \ a_{43} \ 1 \ 0 \ a_{51} \ a_{52} \ a_{53} \ a_{54} \ 1] [e_{FFR} e_I e_{NT} e_{IF} e_Y]$$

3.1. Hasil Uji Stasioneritas

Penggunaan data time series sangat penting untuk melakukan uji stasioneritas. Hal ini dikarenakan jika data tidak stasioner dapat menimbulkan hasil regresi yang salah atau dikenal dengan istilah regresi palsu (Gujarati & Porter, 2008).. Dalam penelitian ini untuk menguji stasioneritas data menggunakan unit root test dengan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF Test). Data dikatakan stasioner jika nilai statistik uji ADF lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu.

Tabel 5.1 Hasil Uji Akar Unit (Stasioneritas) Negara ASEAN-3

Variabel	Second Difference (IDN)		Second Difference (PHL)		Second Difference (THA)	
	ADF-Test	ADF-Test	ADF-Test	Prob.	ADF-Test	Prob.
FFR	-10.18507	-10.18507	-10.18507	0.0001***	-10.18507	0.0001***
I	-9.880578	-9.880578	-8.442904	0.0000***	-8.154991	0.0000***
NT	-7.836290	-7.836290	-9.695376	0.0000***	-16.55010	0.0001***
IF	-6.275287	-6.275287	-7.85206	0.0000***	-5.965993	0.0000***
Y	-6.143682	-6.143682	-5.524873	0.0000***	-6.777325	0.0000***

Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Keterangan: *** Signifikan pada level 1 persen

(FFR= *Federal Fund Rate*, I= Suku Bunga Kebijakan (*Interest Policy Rate*), NT= Nilai Tukar, IF= Inflasi, Y= Pertumbuhan Ekonomi, IDN= Indonesia, PHL= Filipina, dan THA= Thailand)

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa variabel penelitian baik di Negara Indonesia, Filipina, dan Thailand telah stasioner pada tingkat *second difference* dan signifikansi satu persen.

3.2. Hasil Penentuan Panjang Lag Optimal

Penentuan *lag* optimal dalam penelitian ini untuk menghindari penggunaan *lag* terlalu panjang dan penentuan *lag* terlalu pendek. Hal ini dikarenakan penentuan *lag* yang terlalu pendek dapat mengakibatkan spesifikasi model yang keliru (*misspecification model*) yang ditandai oleh tingginya *standard error* (Gujarati & Porter, 2008). Menurut Arif & Tohari (2006) penentuan *lag* optimal dapat dilihat melalui kriteria informasi yang terdiri dari nilai LR, FPE, AIC, SC, dan HQ yang terkecil.

Tabel 5.2 Penentuan Lag Optimal di Negara ASEAN-3

Negara	Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
--------	-----	----	-----	-----	----	----

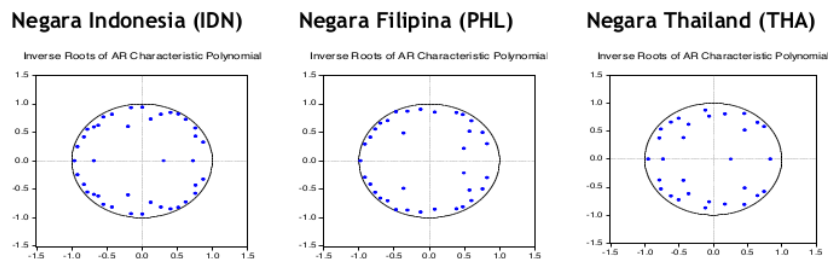
Indonesia (IDN)	8	42.59685*	1.53e-07*	-2.838374*	4.194893	-0.076936*
Filipina (PHL)	7	39.53401*	4.54e-11*	-10.40767*	-4.284431	-7.999372*
Thailand (THA)	6	39.42068*	4.33e-10*	-7.814985*	-2.586440	-5.755197

Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019
Keterangan: Tanda *= indicates lag order selected by the criterion

Berdasarkan pada tabel 5.2 maka diperoleh informasi bahwa *lag* optimal di Negara Indonesia berada pada *lag* kedelapan, sedangkan Negara Filipina berada pada *lag* ketujuh, dan Negara Thailand *lag* optimalnya berada pada *lag* keenam.

3.3. Hasil Uji Stabilitas

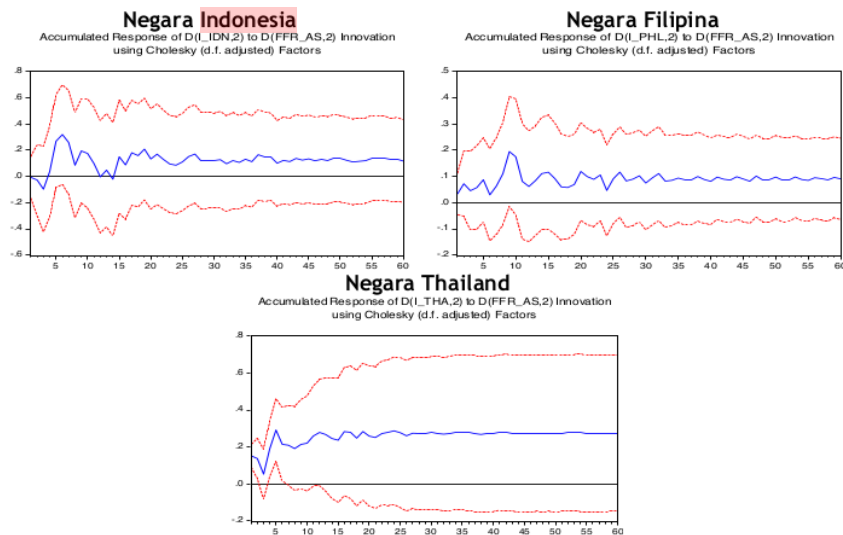
Sebelum melakukan estimasi *Impulse Response Function* (IRF) dan uji *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) maka perlu dilakukan uji stabilitas model terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar memastikan bahwa hasil dari analisis *Impulse Response Function* (IRF) dan uji *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) telah valid. Menurut (Rosadi, 2012) data dikatakan stabil apabila semua akar dari fungsi polinomial (*roots of characteristic polynomial*) memiliki nilai absolut di bawah satu (lebih kecil dari satu) atau semua akar berada di dalam *unit circle*.



Gambar 5.2 Hasil Uji Stabilitas di Negara ASEAN-3
Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Berdasarkan pada Gambar 5.2 dapat disimpulkan bahwa model estimasi SVAR yang ditemukan pada Negara Indonesia, Filipina, dan Thailand telah stabil. Hal ini dikarenakan semua data telah berada dalam *unit circle*, sehingga cukup valid untuk digunakan dalam proses uji analisis *Impulse Response Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD).

3.4. Dampak *Federal Fund Rate* (FFR) Terhadap Suku Bunga Kebijakan (*Interest Policy Rate*) di Negara ASEAN-3



Gambar 5.3 Grafik *Impulse Respon Function* (IRF) Suku Bunga Kebijakan di Negara ASEAN-3 Terhadap *Structural Shock Federal Fund Rate* (FFR)
 Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Berdasarkan hasil *Impulse Respon Function* (IRF) kumulatif yang ditunjukkan pada Gambar 5.3 diperoleh informasi bahwa respons suku bunga kebijakan Negara Indonesia (I_IDN) pada saat adanya guncangan satu standar deviasi (*standard deviation shock*) dari *Federal Fund Rate* (FFR) sempat merespons secara negatif selama tiga kuartal dengan respon negatif tertinggi terjadi di kuartal atau periode ke-3 sebesar 0,097 persen. Suku bunga kebijakan Negara Indonesia baru merespons secara positif setelah tiga kuartal dan respon positif ini berlangsung hingga akhir periode dengan respon positif tertinggi sebesar 0,319 persen terjadi di kuartal ke-6. Sementara respon suku bunga kebijakan Negara Filipina (I_PHL) dan Negara Thailand (I_THA) selama 60 kuartal atau periode merespons secara positif dengan respon positif tertinggi di Negara Filipina terjadi di kuartal ke-9 sebesar 0,195 persen, sedangkan untuk Negara Thailand terjadi di kuartal ke-5 mencapai 0,291 persen.

Hasil pengujian *Impulse Response Function* (IRF) yang ditunjukkan oleh Gambar 5.3 Disadari bahwa pengaruh *Government Subsidizes Rate* (FFR) terhadap tarif premium strategy di Indonesia, Filipina, dan Thailand secara total dijawab dengan tegas. Oleh karena itu, efek samping dari penelitian ini dapat diandalkan dengan hipotesis ekonomi terbuka yang diajukan oleh Warjiyo & Solikin (2003), hipotesis ini menyatakan bahwa penerapan pendekatan terkait uang untuk situasi ini pengaturan biaya pinjaman di negara-negara yang menganut sedikit perekonomian terbuka. kerangka. ekonomi) seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand tidak bisa bekerja dengan bebas. Kebebasan yang

disinggung dalam penelitian ini terkait dengan kemampuan bank nasional untuk melakukan pendekatan money related tanpa kejengkelan mulai dari perubahan shock luar. Oleh karena itu, mengingat hasil yang tepat ini, ini menunjukkan bahwa bank-bank nasional di tiga negara umumnya akan mengikuti pilihan pengaturan pengatur terkait uang dunia dan dalam penelitian ini diperkenalkan pendekatan biaya pinjaman AS, khususnya Government Subsidizes Rate (FFR).

Selain itu, hasil uji Motivasi Reaksi Kapasitas (IRF) juga menegaskan bahwa otoritas keuangan saat memutuskan tingkat pendekatan premi tidak hanya melihat keadaan ekonomi dalam negeri, tetapi juga perlu mempertimbangkan perkembangan Tarif Subsidi Pemerintah. (FFR) biaya pinjaman. Hal ini dapat terjadi mengingat menyatunya Provinsi Indonesia, Filipina, dan Thailand ke dalam asosiasi Hubungan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi melalui pengembangan aliran modal yang bebas, dengan tujuan agar kondisi ini ditetapkan. Disangkal lemahnya pertukaran modal antar negara dengan asumsi ada perkembangan biaya pembiayaan dunia untuk situasi ini tercermin dari Tingkat Dukungan Pemerintah (FFR).

Omar (2008) dalam Marschner & Ceretta (2021) menambahkan bahwa asumsi tentang perubahan biaya pinjaman dapat mempengaruhi pilihan yang berbeda, salah satunya adalah pilihan untuk berkontribusi. Oleh karena itu, melalui penjelasan tersebut, ketika terjadi perkembangan biaya pembiayaan Government Supports Rate (FFR), menjadi salah satu pertimbangan signifikan bagi para financial backer untuk menempatkan modal asingnya di AS. Dengan asumsi Tingkat Dukungan Pemerintah (FFR) diperbaiki, ia akan memiliki saran untuk memperluas perbedaan antara biaya pinjaman lokal dan biaya pinjaman dunia, yang dikenal sebagai (diferensial biaya pinjaman). Perbedaan biaya pinjaman ini akan mempengaruhi perkembangan aset antar negara yang pada akhirnya akan memicu lonjakan modal di Indonesia, Filipina, dan Thailand karena para pendukung keuangan akan berusaha untuk memindahkan spekulasi mereka ke AS untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Hasil pengamatan ini juga menegaskan bahwa reaksi suku bunga strategi premium di Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pengaturan terkait uang ketika terjadi shock standar deviasi dari Government Supports Rate (FFR). menunjukkan bahwa salah satu dampak dari strategi penularan yang dikenal dengan strategi virus dimulai dari Amerika Serikat, khususnya Thailand dan Indonesia. Selanjutnya, akibat dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dipimpin oleh Edwards (2015) bahwa negara-negara Amerika Latin yang terdiri dari Chili, Kolombia, dan Meksiko juga mengalami dampak dari strategi virus mulai dari AS, sehingga secara tidak langsung, Efek sampingnya Konsentrat ini juga memperkuat pernyataan Edwards (2015) yang mempertanyakan standar model tradisional, di mana model ini menyatakan bahwa salah satu manfaat mendasar dari menjalankan kerangka skala swapping free drifting adalah bahwa negara yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendekatan keuangannya sendiri (otonom).

Hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini antara lain penelitian yang diarahkan oleh Oladunni (2019) yang menganalisis dampak dari guncangan asing termasuk Government Finances Rate (FFR) yang hasilnya menunjukkan

bahwa penetapan Tingkat Dukungan Birokrasi (FFR) dijawab dengan pasti oleh biaya pinjaman lokal. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi lonjakan modal. Chileshe et al. (2018) juga menganalisis dampak guncangan luar di Zambia, hasil menunjukkan bahwa ada pola yang wajar bahwa pendekatan biaya pinjaman Zambia mengikuti perkembangan biaya pinjaman AS. Apalagi penelitian yang dipimpin oleh Retnasih et al. (2016) juga memberikan hasil yang sebanding bahwa strategi biaya pinjaman Wilayah Indonesia menunjukkan reaksi positif dan menunjukkan hubungan dengan penerapan pendekatan biaya pembiayaan AS untuk situasi ini Tingkat Aset Pemerintah (FFR).

Tabel 5.3 Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Suku Bunga Kebijakan (Interest Policy Rate) di Negara ASEAN-3

Periode (Kuartal)	Suku Bunga Kebijakan (Interest Policy Rate)														
	FFR			I			NT			IF			Y		
	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA
1	0.01	1.12	32.32	99.98	98.87	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	10.74	2.76	40.39	64.09	54.33	39.22	3.20	22.31	12.48	15.43	9.90	3.76	6.52	10.69	4.12
12	14.98	6.22	36.61	54.26	40.60	39.68	6.95	28.15	14.37	15.29	12.90	4.32	8.50	12.11	5.00
18	16.87	6.15	35.83	51.67	39.55	38.17	8.49	29.66	15.65	15.42	13.04	5.35	7.52	11.58	4.98
24	17.00	7.03	35.81	49.77	39.14	38.04	8.68	29.12	15.72	17.24	13.15	5.47	7.30	11.53	4.92
30	17.02	7.65	35.74	49.58	38.26	37.79	8.80	29.53	15.76	17.23	13.06	5.75	7.35	11.47	4.93
36	17.00	7.75	35.63	49.50	38.37	37.79	8.87	29.02	15.88	17.20	13.39	5.74	7.41	11.45	4.95
42	17.29	7.79	35.59	49.26	38.48	37.80	8.84	28.89	15.88	17.18	13.35	5.75	7.40	11.46	4.95
48	17.27	7.86	35.57	49.16	38.17	37.80	8.87	29.10	15.89	17.30	13.23	5.76	7.38	11.62	4.96
54	17.27	7.87	35.56	49.16	38.15	37.80	8.86	28.94	15.90	17.31	13.36	5.76	7.38	11.65	4.96
60	17.30	7.88	35.56	49.12	38.22	37.79	8.87	28.85	15.90	17.30	13.37	5.76	7.38	11.65	4.96

Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Keterangan: FFR= Federal Fund Rate, I= Suku Bunga Kebijakan (Interest Policy Rate), NT= Nilai Tukar, IF= Inflasi, Y= Pertumbuhan Ekonomi, IDN= Indonesia, PHL= Filipina, dan THA= Thailand

Sementara itu, mengingat efek samping dari pengaturan biaya pembiayaan FEVD yang ditampilkan pada Tabel 5.3 cenderung diungkapkan bahwa pengaruh *Federal Fund Rate* (FFR) terhadap tingkat strategi premium di Thailand dan Indonesia sangat penting dan selamanya besar. dalam jangka panjang mengingat komitmen yang diberikan oleh *Federal Fund Rate* (FFR) untuk sisa periode memiliki opsi untuk di atas 10% dimana komitmen yang diberikan oleh *Federal Fund Rate* (FFR) dalam arti yang wajar. varians/elemen perubahan biaya pembiayaan strategi di Indonesia menjelang akhir periode adalah 17,30 persen, sedangkan untuk Thailand, *Federal Fund Rate* (FFR) dapat memaknai bimbang/elemen perubahan keuntungan terbesar Thailand. tarif menjelang akhir periode sebesar 35,56 persen. Lain halnya dengan Filipina, dimana komitmen *Federal Fund Rate* (FFR) dalam mempengaruhi kebimbangan/elemen perubahan strategi biaya pinjaman Filipina kecil karena selama sisa periode tersebut menyumbang 7,88 persen. hanya mampu. Oleh karena itu, pengaruh *Federal Fund Rate* (FFR) dapat dinyatakan kurang signifikan dalam memahami kebimbangan/elemen perubahan dalam pendekatan biaya pinjaman Filipina.

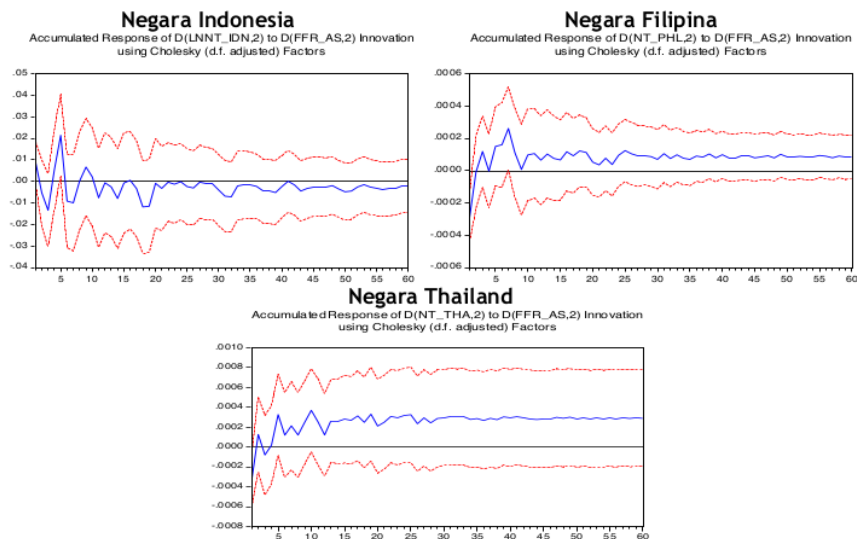
Perbedaan komitmen *Federal Fund Rate* (FFR) terhadap kebimbangan/elemen perubahan tingkat pendekatan premi di ketiga negara tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbedaan tingkat transparansi moneter, baik mengenai kurs maupun uang. Berdasarkan laporan *Global Index of Economic Openess* (2019), terlihat bahwa daya terima keuangan di Thailand lebih baik dari Indonesia dan Filipina, dimana pada tahun 2019 Thailand memiliki opsi untuk peringkat 66, sedangkan Indonesia berada di posisi 68 dan Filipina. hanya diposisikan ke-79 dari seluruh dunia.

Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab tidak signifikan atau tidak materialnya komitmen Government Rate (FFR) dalam mempengaruhi keseimbangan/elemen perubahan biaya pembiayaan pengaturan (premium strategy rate) di Filipina. Oleh karena itu, temuan yang tepat ini juga menunjukkan bahwa perbedaan derajat juga menjadi bagian penting dalam menentukan besar lemahnya suatu negara ketika terjadi guncangan dari tatanan keuangan dunia (Government Asset Rate/FFR).

Ekplorasi masa lalu juga menunjukkan hasil yang sebanding seperti pemeriksaan yang diarahkan oleh Oladunni (2019) yang menganalisis dampak guncangan asing termasuk Tingkat Dukungan Pemerintah (FFR) di mana hasil menunjukkan bahwa penetapan Tingkat Keuangan Birokrasi (FFR) dijawab dengan pasti oleh lokal. biaya pinjaman. untuk mengimbangi aliran modal. Akibatnya, cenderung diungkapkan bahwa reaksi positif dari biaya pembiayaan strategi di Indonesia, Filipina, dan Thailand menunjukkan upaya yang dilakukan oleh bank nasional sebagai kekuatan terkait uang untuk membatasi konsekuensi yang merugikan karena guncangan dunia yang ditunjukkan oleh penetapan Tingkat Dukungan Pemerintah (FFR). Seperti itu, bank nasional akan menjawabnya dengan mengikuti perkembangan biaya pinjaman AS.

Tidak hanya itu, Chileshe et al., (2018) juga menganalisis dampak guncangan luar di Zambia, hasilnya menunjukkan bahwa ada pola yang jelas bahwa biaya pinjaman strategi Zambia mengikuti perkembangan biaya pembiayaan AS. Selain itu, penelitian yang diarahkan oleh Retnasih et al., (2016) juga memberikan hasil komparatif bahwa strategi biaya pinjaman Negara Indonesia menunjukkan reaksi positif dan menunjukkan hubungan dengan pelaksanaan pengaturan biaya pembiayaan AS untuk situasi ini Tingkat Aset Pemerintah (FFR).

3.5. Dampak *Federal Fund Rate* (FFR) Terhadap Nilai Tukar di Negara ASEAN-3



Gambar 5.4 Grafik *Impulse Respon Function (IRF)* Nilai Tukar di Negara ASEAN-3 Terhadap *Structural Shock Federal Fund Rate (FFR)*

Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Berdasarkan pada hasil *Impulse Respon Function (IRF)* kumulatif yang ditunjukkan pada Gambar 5.4 diperoleh informasi bahwa respon nilai tukar Negara Indonesia (LNNT_IDN) selama 60 periode atau kuartal cenderung merespon negatif dengan respon negatif tertinggi terjadi di kuartal ke-3 sebesar 0,01342 persen, sedangkan respon nilai tukar di Negara Filipina (NT_PHL) dan Negara Thailand (NT_THA) selama 60 kuartal cenderung merespon secara positif meskipun nilai tukar di kedua negara ini sempat merespon secara negatif. Respon nilai tukar Negara Filipina baru akan direspons setelah periode ke-2 dengan respons positif tertinggi terjadi di kuartal ke-7 sebesar 0,00026 persen. Sementara nilai tukar Negara Thailand baru akan direspons positif setelah periode ke-3 dengan respons positif tertinggi terjadi di kuartal ke-10 sebesar 0,00037 persen.

Dengan cara ini, reaksi negatif dari hasil skala konversi Indonesia stabil dengan hipotesis Global Fisher Impact (IFE) dan hipotesis Mundell-Fleming. Kondisi ini dapat terjadi karena bercampurnya suatu negara dengan negara yang berbeda, sehingga apabila terjadi penyesuaian strategi, misalnya penyempitan terkait uang dunia yang tercermin dari penetapan *Federal Fund Rate (FFR)* akan efektif memicu opini para pelaku pasar moneter dunia yang dengan demikian kondisi ini akan mempengaruhi perubahan perkembangan pendapatan, modal dan proteksi kemudian akan memicu terjadinya lonjakan modal di Wilayah Indonesia. Dampak dari pencurahan modal ini akan mempengaruhi tempat standar konversi di Indonesia. Dampak dari lonjakan modal ini akan mempengaruhi tempat skala konversi di Indonesia. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Andaiyani & Yuliana (2018), yang mengungkapkan

bahwa pasar moneter Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sektor bisnis moneter yang tidak dikenal, sehingga guncangan dimulai dari AS sebagai penetapan *Federal Fund Rate* (FFR). secara efektif akan menimbulkan keresahan di kalangan penyokong keuangan negara Indonesia yang pada akhirnya kondisi ini akan membuat uang Indonesia mengalami devaluasi.

Hal ini karena pada saat terjadi lonjakan modal dari perekonomian dalam negeri, tentunya akan membutuhkan transformasi dari uang dalam negeri menjadi uang asing (dolar AS), sehingga kondisi ini akan membangun minat uang tunai dolar AS di pasar perdagangan asing. untuk perdagangan tunai. buatan sendiri. Dengan demikian berdampak pada devaluasi atau melemahnya skala konversi asli uang dalam negeri seperti yang ditunjukkan oleh rupiah.

Selain itu, penetapan *Federal Fund Rate* (FFR) lagi-lagi juga akan merupakan pertaruhan bagi peningkatan minat di Indonesia, terutama bunga sebagai aset sementara oleh pihak asing seperti Spekulasi Portofolio. salah satunya adalah saham, sehingga usaha ini mempertimbangkan return profile dan hazard premium. Kondisi ini juga didukung oleh hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Andaiyani & Falianty (2017) yang menyatakan bahwa susunan kepemilikan saham negara Indonesia masih diliputi oleh para pendukung keuangan asing. Selanjutnya, Wilayah Indonesia sama sekali tidak berdaya menghadapi opini negatif ketika ada guncangan luar, misalnya penyempitan terkait uang dunia yang tercermin dari penetapan *Federal Fund Rate* (FFR).

Ini karena spekulasi ini mempertimbangkan profil pengembalian dan premi peluang, yang pada akhirnya para pendukung keuangan pasti akan berusaha memindahkan usaha mereka ke AS untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Dengan asumsi minat asing sebagai Spekulasi Langsung Tidak Dikenal tidak meningkat di Indonesia karena dampak lanjutan dari aliran modal, penetapan Tarif Subsidi Pemerintah (FFR) dengan demikian dapat mempengaruhi kekuatan skala konversi rupiah.

Pemeriksaan sebelumnya yang mendapatkan hasil komparatif, misalnya penelitian yang dipimpin oleh Bartholomew (2019) untuk melihat betapa lemahnya Negara Bagian Nigeria di titik di mana kejutan datang dari AS, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *Government Subsidize Rate* (FFR) menyebabkan skala konversi di Nigeria memburuk.

Sementara itu, sehubungan dengan reaksi skala konversi di Filipina dan Thailand, berdasarkan penemuan yang tepat ini, hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan. Reaksi positif ini menyiratkan bahwa nilai perdagangan di Filipina dan Thailand telah terapresiasi. Apresiasi skala swapping di kedua negara dapat dipicu oleh ketegangan pertukaran yang tak terhindarkan antara AS dan China yang diungkapkan oleh *World Economic Outlook* (2019), sehingga kehadiran pertentangan ini mempengaruhi kecepatan moneter. gerakan di AS dan Cina untuk menghadapi pembusukan. perlambatan yang sangat tajam. Terlebih lagi, tekanan pertukaran yang meningkat melukai opini dan kepastian pendukung keuangan untuk menempatkan sumber daya ke AS dengan memikirkan bahwa AS belum tercakup dalam kerentanan.

Tidak hanya itu, antusiasme untuk skala swapping di Filipina dan Thailand juga dapat didorong oleh proyeksi dari laporan *World Economic Outlook* (2019) yang menyatakan bahwa perkembangan negara-negara agraris sebenarnya terus meningkat dalam 2019 sebesar 3,9 persen dan meningkat pada 2020 menjadi 4,6

persen, sedangkan pembangunan negara-negara maju, misalnya, AS diperpanjang oleh IMF untuk tetap menunjukkan kemacetan.

Sejalan dengan itu, laporan ini memiliki opsi untuk memberikan opini positif kepada Filipina dan Thailand, selain itu perasaan positif tersebut dapat membatasi lonjakan modal dari ekonomi dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari asumsi bahwa peso dan baht dipandang sebagai sumber daya yang dilindungi oleh banyak pendukung keuangan dibandingkan dengan dolar AS, sehingga nilai perdagangan di Filipina dan Thailand dihargai lebih tinggi daripada dolar AS dan dampak berikut adalah skala konversi di Filipina dan Thailand.

Pernyataan ini juga didukung oleh laporan otoritas *Asian Economic Integration 2019/2020* (2019) di mana Unfamiliar Direct Interest di Thailand mengalami perkembangan besar, yang pada dasarnya disumbangkan oleh Greenfield FDI (unfamiliar interest as foundation). bahkan Thailand menarik banyak spekulasi di antara 10 keberatan utama Asia untuk Unfamiliar Direct Venture di seluruh dunia. Selain itu, Investasi Langsung di Thailand juga meningkat untuk tahun ini sebesar 249,2 persen.

Sementara itu, untuk Filipina, seperti yang ditunjukkan oleh laporan *Philippines Economic Update* (2019), disposisi yang lebih malu-malu dari Bank Sentral AS telah menjadi komponen pendorong bagi masuknya modal dunia ke Filipina dan perbaikan kondisi pendanaan dari luar juga telah menambah arus masuk aliran modal di seluruh dunia. modal di seluruh dunia, terutama dalam Spekulasi Portofolio, sehingga semua Filipina akan mendapat untung dari arus masuk modal di seluruh dunia ini.

Ekspansi arus masuk modal di Thailand dan Filipina secara positif merupakan salah satu faktor yang membuat skala konversi di kedua negara ini tetap berada di area yang kuat untuk ditunjukkan atau diapresiasi. Hasil eksperimen ini juga menegaskan bahwa pendukung keuangan percaya pada kekuatan kerangka skala swapping di Thailand dan Filipina di pasar keuangan. Pemeriksaan sebelumnya juga menunjukkan hasil yang sebanding seperti eksplorasi yang diarahkan oleh Chen & Tsang (2020) dan Nizamani et al., (2017).

Tabel 5.4 Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Nilai Tukar di Negara ASEAN-3

Periode (Kuartal)	Nilai Tukar														
	FFR			I			NT			IF			Y		
	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA
1	6.02	20.88	9.57	20.59	0.01	1.04	73.37	79.10	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	31.7	18.73	17.02	15.50	21.40	4.33	31.08	52.71	70.58	19.80	6.11	3.22	1.86	1.03	4.83
18	29.22	17.41	16.44	22.07	23.05	5.39	25.38	48.23	63.34	20.70	8.40	7.31	2.62	2.89	7.50
24	29.76	16.75	16.57	22.11	22.56	5.87	24.74	47.23	62.37	20.44	10.16	7.36	2.92	3.28	7.80
30	29.17	16.36	16.70	22.49	22.49	6.11	25.16	46.20	61.53	20.30	11.54	7.59	2.86	3.38	8.04
36	29.21	16.32	16.59	22.51	22.84	6.26	25.14	45.85	61.37	20.25	11.48	7.58	2.87	3.49	8.17
42	29.25	16.31	16.58	22.44	22.70	6.30	25.16	45.94	61.21	20.24	11.52	7.65	2.88	3.51	8.23
48	29.28	16.23	16.56	22.47	22.70	6.33	25.14	45.92	61.15	20.19	11.61	7.66	2.88	3.51	8.27
54	29.32	16.21	16.55	22.52	22.84	6.34	25.09	45.75	61.12	20.15	11.65	7.67	2.89	3.53	8.29
60	29.30	16.20	16.55	22.55	22.83	6.34	25.09	45.72	61.11	20.14	11.66	7.68	2.89	3.56	8.30

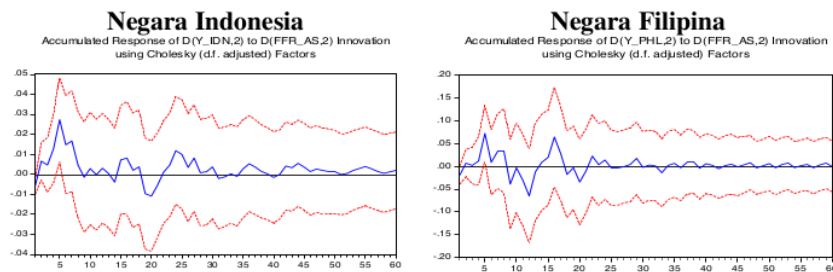
Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Keterangan: FFR= *Federal Fund Rate*, I= Suku Bunga Kebijakan (*Interest Policy Rate*), NT= Nilai Tukar, IF= Inflasi, Y= Pertumbuhan Ekonomi, IDN= Indonesia, PHL= Filipina, dan THA= Thailand

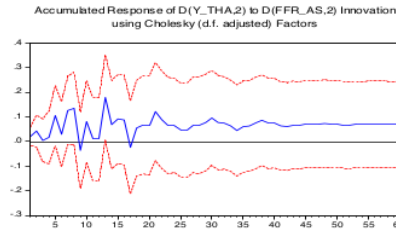
Apabila dilihat dari hasil FEVD nilai tukar yang ditunjukkan pada Tabel 5.4 maka dapat dinyatakan bahwa kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) dalam menjelaskan fluktuasi/dinamika perubahan nilai tukar di Negara Indonesia, Filipina, dan Thailand hingga akhir periode tepatnya di periode ke-60 memiliki dampak yang berarti atau signifikan dalam jangka panjang. Hal ini didasari besaran variansi dari kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) hingga akhir periode mampu menyumbang lebih dari sepuluh persen, di mana kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) dalam menjelaskan fluktuasi/dinamika perubahan nilai tukar di Negara Indonesia di periode ke-60 sebesar 29,30 persen, Negara Filipina sebesar 20,88 persen, dan Negara Thailand sebesar 16,55 persen.

Dapat dikatakan bahwa melalui hasil FEVD nilai tukar memiliki dampak *Federal Fund Rate* (FFR) dalam memengaruhi fluktuasi/dinamika perubahan nilai tukar di Negara Indonesia, Filipina, dan Thailand memiliki dampak yang berarti atau signifikan dalam jangka panjang. Hal ini didasari besaran variansi dari kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) hingga akhir periode mampu menyumbang lebih dari sepuluh persen. Terutama untuk Indonesia kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) memiliki peran yang dominan dibandingkan variabel endogen lainnya.

3.6. Dampak *Federal Fund Rate* (FFR) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-3



Negara Thailand



Gambar 5.5 Grafik *Impulse Respon Function* (IRF) Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-3 Terhadap *Structural Shock Federal Fund Rate* (FFR)
Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Berdasarkan hasil *Impulse Respon Function* (IRF) kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat *output* yang ditunjukkan pada Gambar 5.5 bahwa adanya guncangan satu standar deviasi (*standard deviation shock*) dari *Federal Fund Rate* (FFR) direspons berfluktuatif oleh output Negara Indonesia (Y_IDN) selama 29 periode dan di periode ke-30 responsnya menuju ke titik keseimbangan (konvergen). Output Negara Indonesia (Y_IDN) secara stabil merespons positif setelah periode ke-20 dengan respons positif tertinggi terjadi di periode ke-5 sebesar 0,027 persen.

Apabila dilihat dari respons output Negara Filipina (Y_PHL) cenderung bergerak secara fluktuatif selama 30 kuartal kemudian di periode berikutnya respons ini mulai menunjuk ke titik keseimbangan (konvergen). Respons positif tertinggi dari output Negara Filipina (Y_PHL) terjadi di kuartal ke-5 mencapai 0,072 persen kemudian di periode berikutnya respons output Negara Filipina (Y_PHL) masih berfluktuasi tetapi cenderung positif hingga akhir periode. Sementara itu, respons output Negara Thailand (Y_THA) selama 60 periode yang diamati cenderung merespons secara positif dengan respons positif tertinggi terjadi di kuartal ke-13 sebesar 0,179 persen.

Sejalan dengan itu, terdapat reaksi positif di Indonesia, Filipina, dan Thailand sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis Mundell-Fleming sebagai lanjutan dari hipotesis perkembangan Keynes, dimana hipotesis Mundell-Fleming menyatakan bahwa strategi penarikan biaya pembiayaan dunia untuk situasi ini *Federal Found Rate* (FFR) akan memiliki konsekuensi negatif bagi perkembangan moneter (*yield*) melalui skala *swapping*.

Pada dasarnya, ketika ada penyesuaian strategi, untuk situasi ini, tekanan keuangan dunia yang tercermin dari penetapan *Federal Found Rate* (FFR) akan memicu curahan modal. Namun, secara khusus untuk Thailand dan Filipina, terjadi sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan pertukaran yang tegang tak terbantahkan termasuk Amerika Serikat dan China. Oleh karena itu, kondisi ini menyebabkan para financial backer bertanya-tanya apakah akan memasukkan sumber daya ke AS atau tidak karena AS masih rentan terhadap kerentanan seperti yang digambarkan dalam variabel skala konversi, sehingga konsekuensi dari konsentrat ini juga menunjukkan *Federal Found Rate* (FFR) benar-benar mewujudkan standar konversi. dihargai di Thailand dan Filipina.

Antusiasme skala konversi di Thailand dan Filipina, yang didorong oleh masuknya modal dunia ke dalam ekonomi lokal, terutama dari Unfamiliar Direct Venture dan Portofolio Speculation, terus menunjukkan eksekusi yang luar biasa. Oleh karena itu, penguatan (antusiasme) nilai tukar perdagangan Thailand dan Filipina terhadap dolar AS sangat mempengaruhi perekonomian. Ini tidak dapat dipisahkan bahwa ketika nilai skala swapping yang dipicu oleh ekspansi spekulasi, organisasi akan memperoleh lebih banyak arus kas untuk dikirim dan digabungkan dengan biaya barang dagangan asing yang lebih murah, sehingga organisasi dapat menciptakan tenaga kerja dan produk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lokal. perlu mengingat bahan mentah yang diimpor dan oleh karena itu kondisi ini sebenarnya ingin meningkatkan efisiensinya.

Hal ini karena sumber informasi yang lebih murah, efisiensi dapat menunjukkan peningkatan dan dibarengi dengan biaya yang lebih rendah, sehingga daya beli individu secara keseluruhan juga meningkat dan dampak selanjutnya dari kondisi ini akan mendukung ekspansi dalam latihan moneter dalam negeri baik penciptaan, pemanfaatan, dan sirkulasi. Jika aksi finansial bisa berjalan dengan baik. Artinya, ada tanda-tanda roda perekonomian dalam negeri dapat berputar dengan baik dan pada akhirnya imbal hasil meningkat, pada akhirnya perkembangan moneter juga meluas.

Untuk sementara, khusus untuk Wilayah Indonesia, penetapan Government Supports Rate (FFR) menyebabkan standar konversi mengalami devaluasi. Namun, perkembangan atau hasil keuangan benar-benar dijawab dengan tegas atau mengalami peningkatan. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh hipotesis Mundell-Fleming, ketika terjadi penarikan strategi terkait uang dunia yang tercermin dalam penetapan *Federal Found Rate* (FFR) akan menyebabkan capital outpouring sehingga spekulasi dalam negeri menurun yang mendorong penurunan perkembangan atau hasil moneter.

Devaluasi rupiah yang dipicu oleh lonjakan modal di Indonesia karena penetapan *Federal Found Rate* (FFR), kondisi ini akan membuat organisasi sulit untuk menciptakan tenaga kerja dan produk dalam negeri mengingat impor bahan mentah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana penurunan skala swapping pada dasarnya menunjukkan penurunan nilai uang tunai asli dalam negeri terhadap dolar AS, sehingga saat membeli komponen mentah yang diimpor dari luar negeri, diperlukan lebih banyak uang dalam negeri.

Namun demikian, menurut Salvatore (2012) dalam Oktaviani et al., (2019) dampak penurunan nilai tukar juga dapat meningkatkan hasil melalui latihan pengiriman karena ketika standar konversi memburuk, kondisi ini dapat membangun keseriusan dua tenaga kerja dan produk di pasar global. Hal ini karena skala konversi yang mendevaluasi membuat tenaga kerja dan produk dalam negeri menjadi lebih populer karena lebih masuk akal daripada yang berasal dari luar negeri. Reaksi selanjutnya adalah bunga dari luar negeri (outer interest) telah berkembang yang dengan demikian akan membuat ekspansi pada hasil.

Namun, adanya situasi dunia yang merepotkan karena hubungan pertukaran yang semakin tegang antara AS dan China, menyebabkan penurunan perkembangan keuangan di negara-negara maju, khususnya di AS, yang baru mencapai 1,7 persen. Akibatnya, melemahnya pertumbuhan moneter

menunjukkan bahwa minat luar untuk tenaga kerja dan produk lokal juga mengalami penurunan.

Hal ini tergambar dalam laporan otoritas Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia (2019) yang menyatakan bahwa eksekusi produk Wilayah Indonesia semakin berkurang, khususnya untuk komoditas usaha penanganannya, sehingga kondisi ini juga berdampak pada penurunan impor komoditas. zat modern yang tidak dimurnikan yang menyusut 4,5 persen. Selanjutnya, melalui hasil eksperimen ini, menunjukkan bahwa peningkatan yield di Indonesia tidak diperoleh dari outer interest seperti yang tercermin dalam latihan-latihan send out, namun peningkatan yield yang terjadi di Indonesia masih ditopang oleh daerah moneter dalam negeri, khususnya dari pertukaran yang dikembangkan lebih lanjut antara lokal. pemanfaatan rahasia homegrown dan pemanfaatan keluarga homegrown tetap solid. Sesuai laporan Laporan Perekonomian Indonesia (2019), pemanfaatan rahasia berkembang sebesar 5,16 persen sedangkan pemanfaatan dari keluarga berkembang sebesar 5,04 persen. Hal ini tidak lepas dari bantuan pemerintah dengan jenis Bantuan Sosial (BANSOS) sehingga bantuan ini dapat membangun daya beli masyarakat yang dengan demikian dapat meningkatkan hasil panen di Provinsi Indonesia.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil komparatif seperti penelitian yang diarahkan oleh Barthholomew (2019), hasilnya adalah strategi kontraksi yang dilakukan oleh The Fed memberikan pola imbal hasil yang positif di Nigeria. Tidak hanya itu, eksplorasi yang dipimpin oleh Ha & So (2019) juga mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga Kanada juga menunjukkan efek positif ketika ada guncangan dari *Federal Found Rate* (FFR).

Tabel 5.5 Hasil *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-3

Periode (Kuartal)	Pertumbuhan Ekonomi														
	FFR			I			NT			IF			Y		
	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA
1	10.53	5.94	1.71	0.04	3.63	3.96	0.97	0.53	9.03	0.00	31.59	0.97	88.44	58.28	84.31
6	24.09	32.11	21.88	37.00	1.786	9.96	6.27	2.102	20.13	12.37	24.99	4.81	20.23	39.00	43.19
12	19.48	21.76	42.67	38.71	30.25	12.35	11.13	14.12	20.22	13.46	16.91	3.85	17.20	16.94	20.88
18	16.26	18.27	50.20	41.71	26.16	16.13	11.08	19.49	15.13	18.53	19.08	4.32	12.39	16.99	14.19
24	17.56	18.43	46.39	39.41	26.96	19.40	11.79	19.57	14.98	19.15	18.96	6.42	12.05	16.05	12.79
30	17.72	18.14	44.87	37.28	27.05	20.01	12.98	20.33	16.02	19.28	18.60	6.64	12.72	15.85	12.44
36	17.80	18.07	44.38	36.65	26.72	20.30	13.61	20.42	16.34	19.40	18.32	6.58	12.52	16.44	12.39
42	17.94	18.21	44.22	36.57	26.53	20.46	13.63	20.41	16.33	19.33	18.35	6.61	12.50	16.49	12.36
48	17.98	18.23	44.18	36.53	26.44	20.48	13.65	20.30	16.35	19.30	18.48	6.62	12.53	16.53	12.35
54	17.98	18.27	44.15	36.56	26.40	20.48	13.65	20.32	16.36	19.26	18.43	6.63	12.53	16.55	12.35
60	17.96	18.27	44.14	36.60	26.28	20.48	13.67	20.35	16.37	19.22	18.43	6.63	12.52	16.64	12.35

Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

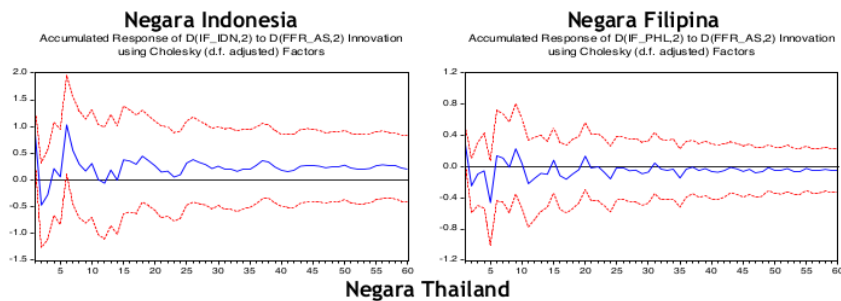
Keterangan: FFR= *Federal Fund Rate*, I= Suku Bunga Kebijakan (*Interest Policy Rate*), NT= Nilai Tukar, IF= Inflasi, Y= Pertumbuhan Ekonomi, IDN= Indonesia, PHL= Filipina, dan THA= Thailand

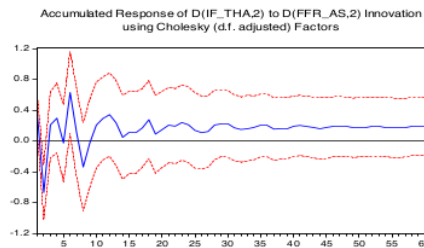
Apabila dilihat dari hasil FEVD pertumbuhan ekonomi untuk mencerminkan *output* yang ditunjukkan pada Tabel 5.5 maka dapat dinyatakan bahwa kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) Dalam artian kebimbangan/elemen perubahan hasil di Indonesia, Filipina, dan Thailand selama sisa periode, tepatnya pada periode ke-60, memiliki efek yang besar atau kritis dalam jangka panjang. Hal ini tergantung pada seberapa jauh perbedaan komitmen *Federal*

Fund Rate (FFR) untuk sisa periode yang memiliki opsi penawaran lebih dari 10%, dimana komitmen *Federal Fund Rate* (FFR) dalam artian varians/unsur perubahan skala konversi di Indonesia pada periode 60 adalah 17,96 persen, Filipina 18,27 persen, dan Thailand 44,14 persen.

Sejalan dengan itu, melalui efek samping dari FEVD dari perkembangan atau hasil keuangan, cenderung diungkapkan bahwa pengaruh *Federal Fund Rate* (FFR) dalam mempengaruhi varians/elemen perubahan hasil di Indonesia, Filipina, dan Thailand memiliki pengaruh yang besar dan kritis dalam jangka panjang. Hal ini tergantung pada seberapa besar fluktuasi dari *Federal Fund Rate* (FFR) untuk sisa periode yang dapat menawarkan lebih dari 10%. Khusus untuk Thailand, komitmen dari *Federal Fund Rate* (FFR) lebih dominan dibandingkan dengan faktor endogen lainnya.

3.7. Dampak *Federal Fund Rate* (FFR) Terhadap Inflasi di Negara ASEAN-3





Gambar 5.6 Grafik *Impulse Respon Function* (IRF) Inflasi di Negara ASEAN-3 Terhadap *Structural Shock Federal Fund Rate* (FFR)
Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Berdasarkan pada hasil *Impulse Respon Function* (IRF) kumulatif inflasi dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat harga yang ditunjukkan pada Gambar 5.6 diperoleh informasi bahwa adanya guncangan satu standar deviasi (*standard deviation shock*) dari *Federal Fund Rate* (FFR) cenderung direspons positif oleh inflasi di Negara Indonesia dan Thailand, sedangkan di Negara Filipina cenderung direspons negatif.

Pada masa awal pemekaran, negara Indonesia (IF_IDN) bereaksi negatif. Padahal, pemekaran Negara Indonesia (IF_IDN) mungkin akan terjawab secara pasti setelah 3/4 dengan reaksi positif tertinggi mencapai 1,028 persen yang terjadi pada periode keenam dan reaksi positif ini akan berlangsung selama sisa periode.

Untuk sementara, reaksi ekspansi Thailand (IF_THA) sangat tidak terduga selama 10 periode. Meskipun demikian, setelah time frame kesepuluh, reaksi ekspansi Thailand (IF_THA) secara umum akan positif dan stabil pada kisaran 0,049-0,344 persen dengan reaksi positif terjadi pada keenam kalinya sebesar 0,631 persen. Hanya Filipina ketika ada kejutan standar deviasi dari Tingkat Keuangan Pemerintah (FFR) secara umum akan memiliki reaksi negatif terhadap ekspansi Negara Filipina (IF_PHL) selama 60 kerangka waktu yang diketahui, dengan reaksi negatif tertinggi terjadi pada kelima kalinya sebesar 0,461 persen.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, terlihat bahwa reaksi positif terhadap ekspansi di Indonesia dan Thailand sesuai dengan hipotesis yang digunakan. Efek positif ini dapat terjadi karena kualitas bangsa Indonesia dan Thailand dikenal dengan sistem ekonomi terbuka kecil dan juga didukung bahwa Indonesia dan Thailand berpegang pada sistem skala konversi drifting bebas, sehingga bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia dan Thailand tidak berdaya. dengan asumsi ada penyesuaian biaya pembiayaan dunia dalam penelitian ini diperkenalkan oleh *Government Asset Rate* (FFR).

Sementara itu, pelaksanaan pendekatan keuangan yang menyoroti *Expansion Focusing on System* (ITF) di kedua negara tersebut menyebabkan Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) sebagai *money related specialist* fokus pada biaya tetap. tingkat. Dengan demikian, kekuatan finansial akan membidik pada perkembangan tingkat ekspansi sesuai dengan tujuan pengganti. Adanya tanggung jawab tersebut merupakan salah satu elemen yang membuat bank nasional sebagai otoritas keuangan menjadi sangat peka terhadap perubahan

elemen dunia, misalnya ketika ada penyesuaian Government Supports Rate (FFR).

Pada dasarnya, ketika pengaturan terkait penarikan uang dunia tercermin dalam penetapan Government Subsidizes Rate (FFR) yang diselesaikan oleh The Fed sebagai bank nasional AS, maka akan ada saran untuk memperbesar perbedaan biaya pembiayaan antar negara (perbedaan biaya pinjaman) dan dalam hal tidak ada mediasi dari bank nasional. pengaturan dalam negeri untuk menaikkan biaya pinjaman, kondisi ini tentu akan memicu lonjakan modal di Indonesia dan Thailand karena para pendukung keuangan akan menempatkan modalnya di AS untuk memperoleh hasil yang lebih signifikan. Reaksi dari pelarian modal tersebut kemudian akan mempengaruhi posisi skala swapping (saluran standar konversi).

Hal ini dengan alasan bahwa ketika modal keluar dari perekonomian dalam negeri, tentunya akan membutuhkan transformasi dari uang tunai yang ditanam di dalam negeri menjadi uang asing, untuk situasi ini dolar AS sehingga kondisi ini akan membangun minat uang tunai dolar AS di pasar perdagangan asing untuk perdagangan uang. uang tunai rumahan. Dengan demikian, laju perdagangan Indonesia dan Thailand akan mengalami devaluasi. Sesuai Sugeng *et al.*, (2010) adanya perkembangan standar konversi secara komprehensif dapat mempengaruhi tingkat biaya melalui saluran transmisi yang berbeda, salah satunya adalah melalui *direct pass-through*. Dalam *direct pass-through*, perubahan skala swapping akan mempengaruhi biaya impor (dalam mata uang domestik).

Sejalan dengan itu, adanya dampak *pass-through* ini menyebabkan memburuknya skala konversi di Indonesia dan Thailand yang secara langsung dapat menambah beban biaya impor yang ditanggung oleh organisasi (merchant). Peralnya, harga bahan mentah yang diperoleh dari impor ternyata lebih mahal. Kemudian, untuk tetap memperhatikan manfaatnya, maka pada saat itu, masalah penurunan skala konversi akan diberikan kepada publik sehingga biaya tenaga kerja dan produk yang ditawarkan kepada publik akan meningkat.

Jika dilihat dari instrumen, hal ini sesuai dengan hipotesis pemuain primer. Hipotesis ini mengungkapkan bahwa ekspansi di suatu negara juga dapat dipicu oleh hubungan yang tidak dikenal melalui tingkat perdagangan yang tidak dikenal. Kondisi ini dapat terjadi karena negara Indonesia dan Thailand juga merupakan individu dari *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang juga mengikuti hubungan pertukaran dengan AS, sehingga ketika Pemerintah Subsidi Rate (FFR) diperbaiki oleh dan besar, itu akan melemahkan standar konversi di berbagai negara. buatan sendiri. Dampak berikut akan menyebabkan toko-toko perdagangan asing menjadi terbatas, dengan tujuan bahwa toko-toko perdagangan asing yang dibatasi menyebabkan kesulitan dalam mendanai impor komponen mentah dan modal yang dibutuhkan oleh organisasi, terutama untuk wilayah modern. Dengan demikian, total stok homegrown menjadi terbatas, kendala ini akan mempengaruhi kenaikan biaya dan ekspansi ekspansi di Indonesia dan Thailand. Pemeriksaan sebelumnya juga mendapatkan hasil yang sebanding bahwa pengaruh Tingkat Subsidi Pemerintah (FFR) terhadap ekspansi ternyata menunjukkan reaksi positif seperti yang dilakukan Oladunni (2019) dan Chileshe *et al.*, (2018).

Sementara itu, di Filipina, guncangan satu standar deviasi (shock standar deviasi) oleh Government Asset Rate (FFR) sangat berpengaruh buruk terhadap ekspansi, sehingga secara eksplisit bagi Filipina, akibat dari penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan. Kondisi ini dapat terjadi dengan alasan bahwa ketika ada penarikan dalam strategi terkait uang dunia yang tercermin dalam penetapan Government Subsidizes Rate (FFR) yang dilakukan oleh The Fed sebagai kekuatan finansial AS, akan mempengaruhi aliran modal. Secara khusus, itu akan mengurangi arus masuk di Filipina. Hal ini jelas dapat menyebabkan penurunan usaha dalam negeri dan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan total bunga.

Penurunan total bunga akan turun pada ekspansi. Penurunan minat total menyiratkan bahwa hal itu menunjukkan kelemahan daya beli individu yang dengan demikian akan mengurangi tingkat nilai tenaga kerja dan produk dalam negeri. Kondisi ini juga didukung oleh arus balik pergerakan keuangan di AS akhir-akhir ini seperti yang diumumkan oleh *World Economic Outlook* (2019), sehingga reaksi negatif terhadap tingkat ekspansi/biaya menunjukkan bahwa tindakan moneter di Filipina adalah demikian juga pelanggaran kembali sesuai dengan perekonomian dunia. Begitu pula dengan kualitas moneter Filipina yang dikenang karena perekonomiannya yang sedikit terbuka, sehingga perekonomiannya tidak terlepas dari dampak perekonomian dunia seperti AS. Eksplorasi masa lalu juga menunjukkan hasil komparatif, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Chen & Tsang (2020), Arwatchanakarn (2019), Barthholomew (2019), dan Retnasih et al., (2016).

Tabel 5.6 Hasil *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) Inflasi di Negara ASEAN-3

Periode (Kuartal)	Inflasi														
	FFR			I			NT			IF			Y		
	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA	IDN	PHL	THA
1	19.30	9.32	13.39	32.62	5.12	22.70	10.02	0.112	0.57	38.04	85.44	63.32	0.00	0.00	0.00
6	27.46	32.46	49.10	25.47	22.37	12.69	9.309	2.159	7.49	37.072	40.67	27.46	0.68	2.32	3.23
12	24.76	29.34	47.01	28.32	25.01	17.68	10.81	6.83	10.05	33.01	35.01	22.32	3.07	3.78	2.91
18	24.95	27.43	45.82	27.97	23.82	17.28	11.43	12.32	11.38	32.22	31.91	22.50	3.40	4.49	2.99
24	24.66	26.53	45.57	27.91	24.44	17.55	11.63	12.79	11.54	32.29	31.15	22.21	3.48	5.07	3.11
30	24.83	25.20	45.39	27.78	24.90	17.56	11.69	14.45	11.70	32.17	29.48	22.19	3.51	5.95	3.13
36	24.71	24.94	45.36	27.93	24.65	17.58	11.68	15.23	11.73	32.11	28.80	22.17	3.55	6.36	3.13
42	24.73	24.82	45.34	27.97	24.66	17.59	11.69	15.32	11.75	32.01	28.80	22.16	3.58	6.38	3.14
48	24.69	24.73	45.32	27.95	24.71	17.60	11.77	15.34	11.76	31.96	28.74	22.15	3.60	6.45	3.15
54	24.70	24.74	45.32	27.96	24.63	17.60	11.77	15.38	11.76	31.94	28.65	22.15	3.61	6.57	3.15
60	24.71	24.74	45.31	27.96	24.59	17.61	11.77	15.39	11.76	31.92	28.65	22.15	3.61	6.61	3.15

Sumber: Hasil olah data E-views 10, dari tahun 2002-2019

Keterangan: FFR= *Federal Fund Rate*, I= Suku Bunga Kebijakan (*Interest Policy Rate*), NT= Nilai Tukar, IF= Inflasi, Y= Pertumbuhan Ekonomi, IDN= Indonesia, PHL= Filipina, dan THA= Thailand

Apabila dilihat dari hasil FEVD inflasi untuk mencerminkan tingkat harga yang ditunjukkan pada Tabel 5.6 maka dapat dinyatakan bahwa kontribusi *Federal Fund Rate* (FFR) dalam menjelaskan fluktuasi/dinamika perubahan inflasi di Indonesia, Filipina, dan Thailand selama sisa periode, tepatnya pada periode 60, memiliki efek kritis atau besar dalam jangka panjang. Hal ini

tergantung pada seberapa jauh perbedaan komitmen *Federal Found Rate* (FFR) untuk sisa periode yang memiliki opsi penawaran lebih dari 10%, dimana *Federal Found Rate* (FFR) dalam artian kebimbangan/unsur perubahan standar konversi di Indonesia periode 60 adalah 24,71 persen, Filipina 24,74 persen, dan Thailand 45,31 persen.

Oleh karena itu, melalui konsekuensi ekspansi FEVD, cenderung diungkapkan bahwa pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) dalam mempengaruhi varians/elemen perubahan ekspansi di Indonesia, Filipina, dan Thailand memiliki pengaruh yang sangat besar dan kritis. dalam jangka panjang. Hal ini tergantung pada seberapa besar perubahan dari komitmen *Federal Found Rate* (FFR) untuk sisa periode yang dapat menawarkan lebih dari 10%. Khusus untuk Thailand, komitmen *Federal Found Rate* (FFR) lebih dominan dibandingkan dengan faktor endogen lainnya.

4. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil uji pemeriksaan IRF, diperoleh data bahwa pengaruh Government Subsidizes Rate (FFR) terhadap biaya pinjaman strategi adalah positif di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand).
 - Biaya pinjaman strategi Indonesia baru saja menjawab dengan tegas setelah 3/4 dan reaksi positif ini terus berlanjut hingga kuartal ke-60.
 - Tingkat strategi pendapatan Filipina menjawab dengan pasti selama 60 kuartal.
 - Biaya pembiayaan pengaturan Thailand dijawab dengan tegas selama 60 kuartal.

Terlebih lagi, mengingat konsekuensi dari uji investigasi FEVD, pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) mengambil bagian yang signifikan dalam memaknai perubahan pendekatan biaya pinjaman (premium arrangement rate) di Indonesia dan Thailand, sementara secara eksplisit untuk Filipina pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) kurang kritis. atau sekali lagi tidak relevan. Secara khusus, pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) lebih menonjol dalam memahami perbedaan dalam pendekatan biaya pinjaman (premium arrangement rate) di Thailand dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina.
- b. Berdasarkan hasil uji investigasi IRF, diperoleh data bahwa pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) terhadap biaya pinjaman strategi adalah positif di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand).
 - Nilai Tukar Indonesia menjawab dengan cara yang berfluktuasi selama lebih dari 10 kuartal. Meskipun demikian, setelah triwulan kesepuluh, reaksi skala konversi Indonesia secara umum akan negatif hingga triwulan ke-60.
 - Nilai Tukar Filipina baru akan menjawab dengan pasti setelah kuartal kedua dan reaksi positif ini akan terus berlanjut hingga kuartal ke-60.

- Nilai Tukar Thailand baru akan menjawab dengan pasti setelah kuartal ketiga dan reaksi positif ini akan terus berlanjut hingga kuartal ke-60.

Sementara itu, pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) terhadap perkembangan moneter positif di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand).

- Reaksi pembangunan moneter Indonesia selama 29 triwulan berjalan fluktuatif. Meskipun demikian, perkembangan keuangan Indonesia secara konsisten menjawab dengan tegas setelah kuartal kedua puluh.
 - Reaksi terhadap perkembangan moneter Filipina berfluktuasi selama 30 triwulan, meskipun pada triwulan berikutnya belum dapat diprediksi. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa reaksi terhadap perkembangan moneter Filipina secara umum akan positif hingga kuartal ke-60.
 - Reaksi perkembangan keuangan Filipina secara umum akan positif selama 60 kuartal, hal ini karena reaksi negatif baru terjadi selama dua kuartal, pasti pada kuartal kesembilan dan ketujuh belas.
- c. Berdasarkan hasil uji investigasi IRF, diperoleh data bahwa pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) terhadap biaya perjanjian pinjaman adalah positif di negara-negara ASEAN-3 (Indonesia, Filipina, dan Thailand).
- Pendekatan biaya pinjaman Indonesia baru saja menjawab dengan pasti setelah 3/4 dan reaksi positif ini terus berlanjut hingga kuartal ke-60.
 - Tingkat strategi pendapatan Filipina menjawab dengan tegas selama 60 kuartal.
 - Pendekatan biaya pinjaman Thailand dijawab dengan tegas selama 60 kuartal.

Selain itu, mengingat konsekuensi dari uji pemeriksaan FEVD, pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) berperan signifikan dalam memaknai kebimbangan dalam pengaturan biaya pinjaman (*premium strategy rate*) di Indonesia dan Thailand, sedangkan secara eksplisit untuk Filipina pengaruh *Federal Found Rate* (FFR) kurang kritis. atau sebaliknya tidak relevan.

5. Daftar Isi

- Andaiyani, S., & Falianty, T. A. (2017). Asean Credit Growth and Asset Price Response To Global Financial Cycle. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(2), 203-228.
- Andaiyani, S., & Yuliana, S. (2018). Co-movement In Asset Market: Does Global Financial Cycle Works? Empirical Evidence in Indonesia. *Proceedings Of the 4th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference*, 1(1), 652-658. <https://doi.org/10.5220/0008443606520658>
- Arif, M. M. AL, & Tohari, A. (2006). Peranan Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Fluktuasi

- Perekonomian Dunia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 145-178.
- Arwatchanakarn, P. (2019). *Monetary Policy Shocks and Macroeconomic Variables: Evidence from Thailand*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04263-9>
- ASEAN Statistical Yearbook 2010. (2010). In *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2017/03/ASYB_2010.pdf
- Asian Economic Integration Report 2019/2020. (2019). In *Asian Development Bank* (Issue November). <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1462945>
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Perekonomian Indonesia: Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/9_LPI2019.pdf
- Bartholomew, O. O. N. (2019). Measuring the Vulnerability of Nigerian Macroeconomy to Foreign Shocks: A Structural VAR Approach. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 10(3), 14-36. <https://doi.org/10.9790/5933-1003011436>
- Chalid, P. (2015). Teori Pertumbuhan. *Teori Dan Isu Pembangunan*.
- Chen, H., & Tsang, A. (2020). Impact of US Monetary Policy Rate Shock and other External Shocks on The Hong Kong Economy: A Factor - Augmented Vector Autoregression Approach. *Pacific Economic Review*, 25(1), 3-20. <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12262>
- Chileshe, P. M., Chisha, K., & Ngulube, M. (2018). The effect of external shocks on macroeconomic performance and monetary policy in a small open economy: Evidence from Zambia. *International Journal of Sustainable Economy*, 10(1), 18-40. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2018.088621>
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Starz, R. (2011). *Macroeconomics* (11th Editio, pp. 1-657). McGraw-Hill Companies.
- Edwards, S. (2015). Monetary Policy Independence under Flexible Exchange Rates: An Illusion? *World Economy*, 38(5), 773-787. <https://doi.org/10.1111/twec.12262>
- Ekananda, M. (2014). *Ekonomi Internasional*. Erlangga.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th Editio). McGraw-Hill Irwin.
- Ha, J., & So, I. (2019). Which Monetary Shocks Matter in Small Open Economies? Evidence from Canada. *SSRN Electronic Journal*, April. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901799>
- Juoro, U. (2014). Model Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian Terbuka Untuk Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 16(1), 81-97.

<https://doi.org/10.21098/bemp.v16i1.40>

- Kartini, S. (2019). *Mengenal Inflasi* (Ade (Ed.)). Mutiara Aksara.
- Legatum Institute. (2019). *Global Index of Economic Openess*.
- Madura, J. (2011). *International Financial Management* (Abridged 10, pp. 1-562). South-Western, a part of Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*, 9th Edition. In *Worth Publishers* (9th ed., p. 679).
- Marschner, P. F., & Ceretta, P. S. (2021). Investor Sentiment, Economic Uncertainty, and Monetary Policy in Brazil. *Revista Contabilidade & Financas*, 1-13. <https://doi.org/10.1590/1808-057x202113220>
- Nguyen, T. L. H., Tran, T. G., & Le, T. H. M. (2014). The Impact of External Shocks on Small Open Economies: Evidence from East Asian Countries. *International Journal of Economics and Finance*, 6(2), 206-217. <https://doi.org/10.5539/ijef.v6n2p206>
- Nizamani, A. R., Gilal, M. A., Khushik, A. G., Shah, S. M., & Abid, A. (2017). External Shocks and the Macroeconomic Response of Small Open Economy: A Structural-VAR Approach for Pakistan. *Asian Journal of Scientific Research*, 10(4), 336-344. <https://doi.org/10.3923/ajsr.2017.336.344>
- Nugroho, M. N., & Christian, M. (2018). *Liquidity Rebalancing*. Edisi III, 125-152.
- Oktaviani, S., Aimon, H., & Putri, D. Z. (2019). Analisis Variabel Moneter Amerika Serikat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Emerging Market. *Jurnal Kajian Dan Pembangunan*, 1(2), 223-240.
- Oladunni, S. (2019). External Shocks and Business Cycle Fluctuations in Oil-exporting Small Open Economies: The Case Nigeria. *Central Bank of Nigeria Journal of Applied Statistics*, 10(2), 39-71. <https://doi.org/10.33429/cjas.10219.2/6>
- Retnasih, N. R., Agustin, G., & Wulandari, D. (2016). Analisis Guncangan Eksternal Terhadap Indikator Moneter dan Makro Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(2), 101-113.
- Sugeng, Nugroho, M. N., Ibrahim, & Yanfitri. (2010). Pengaruh Dinamika Penawaran dan Permintaan Valas Terhadap Nilai Tukar Rupiah dan Kinerja Perekonomian Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 12(3), 312-353.
- Syarifuddin, F. (2015). Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia. In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI* (Issue 24, p. 101). BI Institute.
- Warjiyo, P., & Solikin. (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. In *Bank Indonesia* (Seri Keban, Issue 6). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

World Bank Group. (2019). *Philippines Economic Update: Resuming Public Investment, Fast Tracking Implementation* (Issue October).

World Economic Outlook: Adjusting to Lower Commodity Prices. (2015). In *International Monetary Fund* (Issue October).

World Economic Outlook: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers. (2019). *International Monetary Fund*, October.
<https://doi.org/10.4135/9781412952613.n572>

World Economic Outlook: Sustaining the Recovery (2009). In *International Monetary Fund* (Issue October).
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/>

BAB VI

INDUSTRI PERBANKAN ISLAM

(Analisis Komparasi Kinerja Pada Industri Perbankan Islam Indonesia dan Malaysia : Studi Pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI))

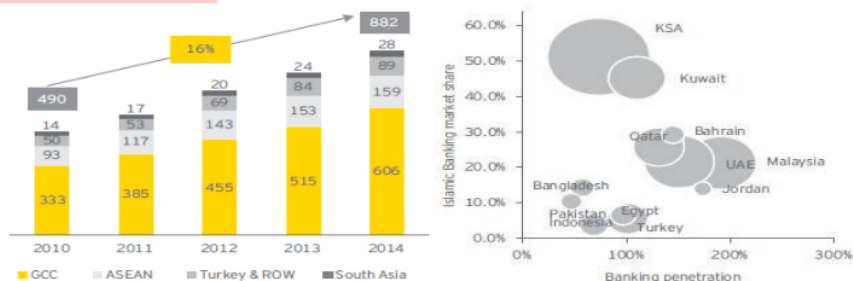
Oleh:

Andini Fiorentina Valentine; Suhel; Abdul Bashir

1. Pendahuluan

Kegiatan dalam ekonomi syariah yang sampai sekarang sedang berkembang adalah perbankan syariah, yang latihannya dan cara pelaksanaannya melibatkan standar syariah di dalamnya. Perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam memadukan, mengukur, dan lebih jauh lagi menyesuaikan berbagai komponen dalam suatu peristiwa. Perkembangan perbankan syariah telah mengisi dengan cepat dalam bisnis moneter, dengan cara ini memberikan jawaban bagi masyarakat umum di bidang administrasi moneter yang melakukan pertukaran tanpa meninggalkan syariat Islam.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang terletak di Kawasan Asia Tenggara di mana kawasan ini dikenang karena perkembangan industri dan keuangan Islam di dunia. Negara Indonesia dan Malaysia telah menjadi negara penggerak dengan perbaikan kerangka keuangan moneter syariah (Rama, 2015). Mengingat informasi terukur Ernst & Young (2016) dalam *World Islamic Banking 2013-2014* yang menyatakan bahwa ada perkembangan sumber daya yang lengkap dan *market share* di setiap negara sebesar 16% pada 2010-2014 selama lima tahun terakhir.



Gambar 6.1 Pertumbuhan Aset & Market Share Pada Perbankan Syariah
Sumber : *World Islamic Banking Competitiveness Report 2016*

Sumber daya perbankan mengalami perkembangan yang sangat tinggi pada tahun 2014 dengan *Gulf Cooperation Council (GCC)* di mana tingkat perkembangannya mencapai 34%. Dalam potongan kue bank syariah, pembangunan yang paling tinggi senilai 51,2 persen adalah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini. Malaysia adalah salah satu pertemuan dengan pengembangan kue terbesar di Asia Tenggara. Bank Islam utama di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BMB) pada tahun 1983. Terdapat 16 bank syariah pada tahun

2015 di Bank Negara Malaysia informasi dari informasi faktual (Ernst & Young, 2016) dan telah diungkapkan bahwa bangsa Malaysia untuk perkembangan sumber daya keuangan syariah pada tahun 2010 mencapai 3%.

Indonesia berada di posisi 6 setelah Malaysia, Iran, Arab Saudi, Bergabung dengan Emirat Badui dan Kuwait dan Indonesia mungkin dapat mendorong industri uang syariah pada tahun 2016 dalam evaluasi *Global Islamic Financial Report* (GIFR). Bangsa Indonesia telah diproyeksikan untuk diproyeksikan melibatkan situasi utama untuk tahun berikutnya. Dengan melihat sudut pandang dalam penilaian file, melihat jumlah bank, ukuran sumber daya moneter dan lembaga keuangan non-bank syariah yang memiliki bobot yang sangat besar, dilacak dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ekonomi Islam (IAEI).

Dengan kemajuan keuangan syariah yang terus berkembang, perbankan syariah memiliki perintah dan kewajiban dalam pelaksanaan keuangannya karena dihubungkan oleh banyak perkumpulan (mitra). Untuk memperoleh kepercayaan tersebut, perbankan syariah membutuhkan perangkat untuk memperkirakan penyalurannya. Perbankan syariah membutuhkan tolok ukur dalam memperkirakan pamerannya sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri. Menekankan pada tujuan keuntungan, namun perbankan syariah juga harus membidik pada sudut pandang yang ramah dan alami.

Estimasi pelaksanaan dengan Maqashid Syariah bertujuan untuk mengakui kemaslahatan, gagasan ini mengandung pemerataan, kebajikan, dan ada kebijaksanaan untuk kemanusiaan. Jika estimasi pelaksanaan tujuan keuangan syariah dengan alat estimasi keuangan biasa, akan ada kualitas yang miring dari penanda pelaksanaan keuangan biasa dimana item untuk perbankan syariah lebih luas (Mohammed et al., 2008).. Estimasi pelaksanaan dengan gagasan Maqashid Syariah memiliki tiga sudut pandang utama, yaitu pelatihan individu langsung, selanjutnya menjaga pemerataan dan ketiga kepentingan daerah. Untuk ketiga variabel tersebut dapat mencapai suatu keberhasilan yang tidak hanya bagi investor tetapi juga atas bantuan pemerintah dari seluruh umat manusia

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Permintaan dan Penawaran Uang

Berapa banyak barang dagangan yang diminta di pasar tertentu pada tingkat biaya tertentu dan tingkat pembayaran tertentu disebut permintaan. Hipotesis bunga masuk akal bagaimana hubungan antara jumlah yang diminta dan biaya. Pelanggan memiliki makna yang dapat memiliki referensi, dapat membeli tenaga kerja dan produk ini dan pembeli juga memiliki kemampuan dari uang tunai atau membayar untuk membeli dan memuaskan keinginan mereka. Keinginan ini disebut daya beli (Rozalinda, 2017).

Keadaan di mana untuk menghakimi suatu barang atau administrasi sama sekali tidak dapat digunakan atau dikonsumsi dengan alasan bahwa ada perbedaan produk halal atau haram adalah ide yang menarik dalam Islam. Dalam hipotesis adat semua tenaga dan produk dihargai sesuatu yang serupa dan dapat digunakan atau dikonsumsi, sedangkan hipotesis populer dengan ide-ide Islam, mengkaji kepentingan untuk setiap besar halal dan administrasi (Fattach, 2017).

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Timiyah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu barang dan pengaruhnya terhadap nilai (Rozalinda, 2017), yaitu (a) barang dagangan dengan nilai sebenarnya atau penggantinya; (b) preferensi atau keinginan individu dengan sesuatu yang bergeser dan kontras; (c) bergantung pada jumlah kontestan untuk penyesuaian produk; (d) derajat kesetiakawanan dan kekurangan minat terhadap sesuatu; (e) angsuran untuk sesuatu dengan uang tunai atau kebobolan; dan (f) gaji khas daerah setempat dan keluarga.

Pasokan juga dapat diartikan sebagai berapa banyak barang yang telah disajikan oleh dealer di pasar tertentu dalam periode tertentu pada tingkat biaya tertentu. Hipotesis penawaran dalam masalah keuangan berpusat di sekitar hubungan antara tingkat biaya dan jumlah yang disediakan dari yang layak. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara tingkat biaya dan jumlah produk yang disediakan. Jika biayanya tinggi, dapat memberi keuntungan bagi pembuat untuk menawarkan lebih banyak produk. Hal itulah yang dipermasalahkan produsen jika harga semakin tinggi, barang yang diminta pembeli tinggi namun persediaan di pasar akan semakin sedikit, sehingga membuat produsen menambah barang tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan (Fattach, 2017).

Gagasan menghadirkan dalam Islam menasihati kita sebagai manusia untuk kembali ke latar belakang sejarah penciptaan manusia. Bahwa Tuhan menciptakan manusia dan bumi tidak cocok satu sama lain. Allah telah memperingatkan manusia untuk memanfaatkan alam yang telah diberikannya, sehingga ada penghalang yang harus dipatuhi, khususnya "Jangan membuat kenakalan di planet ini". Penghalang-penghalang ini umumnya telah tersebar di berbagai tempat dan tertuang dalam Al-Qur'an. Allah SWT benar-benar dapat melakukannya tanpa para pekerjanya yang pada umumnya melakukan hal-hal yang mengerikan di planet ini (Hafid, 2015).

Pasokan adalah jumlah biaya tanpa henti tingkat tenaga manusia menurut Ibn Khaldun. Misalnya, pekerja memiliki energi yang luar biasa untuk wawasan, kemampuan, ketenangan dan keamanan mereka dan dia memiliki kemajuan ini secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan suatu barang (Rozalinda, 2017), yaitu (a) harga barang yang sebenarnya dan harga barang atau barang pengganti lainnya; (b) biaya pembuatan; (c) tingkat inovasi yang digunakan; (d) jumlah di dealer; (e) keadaan biasa; dan (f) asumsi.

2.2. Konsep Kinerja Dalam Industri Perbankan Islam

Kinerja (*Performance*) adalah konsekuensi kuantitatif dari kelangsungan aktivitas suatu usaha dalam periode tertentu. Eksekusi perbankan merupakan prestasi yang dicapai bank dalam menjalankan tugasnya. Kondisi keuangan perbankan yang baik harus terlihat dalam periode tertentu yang mencakup bagian dari kumpulan aset dan sirkulasi aset. Kekurangan dan kualitas dalam suatu organisasi harus terlihat dari presentasi organisasi tersebut (Ramadhani & Mutia, 2016).

Pelaksanaan adalah suatu evaluasi yang digunakan untuk membantu pelaksanaan metodologi organisasi, dan itu berarti bahwa ujian pameran dapat menjadi instrumen penilaian untuk hasil suatu organisasi sekarang dan nanti.

Estimasi presentasi ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan pilihan bagi organisasi dalam menentukan strategi administrasi (Farida & Zuliani, 2015).

Sangat penting bahwa evaluasi pelaksanaan internal dalam organisasi diselesaikan atau dilakukan oleh semua perkumpulan yang memiliki kepentingan dalam organisasi karena dapat mencakup bantuan pemerintah dalam sosialisasi antar perkumpulan yang bersangkutan (Haq, 2015).

1 2.3. Konsep Maqshid Syariah Dalam Perbankan Islam

Maqashid Syariah adalah kata majemuk yang merupakan gabungan dari kata Maqashid dan Syariah. Maqashid mengandung arti tujuan atau lubang sedangkan Syariah adalah segala sesuatu yang belum seluruhnya ditetapkan oleh Allah SWT kepada para pekerja-Nya. Maqashid syariah dalam perkataannya adalah tujuan syariah dan misteri yang telah Allah rencanakan untuk setiap peraturan dan keseluruhan dalam peraturan-Nya. Ada lima tujuan penting yang ada dalam maqashid syariah yang dapat dicapai, manusia harus melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu (Cakhyaneu, 2018): (a) mendukung agama (Hifdz Advertisement Clamor); (b) memelihara jiwa (Hifdz An-Nafs); (c) pemeliharaan akal (Hifdz Al-'Aql); (d) pemeliharaan anak cucu (Hifdz An-Nasb); dan (e) dukungan harta (Hifdz Al-Mal).

Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa analis bisnis Islam kontemporer dan pakar keuangan di Indonesia, tujuan syariah, di mana ada peraturan Islam di dalamnya dan digunakan untuk mengembangkan dan mengakui keadilan manusia di planet ini dan di akhirat, adalah pentingnya maqashid syariah itu sendiri (Majid & Ghofar, 2017).

Ada tiga sasaran syariah yang dipartisi menjadi 3 derajat yang berbeda sesuai dengan pemikiran Abu Zahra yang telah dibuat dalam penelitiannya (Mohammed et al., 2008) yaitu:

1 1. *Tahdhib al- Fard* (pendidikan individu)

Tujuan Sekolah individu dengan tujuan pelatihan keuangan Islam individu dapat menyebarkan informasi secara umum, meningkatkan kapasitas daerah dan dapat menanamkan kualitas yang baik pada setiap orang dalam memperluas pergantian peristiwa duniawi mereka.

2. *Iqamah al- Adl* (menegakkan keadilan)

Dalam rangka menjaga pemerataan, perbankan syariah dapat membujuk masyarakat luas agar segala sesuatu tentang pertukaran dan kegiatan usaha yang dilakukan dengan sopan dan tidak merugikan pihak manapun, baik dari segi barang, biaya, syarat maupun perjanjian. Menghibur area keuangan syariah juga membuat setiap bisnis jauh dari unsur-unsur yang disesalkan yang dapat menyebabkan bentuk buruk.

1 3. *Jabl al- Maslahah* (kepentingan masyarakat)

Dalam tujuan ketiga ini, perbankan syariah menitikberatkan pada latihan bisnis yang dapat memberikan efek dan keuntungan yang sangat besar bagi daerah setempat. Dalam memimpin latihan bisnis, seseorang harus fokus pada iklim umum dan masyarakat dan tidak gagal untuk mengingat komitmen organisasi.

1
 Evaluasi pada kinerja perbankan syariah berdasarkan pada Metode Sekaran dibagi menjadi 3 variabel yakni (a) pendidikan individu (*Tahzib al-Fard*); (b) menegakkan keadilan (*Iqamah al-Adl*); dan (c) kepentingan masyarakat (*Jalb al Maslahah*). Dari ketiga variabel tersebut di transformasikan lagi jadi 10 rasio kinerja. Rasio tersebut yaitu:

Tabel 6.1 Operasional Tiga Tujuan Perbankan Syariah

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber
1. Pendidikan Individu (<i>Tahzib al Fard</i>)	D1. Meningkatkan pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan / Total pendapatan	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian / Total biaya	Laporan Tahunan
	D2. Menambah dan meningkatkan pengetahuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan / Total biaya	Laporan Tahunan
		E4. Publisitas	R4. Biaya publisitas / Total biaya	Laporan Tahunan
2. Mewujudkan Keadilan (<i>Iqamah al Adl</i>)	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. Laba / Total biaya	Laporan Tahunan
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Biaya yang terjangkau	R6. Piutang tak tertagih / Total Investasi	Laporan Tahunan
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk bank non bunga	R7. Pendapatan non bunga / Total pendapatan	Laporan Tahunan
3. Kepentingan Masyarakat (<i>Jalb al Masalah</i>)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio profitabilitas	R8. Laba bersih / Total aktiva	Laporan Tahunan
	D8. Pendistribusian kekayaan dan laba	E9. Pendapatan operasional	R9. Zakat / Laba bersih	Laporan Tahunan
	D9. Investasi pada sektor rill yang vital	E10. Rasio investasi dan sektor rill	R10. Penyaluran untuk investasi / Total penyaluran	Laporan Tahunan

Sumber : Mohammed et al. (2008)

Dari perkiraan di atas untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, mulai saat itu, Anda akan menemukan kenyataan dalam model pembobotan untuk setiap

ide dan komponen yang terkandung dalam perkiraan melalui wawancara dengan enam belas pakar syariah di Malaysia dan Timur Tengah. Berikut adalah bobot rata-rata tiga tujuan dan sepuluh komponen:

Tabel 6.2 Bobot Rata-Rata Tiga tujuan & Sepuluh Elemen

Tujuan <i>Maqashid Syariah Index</i>	Bobot Rata-Rata (%)	Elemen (E)	Bobot Rata-Rata (%)
Pendidikan individu (<i>Tahzib al - Fard</i>)	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		Total	100
Menegakkan Keadilan (<i>Al- Adl</i>)	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Distribusi fungsional	32
		E7. Produk bank non bunga	38
		Total	100
Kepentingan Masyarakat (<i>Al-Maslahah</i>)	29	E8. Rasio profitabilitas	33
		E9. Pendapatan operasional	30
		E10. Rasio Investasi dan Sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber : Mohammed et al. (2008)

2.4. Fungsi Bank dan Lembaga Keuangan

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kapasitas utama untuk mentoleransi toko klien, meminjamkan uang tunai dan memberikan administrasi pengiriman. Organisasi moneter bank dalam latihan mereka terkait dengan masalah moneter. Organisasi moneter syariah dan bank syariah ditata dengan menggunakan standar fundamental, khususnya pengembangannya tidak menggunakan item riba yang dapat mengelola riba namun menggunakan aturan utama, yaitu syariah Islam (Budiono, 2017).

Bank syariah dalam kegiatan pertukarannya menggunakan standar syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dan selanjutnya mencegah riba (premium), maysir (teori) dan gharar (kerentanan) yang merupakan komponen permainan busuk bagi umat manusia (Budiono, 2017).

Ada tiga kemampuan mendasar dalam bank syariah, yakni langsung mengumpulkan dukungan publik atau nasabah sebagai simpanan atau spekulasi, juga menyampaikan aset kepada individu yang membutuhkan aset bank dari bank, ketiga bank memberikan administrasi perbankan kepada nasabah atau umum. masyarakat, khususnya (a) menggalang dana publik; (b) peredaran aset kepada masyarakat umum; dan (c) administrasi bank (Subaidi, 2018).

3. Hasil Kajian

Penelitian ini menganalisis apakah perbedaan kinerja pada industri perbankan islam di Indonesia dengan Malaysia menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah Index (MSI)*. Penelitian ini dilakukan di Negara Indonesia dan Malaysia pada

perbankan syariah periode tahun 2015-2019. Populasi dan sampel pada penelitian ini 3 perbankan syariah pada masing-masing negara Indonesia dan Malaysia, data yang digunakan menggunakan data sekunder laporan keuangan tahunan (*annual report*).

Metode analisis yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah Index (MSI)* dengan metode kuantitatif *Simple Additive Weighting (SWA)* digunakan untuk melihat seberapa besarnya pencapaian maqashid syariah index pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan jumlah dari masing-masing rasio yang mempunyai bobot nilai. Objek pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 6.3 Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia

Bank Umum Syariah di Indonesia	
1	PT. Bank Syariah Mandiri
2	PT. Bank Negara Indonesia Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
Bank Syariah Negara Malaysia	
1	CIMB Islamic Bank Behard
2	Maybank Islamic Berhad
3	Bank Islam Malaysia Behard

3.1. Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Index* pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pameran modern perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah Index (MSI)*. Kajian ini memperkirakan pamerannya menggunakan *Maqashid Syariah Index (MSI)* untuk mengetahui bank syariah telah melaksanakan tujuan syariah dalam menyelesaikan kegiatannya dan ada 3 tujuan syariah, yaitu Tahzib Al-Fard (sekolah individu), Iqamah Al-Adl (menerapkan pemerataan) dan Jalb Al-Maslahah (premi publik). Berikut ini adalah proporsi penyajian maqashid syariah perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015 - 2019 dengan mempertimbangkan tujuannya:

3.3.1. Tujuan Pertama *Maqashid Syariah Index* (Pendidikan Individu)

Dalam pendekatan maqashid syariah, tujuan utama terdiri dari empat proporsi estimasi, khususnya persekolahan (penghargaan instruksi), penelitian (riset), persiapan (*preparing*) dan paparan (*exposure*). Proporsi pameran maqashid syariah untuk tujuan utama Bank Umum Syariah di Indonesia dan Bank Umum Syariah di Malaysia dapat dilihat pada Tabel 6.4 di bawah ini:

Tabel 6.4 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Pertama Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019

Bank Syariah di Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R ₁₁	R ₂₁	R ₃₁	R ₄₁
Bank Syariah Mandiri	0.00047	0.00069	0.05237	0.07408
Bank Negara Indonesia Syariah	0.01874	0.00000	0.09650	0.20128
Bank Muallamat Indonesia	0.00327	0.01500	0.05111	0.10096
Bank Syariah di Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 1			
	R ₁₁	R ₂₁	R ₃₁	R ₄₁
CIMB Islamic Bank Berhad	0.00000	0.00000	0.00000	0.03413
Maybank Islamic Berhad	0.00000	0.00000	0.00000	0.00020
Bank Islam Malaysia Berhad	0.00000	0.00000	0.00000	0.21805

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 6.4 di atas telah menunjukkan tingkat aset yang telah disebarluaskan oleh perbankan syariah di bidang instruksi, eksplorasi, persiapan dan eksposur. Dengan komitmen dan pertimbangan yang telah diarahkan oleh bank ke daerah, sepenuhnya bertujuan untuk memperluas ekonomi tingkat tinggi dengan melihat standar syariah dan fokus dari industri perbankan syariah itu sendiri.

Dari 6 bank yang menjadi objek pemeriksaan, bank syariah Indonesia sangat memperhatikan proporsi pokok (R₁₁), khususnya sekolah. Bank syariah Indonesia yang mendapat skor tertinggi adalah Bank Negara Syariah Indonesia (BNIS) dengan level 1,874 persen dan disusul Bank Muallamat Indonesia sebesar 0,327 persen. Sementara itu, di perbankan syariah di Malaysia, tidak ada bank syariah yang asetnya sesuai untuk penghargaan instruktif. Sekolah penting dengan pelatihan yang diberikan oleh perbankan syariah dapat menjadikan usia yang unggul (Ramadhani & Mutia, 2016).

Proporsi dua target pertama (R₁₂) menunjukkan yang paling tinggi skornya adalah Bank Muallamat Indonesia (BMS) dengan level 1.500 persen dan disusul Bank Syariah Mandiri dengan level 0,069 persen. Mengingat hasil di atas, tidak ada bank syariah Malaysia yang mengarahkan aset mereka untuk penelitian. Aset eksplorasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan barang-barang yang sesuai dengan standar syariah dan barang-barang yang diberikan oleh bank syariah dapat dimanfaatkan untuk membentengi tempat keuangan syariah itu sendiri.

Proporsi tiga target awal (R₁₃) sedang disiapkan, keuangan syariah yang melibatkan prinsipal adalah Bank Negara Syariah Indonesia (BNIS) dengan level 9,650 persen dan disusul Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar 5,237%. Perbankan syariah Malaysia juga pada proporsi ini tidak menyalurkan aset untuk persiapan.

Persiapan yang diberikan oleh perbankan syariah untuk mengerjakan kemampuan halus dan kemampuan keras.

Proporsi empat tujuan awal (R_{14}) adalah eksposur, posisi keuangan syariah Malaysia pertama dalam proporsi ini, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad dengan level 1,805 persen dan kedua bank syariah di Indonesia Bank Negara Syariah Indonesia dengan level 0,128 persen.

Semua bank syariah yang menjadi objek pemeriksaan telah menyebarluaskan aset mereka untuk kemajuan atau eksposur. Dengan cara ini, eksposur memiliki dampak luar biasa dalam menarik pembeli atau masyarakat umum, dengan memberikan kemajuan dalam hal data keuangan Islam tentang barang dan bursa dapat menyambut individu untuk bergabung dengan bank syariah.

3.3.2. Tujuan Kedua *Maqashid Syariah Index* (Menegakkan Keadilan)

Sisi kedua dari pendekatan file maqashid syariah adalah menjaga ekuitas yang terdiri dari 3 proporsi estimasi, yaitu PER (*profit equalization reserve*), pendanaan mudharabah dan musyarakah dan yang ketiga berhubungan dengan riba. Proporsi pameran maqashid syariah untuk alasan kedua pada Bank Usaha Syariah di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada tabel 6.5 di bawah ini:

Tabel 6.5 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Kedua Bank Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019

Bank Syariah di Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R_{21}	R_{22}	R_{32}
Bank Syariah Mandiri	0.00000	0.55817	1.00000
Bank Negara Indonesia Syariah	0.00000	1.30483	1.00000
Bank Muallamat Indonesia	0.00000	1.53163	1.00000
Bank Syariah di Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 2		
	R_{21}	R_{22}	R_{32}
CIMB Islamic Bank Berhad	0.00000	1.25577	1.00000
Maybank Islamic Berhad	0.00000	3.47905	1.00000
Bank Islam Malaysia Berhad	0.00000	0.23187	1.00000

Sumber : Data diolah 2021

Pada hasil Tabel 6.5 di atas, untuk tujuan kedua, rasio pertama adalah PER (*profit equalization reserve*). Pada rasio pertama perbankan syariah (R_{21}) Indonesia dan Malaysia belum sepenuhnya menentukan PER dan juga belum dalam laporan keuangannya untuk tingkat PER.

Rasio kedua untuk tujuan kedua (R_{22}) pembiayaan mudah dijangkau dan persentase musyarakah tertinggi dicapai oleh bank syariah Malaysia, yaitu Maybank Islamic Berhad (MIB) dengan persentase 3.47905 atau 7,940 persen, diikuti oleh CIMB Islamic Berhad (MIB) dengan persentase 3.47905 atau 7,940 persen. Bank Berhad (CIBB) dengan nilai 1,25577 atau 5,577 persen dan yang mendapat skor terendah diraih Bank Islam Malaysia Behard (BIMB) sebesar 0,23187 atau 3,187 persen. Bank syariah di Indonesia yang mendapat skor tertinggi diraih oleh Bank Muallamat Indonesia sebesar 1.53163 atau 3,163 persen,

disusul Bank Negara Finance Indonesia Syariah (BNIS) sebesar 1,30483 dan terendah adalah Bank Syariah Mandiri sebesar 0,55817.

Banyaknya perbankan syariah yang menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat memastikan bank syariah dapat meningkat dengan membangun keadilan ekonomi melalui transaksi bagi hasil. Bisa buka untuk kedua tujuan, kedua bank syariah di malaysia lebih unggul dari bank syariah indonesia.

Rasio ketiga tujuan kedua (R_{32}) adalah produk non bunga, bank syariah telah memulai kegiatan perbankannya khusus untuk investasi yang tidak mengandung riba. Sebagai bank umum syariah karena tidak adanya riba dalam menjalankan segala aktivitas bank syariah. Hasil rasio ketiga pada tujuan kedua mendapatkan presentasi nilai 100 persen untuk bank syariah Indonesia dan Malaysia, yang berarti pendapatan tersebut tidak mengandung riba atau bunga dalam kegiatan transaksinya yang berarti sesuai dengan prinsip syariah.

3.3.3. Tujuan Ketiga *Maqashid Syariah Index* (Kepentingan Masyarakat)

Kesamaan ketiga dalam *maqashid syariah index* adalah keunggulan atau bantuan pemerintah daerah setempat. Bagian penting dari kehidupan individu adalah bantuan pemerintah. Ada 3 proporsi perhitungan, yaitu total santunan, zakat dan spekulasi daerah asli. Proporsi pelaksanaan *maqashid syariah* tujuan ketiga pada Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada Tabel 6.6 di bawah ini:

Tabel 6.6 Rasio Kinerja *Maqashid Syariah* Ketiga Bank Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019

Bank Syariah di Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R_{13}	R_{23}	R_{33}
Bank Syariah Mandiri	0.40812	0.00194	4.19662
Bank Negara Indonesia Syariah	0.49127	0.00263	4.25175
Bank Muallamat Indonesia	0.23641	0.00110	3.58798
Bank Syariah di Malaysia	Rasio Kinerja Tujuan 3		
	R_{13}	R_{23}	R_{33}
CIMB Islamic Bank Berhad	0.30075	0.00007	4.55270
Maybank Islamic Berhad	0.17354	0.00038	4.90322
Bank Islam Malaysia Berhad	0.41262	0.00000	4.13722

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 6.6 di atas, proporsi utama tidak bias (R_{13}), tepatnya manfaat bersih perbankan syariah, mendapat skor tertinggi, yaitu Bank Negara Syariah Indonesia (BNIS) dengan level 9.127 persen, disusul Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan level 0,40812. Di perbankan syariah Malaysia, skor tertinggi adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan level 1.262 persen dan diikuti oleh CIMB Islamic Bank Berhad (CIBB) dengan level 0,075 persen. Produktivitas dalam suatu organisasi merupakan suatu tujuan, setiap organisasi memiliki pencapaian untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebuah organisasi yang

layak akan mendapatkan manfaat yang tinggi, kapasitas organisasi untuk menghasilkan manfaat memberikan gambaran tentang kecukupan pengurus dalam melakukan latihannya. Pasalnya, bank syariah Indonesia lebih baik dari bank syariah Malaysia.

Tingkat ketiga menuju proporsi berikutnya (R_{32}) adalah zakat, uang tabungan syariah dengan tingkat yang paling penting, yaitu Bank Negara Syariah Indonesia (BNIS) senilai 0,263 persen, disusul oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan tingkat 0,194 persen. Di perbankan syariah Malaysia, skor tertinggi diraih Maybank Islamic Berhad (MIB) dengan level 0,038 persen, disusul CIMB Islamic Bank Berhad (CIBB) senilai 0,007 persen. Tugas penting perbankan syariah adalah mengalokasikan aset zakat ke lapisan masyarakat bawah. Sangat mungkin beralasan bahwa bank syariah Indonesia lebih baik dari bank syariah Malaysia.

Proporsi ketiga pada tujuan ketiga (R_{33}) adalah bunga di daerah asli, hasil di atas yang mendapat tingkat tertinggi dicapai oleh Maybank Islamic Berhad (MIB) dengan nilai 10.322 persen diikuti oleh CIMB Islamic Bank Berhad (CIBB) dengan tingkat 5.270 persen. Bank syariah Indonesia yang mendapat skor tertinggi adalah Bank Negara Syariah Indonesia (BNIS) dengan level 25.175 persen dan disusul Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan level 19.662 persen. Bank syariah dapat berkonsentrasi pada aset yang akan digunakan di daerah asli sehingga semua tujuan perbankan syariah dapat menghasilkan manfaat bagi premi publik yang tercapai. Secara keseluruhan, bank syariah di Malaysia lebih baik dari perbankan syariah di Indonesia.

3.2. Nilai Indeks Maqashid Syariah Index Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

Penentuan positioning dalam Daftar Maqashid Syariah (MSI) akan diakhiri dengan mencantumkan penunjuk pameran Maqashid Syariah dari tujuan utama hingga tujuan ketiga. Tabel 6.7 menampilkan tabel Daftar Maqashid Syariah (MSI) beserta peringkat bank usaha syariah di Indonesia dan Malaysia periode 2015-2019.

Tabel 6.7 Indeks Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2015-2019

Bank Syariah di Indonesia	IK (T1)	IK (T2)	IK (T3)	MSI	Peringkat Masing-masing Negara	Peringkat Keseluruhan Objek Penelitian
Bank Mandiri Syariah	0.00929	0.2290	0.48952	0.72784	3	5
Bank Negara Indonesia Syariah	0.02276	0.32699	0.50346	0.85322	1	2
Bank Muallamat Indonesia	0.01240	0.35675	0.40771	0.77686	2	4
	IK (T1)	IK (T2)	IK (T3)	MSI		

Bank Syariah di Malaysia					Peringkat Masing-masing Negara	Peringkat Keseluruhan Objek Penelitian
CIMB Islamic Bank Berhad	0.00236	0.32056	0.51729	0.84021	2	3
Maybank Islamic Berhad	0.00001	0.61225	0.54276	1.15502	1	1
Bank Islam Malaysia Berhad	0.01505	0.18622	0.48341	0.68468	3	6

Sumber : Data diolah, 2021

Melihat tabel di atas, sangat masuk akal jika bank-bank bisnis syariah di Indonesia telah melaksanakan eksekusi dengan pendekatan maqashid syariah. Rekor selama 2015-2019 adalah Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebesar 0,85322. Nilai Maqashid Syariah File telah dijunjung dengan terpenuhinya petunjuk pelaksanaan untuk penghargaan instruksi dan bantuan pemerintah daerah, sekolah sangat penting untuk pemeliharaan pekerja dan daerah sehingga mereka menjadi SDM yang berkualitas di kemudian hari dan keunggulan lokal. daerah yang seharusnya fokus pada daerah setempat dalam menjalankan pekerjaannya agar daerah setempat tidak terkena dampak yang buruk. .

Penelitian ini sesuai dengan Tubagus et al. (2020) yang datang sebagai konsekuensi Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) mendorong eksekusi terbaik dengan catatan maqashid syariah (MSI) yang telah menjalankan eksekusi perbankan syariahnya sesuai standar syariah. Dalam pemeriksaan Mohammed et al. (2008) juga memaknai bahwa pendidikan tinggi dapat bekerja pada kapasitas perwakilan dan non-pekerja yang sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Perbankan syariah juga harus memiliki pilihan untuk menumbuhkan jiwa dunia lain dengan memimpin pengajaran yang berbeda dan mempersiapkan diri untuk bekerja pada kemampuan dan kemampuan perwakilan.

Bank bisnis syariah Malaysia yang telah unggul dalam melaksanakan eksekusi dengan pendekatan rekor maqashid syariah adalah Maybank Islamic Berhad (MIB) sebesar 1.15502. Nilai dari Rekor Maqashid Syariah telah dijunjung tinggi oleh pencapaian poin eksekusi dalam menjaga ekuitas dan bantuan pemerintah daerah, bank-bank Islam Malaysia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan ekuitas dan mengembangkan usaha yang bijaksana untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah.

Peringkat paling penting pada pameran bank bisnis syariah di Indonesia dan Malaysia diakuisisi oleh Maybank Islamic Berhad (MIB), ini menunjukkan bahwa presentasi bank bisnis syariah di Malaysia lebih baik sejauh catatan maqashid syariah dibandingkan dengan bisnis syariah. perbankan di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan eksplorasi yang diarahkan oleh Ramadhani & Mutia (2016) dan Ghifari et al. (2015) yang mendapatkan hasil bahwa bank bisnis syariah di Indonesia lebih baik dari perbankan syariah di Malaysia.

Pada hasil di atas, perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi dari perbankan syariah di Indonesia, ada persepsi kekhasan perbankan syariah secara universal atau lokal yang menyatakan bahwa kuantitas sumber daya pada perbankan syariah lebih menonjol daripada perbankan syariah Indonesia, porsi

industri perbankan syariah secara keseluruhan di Malaysia juga lebih tinggi. Berbeda dengan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, item dan instrumen moneter yang disajikan oleh perbankan syariah lebih beragam dan jumlah bank bisnis di perbankan syariah lebih banyak daripada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menjadikan wawasan bahwa perbankan syariah di Malaysia lebih disukai atau sangat menggembirakan dibandingkan perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah di Malaysia yang mengarahkan aset ke area pelatihan masih sangat rendah dibandingkan dengan bank syariah Indonesia seperti yang terlihat dari hasil imbal hasil di atas dimana bank syariah Malaysia tidak melaporkan aset untuk instruksi dalam ringkasan anggaran mereka. Penegasan ini sesuai dengan Ramadhani & Mutia (2016).. Tidak jauh dari hasil pemeriksaan Sa'diyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) memiliki nilai proporsi sekolah yang paling tinggi dengan menggunakan pendekatan file maqashid syariah (MSI).

Ada banyak anggapan bahwa bank syariah di Indonesia lebih unggul dari bank syariah di Malaysia, namun evaluasi catatan maqashid syariah menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia lebih unggul dari bank syariah di Indonesia. Dalam proporsi bantuan pemerintah daerah keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia, hal yang penting tidak jauh berbeda, yaitu 0,03 persen. Di real area venture, perbankan syariah Indonesia lebih andal dalam mengarahkan aset ke UMKM (Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah).

Semakin tinggi dukungan yang disalurkan ke area asli, itu akan mendorong kemajuan finansial di area asli. Kemajuan ekonomi di daerah asli di perbankan syariah membuat sukses untuk seluruh daerah. Bank syariah Malaysia telah maksimal dalam mengalihkan aset ke bisnis daerah asli berbeda dengan Indonesia, mungkin karena bank syariah Indonesia sebenarnya memiliki instrumen keuangan meskipun Islam menyarankan untuk memasukkan sumber daya ke dalam istilah asli sehingga tidak ada sumber daya tertutup.

3.3. Perbandingan Kinerja Maqashid Syariah Index Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Investigasi dekat atau korelasi adalah pemeriksaan dalam menghitung informasi untuk mengetahui perbedaan antara dan menguji teori untuk melihat apakah ada kontras antara faktor atau contoh yang akan direnungkan. Dalam review ini, untuk menganalisis kontras dalam pameran industri keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan Maqashid Syariah File (MSI), dilakukan dengan menguji investigasi berbeda, uji ordinaritas dan uji beda (*Independent Sample T-Test*).

3.3.1. Analisis Deskriptif

Tabel 6.8 Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic		
Hasil Perhitungan MSI	6	0,470	0,684	1,155	5,037	0,839	0,068	0,167
BANK	6	1	1	2	9	1,50	0,224	0,548
Valid N (listwise)	6							

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Efek samping dari hasil faktual yang menceraikan di atas pada Tabel 6.8 menunjukkan bahwa dari jumlah pengujian dalam tinjauan ini, Bank Bisnis Syariah Indonesia dan Malaysia adalah 6 bank syariah, dari 6 contoh nilai Maqashid Syariah Record (MSI) terkecil (paling rendah) adalah 0,68468 dan esteem Maqashid Syariah File terbesar (MSI) (paling ekstrim) adalah 1,15505. Untuk nilai tipikal Maqashid Syariah Record (MSI) dari 6 contoh adalah 0,06833808 dengan standar deviasi 0,16739341. Jangkauan atau kontras antara nilai dasar dan nilai Maqashid Syariah File (MSI) terbesar adalah 0,47034 sedangkan nilai total atau jumlah dari 6 contoh tersebut adalah 5,03782.

3.3.2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui atau melihat apakah informasi yang akan direnungkan disebarluaskan secara berkala atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka data tersebut layak untuk dapat di uji bedakan (Ghozali, 2018).

Tabel 6.9 Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Bank Syariah	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Hasil MSI BSI	0,224	3	.	0,984	3	0,761
BSM	0,254	3	.	0,963	3	0,631

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan dari hasil output uji normalitas pada Tabel 6.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 0.761 dan sedangkan nilai signifikansi Bank Umum Syariah Malaysia sebesar 0.631. Pada kedua Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki nilai > 0.05 maka sebagaimana dengan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk data nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) berdistribusi normal.

3.3.3. Uji Beda (*Independent Sample T-Test*)

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan kedua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Berikut uji beda pada penelitian ini:

Tabel 6.10 Hasil Uji Beda (Independent Sample T-Test)

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil MSI	Equal variances assumed	3,960	0,117	-,750	4	0,495	-,107	0,143	-,504	0,289
	Equal variances not assumed			-,750	2,277	0,523	-,107	0,143	-,656	0,441

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak terdapat perbedaan kinerja berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI) antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015-2019.

H₁: Terdapat perbedaan kinerja berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI) antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015-2019.

Dasar pengambilan keputusan di atas adalah : apabila nilai *profitability* > 0.05 maka H₀ diterima dan jika *profitability* < 0.05 maka ditolak. Hasil dari *output Independent Sample T-test* terlihat pada nilai t pada *equal variance assumed* adalah 0.750 dengan nilai profitabilitas signifikan 0.495, berdasarkan pada hipotesis penelitian profitabilitas > 0.05 maka keputusan yang diambil yaitu menerima H₀ bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja berdasarkan *maqashid syariah index* (MSI) antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Mutia (2016) bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada pencapaian kinerja dengan pendekatan *maqashid syariah* antara bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian dan analisis data yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa:

- a. Kinerja di industri keuangan syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan pendekatan *maqashid syariah index* (MSI) dalam menyelesaikan latihan fungsionalnya sesuai target syariah lebih banyak berlaku dalam tujuan Tahdzib Al-Fard (instruksi), dan itu menyiratkan bahwa fokus perbankan

syariah pada pelatihan yang lebih baik untuk bekerja pada kemampuan halus dan kemampuan keras. pada SDM-nya. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) memperoleh hasil yang luar biasa sesuai dengan penghargaan Daftar Maqashid Syariah (MSI) di bank bisnis syariah di Indonesia.

- b. Penyajian perbankan syariah di Malaysia bergantung pada pendekatan maqashid syariah list (MSI) dalam menyelesaikan aktivitasnya sesuai dengan target syariah yang dominan dalam *Iqamah Al-Adl* (pelaksana ekuitas) dan *Jalb AL-Maslahah* (manfaat), dan itu menyiratkan bahwa Islam perbankan di Malaysia telah memperluas standar untuk hasil dan menyalurkan aset untuk membantu daerah setempat. Maybank Islamic Berhad (MIB) adalah bank bisnis syariah Malaysia yang memperoleh hasil terbaik sesuai dengan penghargaan Maqashid Syariah Record (MSI).
- c. Kinerja industri keuangan syariah di Malaysia mendapat skor terbaik dalam mencapai tujuan *maqashid syariah index* dari Indonesia¹ dan tidak ada kontras yang luar biasa dalam penyajian industri keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam hal Rekor *Maqashid Syariah* (pendekatan MSI) pada tahun 2015-2019.

5. Daftar Pustaka

- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 154-165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- ¹ Ernst & Young. (2016). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2016*. *Ernst and Young*, 68.
- Farida, & Zuliani, N. L. (2015). Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqashid. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, X(1), 1-22.
- Fattach, A. (2017). Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, II(3), 451-460.
- Ghifari, M. Al, Handoko, H., & Yani, A. (2015). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47-66.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafid, A. (2015). Konsep Penawaran dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 203-216. <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i2.1437>
- Haq, F. I. (2015). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia melalui

Islamicity Performance Index (Studi pada Bank Muallamat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa JEB*, 3(2), 1-17.

¹ Majid, R., & Ghofar, A. (2017). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia (Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa JEB*, 5(2), 1-24.

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. *IUM International Accounting Conference (INTACIV) Head at Putra Jaya Marroit*, 1-17. <https://doi.org/10.4324/9781315590011-15>

¹ Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 1-25.

Ramadhani, R., & Mutia, E. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-24.

Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. RajaGrafindo Persada.

Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373-385. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>

Subaidi. (2018). Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 110-119. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.111>

Tubagus, Y. R., Khozi, S., & Rakim, A. A. (2020). Perhitungan Kinerja Bank Syariah di Indonesia menggunakan Indeks Maqashid Syari'Ah (Studi Perbandingan Pada BNI Syariah, BCA Syariah dan Bank Syariah Mandiri). *SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan*, 4, 227-232.

BAB VII

KINERJA INDUSTRI PERBANKAN (Kinerja Perbankan : Kualitas Asset, Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas di Negara ASEAN)

Oleh:

Gustriani; Alghifari Mahdi Igamo; Nazeli Adnan;

1. Pendahuluan

Kegagalan pasar dalam mengantisipasi krisis global mengakibatkan meluasnya kerugian dan kekurangan modal pada lembaga keuangan. Kondisi tersebut berpengaruh signifikan terhadap kurangnya pasokan kredit sehingga berdampak juga pada sektor riil (Engle & Ruan, 2019). Pasca krisis tersebut, peraturan bidang keuangan pun bergeser dari yang sebelumnya berfokus pada mikroprudensial menjadi makroprudensial untuk mencegah kegagalan sektor yang akan berdampak sistemik pada perekonomian di kawasan ASEAN (Meuleman & Vennet, 2020). Penelitian Le (2021) tentang risiko sistemik yang terjadi pada 6 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam terhadap bank umum dengan menggunakan metrik "SRISK" periode 2000-2018 menunjukkan bahwa liberalisasi pasar modal menyebabkan integrasi pasar yang signifikan. Selanjutnya investasi asing di negara ASEAN membuat pergerakan pasar global direspon sensitif oleh pasar di negara-negara tersebut. Besarnya penanaman modal asing di negara-negara ASEAN tersebut memerlukan regulasi antar bank agar fluktuasi kurs bisa diantisipasi risikonya (Wu, 2019).

Rasio kecukupan modal (CAR) minimum menjadi salah satu faktor penting dalam analisis risiko bank. Tingginya CAR akan membuat bank lebih stabil karena mampu menyerap risiko fluktuasi pasar (Hunjra et al., 2020). Ketatnya kebijakan CAR membuat bank memilih opsi yang optimal untuk mengkompensasi kerugian (Roy, 2008). Ketatnya regulasi CAR juga akan mengurangi eksposur bank terhadap risiko (Ashraf et al., 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa ketatnya regulasi modal di beberapa bank Asia akan meningkatkan risiko gagal bayar (Nguyen et al., 2019), sedangkan study kasus beberapa bank di Amerika menunjukkan bahwa CAR dan tingkat risiko memiliki hubungan yang negatif (Jacques & Nigro, 1997).

Pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap perubahan di semua sektor tidak terkecuali sektor keuangan (Phan & Narayan, 2020). Kebijakan otoritas di masing-masing negara dalam mencegah penularan Covid-19 dengan pembatasan kegiatan berdampak pada perbankan di negara-negara ASEAN mengingat sektor perbankan memiliki peran yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian (Wójcik & Ioannou, 2020). Kebijakan pemerintah untuk menurunkan aktivitas masyarakat tersebut membuat bank mengalami tekanan likuiditas dan berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (Narayan et al., 2021).

Adanya ketergantungan antara pertumbuhan ekonomi dan kredit bank membuat kekhawatiran regulator di Eropa terhadap peningkatan NPL (European

Commission, 2014), di sisi lain NPL meningkatkan risiko stabilitas keuangan di Uni Eropa (Ozili, 2020). Tingginya NPL membuat lembaga keuangan, modal bank bisa terus berkurang dan mengakibatkan makin tingginya risiko. Penelitian Louzis et al. (2012) menunjukkan bahwa bank menyalurkan kredit lebih banyak bahkan pada debitur dengan kualitas rendah dengan untuk mendapatkan keuntungan lebih, namun pada saat terjadi resesi maka risiko gagal bayar debitur meningkat dan membuat NPL naik. Tingginya NPL menjadi salah satu indikator telah terjadi krisis keuangan dan risiko bank menjadi lebih besar (Ghosh, 2015).

Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi salah satu indikator fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Penelitian Ebenezer et al. (2019) menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh negatif terhadap risiko bank. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sampel 63 bank umum di negara ASEAN selama tahun 2009 sampai dengan 2017. Bank menghimpun dana untuk kemudian disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga menurunkan risiko bank (Wilner, 2000). Dengan demikian, kemampuan bank untuk menyalurkan kredit akan dipengaruhi oleh besaran dana pihak ketiga yang bisa dihimpun oleh bank tersebut. Makin tinggi dana deposan yang bisa dikelola maka kesempatan bank untuk meningkatkan pertumbuhan aset produktif yang bisa memberi keuntungan bagi bank juga akan semakin besar, risiko likuiditas pun bisa diatasi (Menicucci & Paolucci, 2016).

Selain dana pihak ketiga, faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap naik turunnya kredit perbankan adalah tingkat bunga. Dari sisi deposan, tingkat bunga menjadi indikator besaran keuntungan, makin tinggi tingkat bunga akan membuat bunga simpan mereka makin besar sehingga mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung. Namun disisi kredit, tingkat bunga menjadi biaya yang harus dibayar debitur atas dana yang mereka pinjam (Mahmud, 2020), sehingga makin tinggi tingkat bunga akan membuat debitur mempertimbangkan alternatif lain selain kredit bank. Fluktuasi suku bunga akan meningkatkan risiko bank karena munculnya ancaman bagi stabilitas keuangan sebagai risiko pasar (Ebenezer et al., 2019).

Globalisasi membuat semakin banyak bank yang beroperasi dalam suatu wilayah, akibatnya konsentrasi bank menjadi turun karena persaingan yang tinggi (Harkati et al., 2020). Kondisi tersebut membuat bank menjadi tidak begitu selektif memberikan kredit sehingga risiko bank meningkat. Kebebasan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya risiko yang dihadapi industri perbankan karena bank tidak menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya (Harkati et al., 2020). Saat industri perbankan bisa memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, maka bank memiliki kemampuan meminimalisir risiko yang lebih baik karena desakan persaingan bisnis relatif kecil (Rehman et al., 2018).

Dalam upaya menjaga kestabilan pasar keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi, beberapa Bank Sentral di kawasan ASEAN menempuh kebijakan yang akomodatif (Bank Indonesia, 2020). Beberapa kebijakan yang diambil di antaranya menurunkan suku bunga, pelonggaran giro wajib minimum, bantuan likuiditas serta pembelian obligasi pemerintah. Bank Negara Malaysia (BNM) melakukan cut rate pada Mei (50 bps) dan Juli (25 bps) 2020 menjadi 1,75%. The Bangko Sentral Pilipinas (BSP) juga melakukan hal yang sama dengan memangkas suku bunga pada Mei-Juni 2020 masing-masing 50 bps menjadi 2,25%. Selanjutnya State Bank of Vietnam (SBV) melakukan hal serupa dengan

menurunkan suku bunga sebesar 50 bps menjadi 4,5% pada Mei 2020 dan Bank of Thailand (BOT) menurunkan 25 bps menjadi 0,5% pada periode yang sama. Sedangkan Monetary Authority of Singapore (MAS) melakukan kebijakan mempertahankan slope apresiasi SGD NEER currency band yang netral (no) dan serta lebar currency band kebijakan SGD NEER.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini berfokus pada kinerja industri perbankan di beberapa negara ASEAN khususnya setelah krisis global tahun 2008. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif penelitian ini akan banyak membahas variabel-variabel yang menjadi indikator kinerja bank yakni CAR dan NPL sektor perbankan negara kawasan ASEAN selama periode 2010 hingga akhir 2020.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Lembaga Keuangan Bank

Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2018). Produk simpanan yang ditawarkan bank sebagai lembaga keuangan berupa tabungan, giro dan deposito. Pemilihan produk simpanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi deposan. Produk pembiayaan yang ditawarkan bank dapat berupa kredit konsumtif yakni kredit pemilikan rumah, kendaraan dan multiguna juga. Kredit produktif berupa kredit modal kerja dan investasi dapat diberikan terhadap debitur yang memiliki usaha produktif. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank diwajibkan memelihara serta meningkatkan kualitas atau tingkat kesehatan dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian juga pelaksanaan manajemen risiko (OJK, 2016). Tingkat kesehatan bank dinilai dari beberapa indikator di antaranya kualitas aset produktif atau kredit, permodalan, likuiditas dan profitabilitas. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan ketersediaan dana untuk saat ini dan di masa yang akan datang sehingga tidak akan mengalami kendala. Kualitas aset dapat dikelompokkan dengan manajemen aset, di mana bank mengelola aset yang ada secara efektif sehingga meminimalkan risiko usaha. Sektor perbankan dalam upaya meminimalkan risiko usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengalokasian dana dalam hal ini penyaluran kredit kegiatan (Junaidi et al., 2019).

2.2. *Non Performing (NPL)*

NPL merupakan rasio jumlah kredit dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan total kredit bank. Semakin tinggi nilai NPL suatu bank maka bisa diartikan bank tersebut menghadapi risiko kredit yang tinggi pula karena besarnya jumlah kredit bermasalah yang dimilikinya (Almilia & Herdiningtyas, 2005). Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

NPL adalah salah satu indikator utama untuk menilai kinerja fungsi bank. NPL merupakan indikasi adanya masalah di bank, yang jika tidak segera ditindaklanjuti akan merugikan bank. Salah satu dampak buruk yang akan muncul adalah modal yang dimiliki bank akan berkurang (Tangngisalu et al., 2020). Semakin tinggi kredit bermasalah di yang dihadapi bank maka bisa membuat bank tersebut mengalami kesulitan keuangan (Zaki et al., 2011). Kondisi NPL yang tinggi akan membuat bank mencadangkan biaya aktiva produktif dan berpotensi merugikan.

Tabel 7.1 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan NPL

Keterangan	NPL
Sangat Sehat	NPL < 2%
Sehat	2% ≤ NPL < 5%
Cukup Sehat	5% ≤ NPL < 8%
Kurang Sehat	8% ≤ NPL < 12%
Tidak Sehat	NPL ≥ 12%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011

2.3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR yang lazim dikenal dengan rasio kecukupan modal berfungsi sebagai penampung risiko atas pemberian kredit oleh bank. Achmad & Kusumo (2003) menjelaskan bahwa CAR adalah rasio permodalan dan menjadi indikator kemampuan bank dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha dan menyediakan dana untuk pemberian kredit.

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100 \%$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia CAR merupakan perbandingan modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia mewajibkan CAR minimal sebesar 8%, dengan demikian bank akan dinilai sehat jika memiliki CAR di atas 8%, makin tinggi nilai CAR maka semakin baik tingkat kesehatan bank tersebut. CAR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank yang tinggi juga dalam mengganggu risiko aset tidak produktif misalnya kredit macet. Semakin tinggi rasio CAR menunjukkan penguatan bank dan peningkatan kemampuan bank untuk melindungi dana dari investor (Usman et al., 2019).. Kondisi tersebut juga bisa membuat bank lebih leluasa dalam menyalurkan kredit sehingga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas) juga terbuka luas.

Tabel 7.2 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan CAR

Keterangan	Kriteria
Sangat Sehat	CAR >12 %
Sehat	9% ≤ CAR < 12%
Cukup Sehat	8% ≤ CAR < 9%
Kurang Sehat	6% ≤ CAR < 8%
Tidak Sehat	CAR ≤ 6%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011

2.4. Loan to deposit Ratio (LDR)

LDR menjadi indikator penilaian likuiditas suatu bank, yakni perbandingan total kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Rasio LDR menunjukkan berapa besar dana yang telah dihimpun bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit (Alazis, 2020). LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank serta berapa besar kemampuan bank untuk membayar atau menyediakan dana jika terjadi penarikan dana oleh deposan (Dendawijaya, 2005). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Nilai LDR yang tinggi menunjukkan tingkat likuiditas bank yang rendah dan bisa berpotensi bank mengalami masalah likuiditas. Dengan likuiditas yang rendah artinya bank tidak memiliki dana jika terjadi penarikan dana simpanan oleh pihak ketiga karena bank terlalu banyak menyalurkan kredit sehingga muncul risiko gagal bayar.

Tabel 7.3 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan LDR

Keterangan	LDR
Sangat Sehat	LDR ≤ 75%
Sehat	85% < LDR ≤ 75%
Cukup Sehat	100% < LDR ≤ 85%
Kurang Sehat	120% < LDR ≤ 100%
Tidak Sehat	LDR > 120%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011

2.5. Profitabilitas

Dalam melihat kinerja bank ada beberapa indikator yang bisa digunakan di antaranya adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). ROA merupakan perbandingan dari keuntungan atau laba bank atas aset yang bank miliki, sedangkan ROE merupakan keuntungan bank terhadap besarnya modal

yang dimiliki. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011) :

$$ROA = \frac{Net\ Profit}{Total\ Asset} \times 100\ %$$

ROA bisa digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mendapatkan keuntungan (profit) dan mengelola efisiensi usaha bank (Amanah, 2020). Semakin besar nilai ROA menunjukkan semakin efektif bank dalam mengelola aktivitya untuk menghasilkan keuntungan.

$$ROE = \frac{Net\ Profit}{Total\ Ekuitas} \times 100\ %$$

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mendapatkan keuntungan (profit) berdasarkan modal yang dimiliki bank. Semakin besar nilai ROE menunjukkan semakin baik bank mengelola modalnya karena bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Tabel 7.4 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan ROA dan ROE

Keterangan	ROA	ROE
Sangat Sehat	ROA > 1,5%	ROE > 20%
Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%	12,5% < ROA ≤ 20%
Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%	5% < ROA ≤ 12,5%
Kurang Sehat	0 < ROA ≤ 0,5%	0 < ROA ≤ 5%
Tidak Sehat	ROA ≤ 0%	ROA ≤ 0%

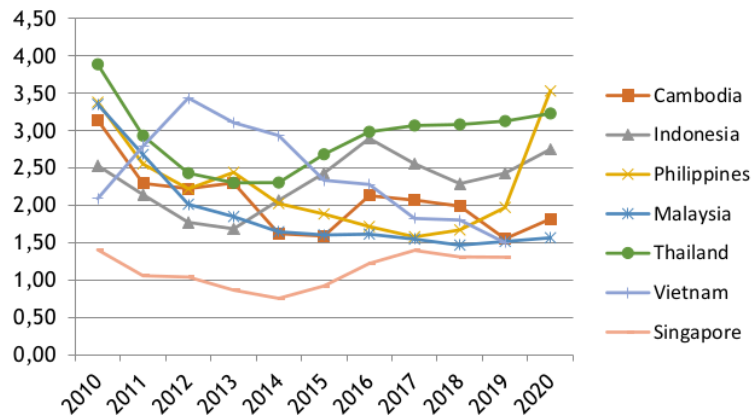
Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011

3. Hasil Kajian

3.1. Analisis Kualitas Kredit - NPL

Selama sepuluh tahun terakhir nilai NPL beberapa negara di ASEAN mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif. Perbankan Singapura memiliki rasio NPL yang paling rendah yakni sebesar 1,4 persen pada tahun 2010, nilai tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2014 nilainya menyentuh angka yang sangat rendah yakni sebesar 0,76 persen. Berdasarkan laporan IMF negara Singapura berkembang pesat menjadi pusat inovasi global. Selain itu Singapura merangkul ekonomi digital, pemerintah juga menyadari bahwa kemajuan otomasi dan teknologi keuangan (*fintech*) bukanlah disrupsi/gangguan, namun menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan, keterampilan dan kesempatan kerja bagi warganya. Singapura memperoleh pertumbuhan produktivitas dan efisiensi dengan fokus pada penguatan dan peningkatan *e-commerce*. Negara tersebut mengintegrasikan ekonomi dan keuangan serta dan inovasi keuangan untuk mempromosikan keuangan inklusif. Peningkatan peran perbankan dan perusahaan *fintech startups* juga dilakukan untuk menyediakan akses dengan biaya lebih rendah untuk kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan perbankan (*under-banked*) dan layanan asuransi (*under-insured*).

Berbeda dengan Singapura, perbankan di Thailand memiliki tingkat NPL yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, tahun 2010 nilai NPL perbankan di Thailand berada di level 3,89 persen. Walaupun nilai tersebut merupakan nilai NPL tertinggi untuk wilayah ASEAN namun kondisi tersebut masih dikategorikan sehat karena di bawah 5% (jika didasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011). Tingginya nilai NPL tersebut tidak berlangsung lama karena setelah tahun 2010 tingkat NPL Thailand terus mengalami penurunan. Beberapa kebijakan masa lalu yang mendorong pertumbuhan kredit rumah tangga, di antaranya program kredit kepemilikan kendaraan serta *massive*-nya penawaran kartu kredit membuat tingkat hutang di Thailand tinggi. Tahun 2013-2014 nilai NPL perbankan Thailand mencapai level terendahnya dibandingkan beberapa tahun terakhir yakni sebesar 2,31 persen. Di akhir tahun 2020 perbankan Thailand masih memiliki pekerjaan rumah untuk menekan kembali tingkat NPL-nya yang masih berada di level 3,23 persen.



Gambar 7.1 Perkembangan Rasio NPL Negara ASEAN
Sumber: World Bank (diolah)

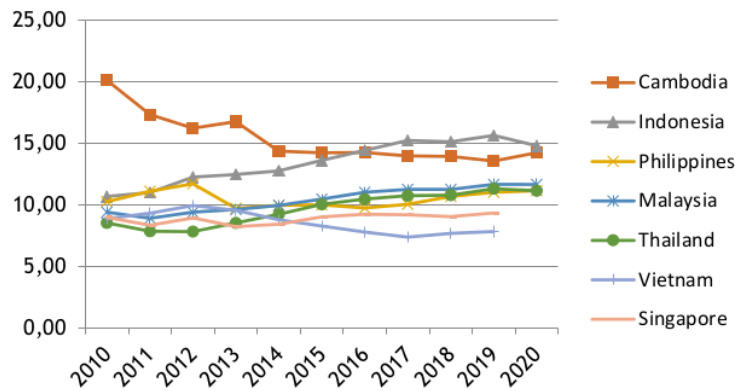
Negara ASEAN yang sukses menekan tingkat NPL perbankannya adalah Malaysia. Pada tahun 2010 negara tersebut memiliki NPL yang cukup tinggi yakni sebesar 3,35 persen. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena sejak tahun 2011 nilai NPL perbankan Malaysia berhasil ditekan secara bertahap dari tahun ke tahun, hingga pada akhir tahun 2020 NPL Malaysia berada pada level 1,57 persen. Dengan demikian selama sepuluh tahun terakhir Malaysia berhasil menekan angka kredit bermasalahnya sebesar 53 persen. Prestasi di sektor perbankan ini sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian Malaysia selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan IMF perekonomian Malaysia menunjukkan ketahanan yang baik dan memiliki kinerja yang kuat. Pertumbuhan Malaysia berjalan di atas potensi, hal tersebut didorong oleh adanya kesempatan kerja yang tinggi dan peningkatan konsumsi swasta serta investasi.

Perbankan di Indonesia sendiri memiliki nilai NPL yang cukup fluktuatif. Tahun 2010 NPL di Indonesia berada di angka 2,53 persen dan berhasil ditekan

pada level 1,69 persen pada tahun 2013, angka tersebut merupakan yang terendah selama sepuluh tahun terakhir. Kondisi ini bisa dicapai karena adanya upaya perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan aset serta menjalankan fungsi intermediasi sehingga risiko kredit dapat terkendali dengan baik (Suhendra & Ronaldo, 2017). Beberapa faktor di antaranya karena selektifnya proses penyaluran kredit yang dilakukan perbankan serta orientasi hanya pada sektor-sektor produktif. Namun angka tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2014 angka NPL terus naik hingga akhir tahun 2020 NPL di Indonesia berada pada level 2,75 persen. Nilai tersebut membuat NPL perbankan Indonesia berada di posisi tertinggi ketiga setelah Filipina dan Thailand. Kondisi tersebut sejalan dengan perekonomian Indonesia tahun 2020 yang sangat dipengaruhi dan terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, namun berdampak pula pada aspek sosial ekonomi. Turunnya mobilitas masyarakat juga ikut menekan perekonomian sehubungan dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. PDB Indonesia berkontraksi cukup dalam tahun 2020 dan terjadi hampir di setiap sektor ekonomi. Tidak hanya itu, kredit juga mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen sehubungan dengan lemahnya permintaan domestik serta kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit.

3.2. Analisis Kualitas Permodalan - CAR

Secara umum kondisi permodalan industri perbankan di negara-negara ASEAN selama sepuluh tahun terakhir dinilai cukup baik yakni pada level 8,5 persen hingga 15 persen. Pada tahun 2010 Kamboja memiliki level CAR yang sangat tinggi dan tertinggi di kawasan ASEAN yakni sebesar 20 persen. Di saat yang sama negara anggota ASEAN yang lain memiliki nilai CAR berkisar antara 8-10 persen. Dengan nilai tersebut maka kondisi permodalan perbankan Kamboja dikategorikan sangat sehat (> 12 persen) sehingga industri perbankan memiliki kesempatan yang luas untuk menyalurkan kredit terutama di sektor produktif untuk mendukung perekonomian. Tentu kesempatan tersebut tidak dilewatkan oleh negara tersebut karena ekspansi kredit dilakukan dan membuat nilai CAR terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga akhir 2020 CAR Kamboja berada di level 15,35 persen. Berdasarkan laporan IMF Bank Sentral Kamboja telah menurunkan suku bunga dengan tujuan menarik konsumen dan menaikkan kredit sektor swasta sehingga angkanya meningkat. Selain itu Bank Kamboja memiliki kelebihan likuiditas sehingga sejumlah perbankan mampu menurunkan suku bunga untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas



Gambar 7.2 Perkembangan Rasio CAR Negara ASEAN
Sumber: World Bank (diolah)

Berbeda dengan Kamboja, Vietnam memiliki nilai CAR yang paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya yakni sebesar 8,8 persen tahun 2010 dan mengalami penurunan hingga berada pada level 7,8 persen pada akhir 2019. Dengan nilai tersebut maka kondisi permodalan perbankan di Vietnam dikategorikan kurang sehat (< 8 persen). Berdasarkan data Bank Dunia, walaupun pertumbuhan ekonomi Vietnam tertinggi di kawasan ASEAN pada tahun 2019, namun perekonomian negara tersebut sebenarnya tidak terlampaui tangguh. Hal tersebut karena ekspor Vietnam secara umum turun menjadi hanya 8 persen pada 2019 padahal 2017 nilai ekspornya mencapai 21 persen. Vietnam juga sangat rentan terhadap faktor eksternal, di tengah pembangunan yang terbatas di industri manufaktur saja.

3.3. Analisis Likuiditas - LDR

LDR tidak hanya digunakan untuk melihat tingkat likuiditas sektor perbankan tetapi juga bisa menjadi ukuran apakah industri perbankan sudah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik atau belum. Di satu sisi LDR yang tinggi mengindikasikan tingginya penyaluran kredit atas dana yang dihimpun bank tetapi disisi lain tingginya nilai LDR membuat bank rentan terdampak risiko likuiditas.

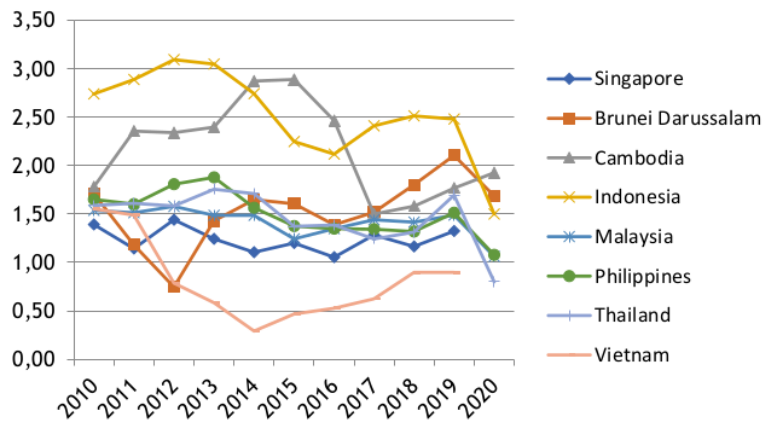
Di Indonesia nilai LDR perbankan masih di bawah 100 persen bahkan pada akhir tahun 2020 rasionya berada pada level 82,54 persen merupakan nilai terendah sejak akhir tahun 2014. Kondisi tersebut terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi dari sisi regulasi Bank Indonesia memang membatasi nilai LDR di rentang 85 persen -100 persen agar bank tidak masuk ke kategori tidak sehat. Sama seperti Indonesia, Thailand selama beberapa tahun terakhir juga memiliki nilai LDR yang tidak lebih dari 100 persen. Tahun 2018 LDR Thailand berada pada level 98,3 persen mengalami penurunan pada tahun 2019 ke level 96,3 persen dan berada pada angka 92,3 persen pada akhir 2020. Penurunan nilai LDR tersebut terjadi seiring dengan naiknya simpanan terutama dari tabungan retail dan bisnis.

Berbeda dengan Indonesia, rasio LDR Singapura cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 dan 2019 LDR Singapura berada di level 107 persen dan 105 persen, nilai yang cukup tinggi dan jika didasarkan pada peraturan Bank Indonesia angka tersebut sudah dikategorikan kurang sehat. Tahun 2020 nilai LDR perbankan Singapura mengalami penurunan hingga berapa pada level 96 persen, angka tersebut dinilai cukup aman jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi sebagai akibat Pandemi Covid-19.

3.4. Analisis Profitabilitas - ROA dan ROE

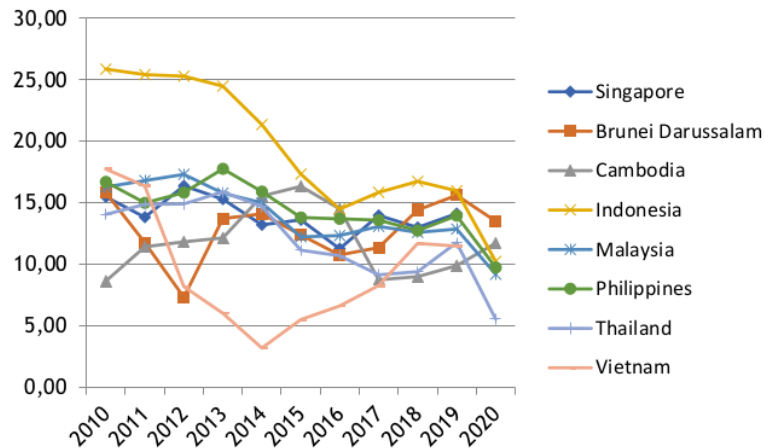
ROA menjadi indikator profitabilitas sektor perbankan, menunjukkan berapa rasio keuntungan yang bisa dibukukan bank atas pengelolaan aset yang mereka miliki. Secara umum rasio ROA industri perbankan di negara-negara ASEAN cukup stabil. Mayoritas rasio ROA negara ASEAN masih berada di bawah 1,5 persen (kecuali Indonesia dan Kamboja) artinya tingkat profitabilitasnya masih rendah.

Indonesia memiliki nilai ROA yang baik di antara negara ASEAN yang lain. Sejak tahun 2010 sampai dengan akhir 2020 tingkat profitabilitas industri perbankan Indonesia rata-rata mencapai 2,53 persen, nilai yang besar jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dengan nilai yang tinggi tersebut, perbankan Indonesia juga dikategorikan sangat sehat dalam hal profitabilitas (ROA > 1,5 persen). Rasio ini juga menunjukkan bahwa perbankan Indonesia mampu mengelola aset sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi bank. Namun demikian sejak tahun 2013 nilai ROA perbankan Indonesia terus mengalami penurunan, dan penurunan signifikan terjadi tahun 2020 di mana ROA turun hingga 40% menyentuh level 1,5 persen dari 2,48 persen pada tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi tentu sebagai imbas dari lesunya perekonomian akibat Pandemi Covid-19.



Gambar 7.3 Perkembangan Rasio ROA Negara ASEAN
Sumber: IMF (diolah)

Berbeda dengan Indonesia, ROA perbankan di Vietnam memiliki rasio yang rendah yakni rata-rata hanya sebesar 0,81 persen atau paling rendah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain selama periode 2010-2020. Dengan nilai tersebut maka industri perbankan di Vietnam masuk dalam kategori cukup sehat dalam hal profitabilitas



Gambar 7.4 Perkembangan ROE Negara ASEAN
Sumber: IMF (diolah)

Secara umum perbankan di kawasan ASEAN memiliki tingkat profitabilitas (ROE) yang cukup baik yakni berkisar antara 13,48 persen untuk periode 2010-2020. Dalam hal pengelolaan modal, Indonesia kembali memimpin di antara negara ASEAN lainnya dengan tingkat ROE rata-rata 19,36 persen. Bahkan pada tahun 2010 ROE Indonesia sempat mencapai angka 25,87 persen, nilai tersebut merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN selama satu dekade terakhir. Namun nilai tersebut terus turun pada tahun-tahun setelahnya dan penurunan paling dramatis terjadi sejak 2013 yakni dari sebesar 24,47 persen menjadi 14,48 persen pada 2016 atau turun 41 persen. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Vietnam tidak hanya memiliki nilai ROA yang rendah tetapi nilai ROE negara tersebut juga rendah. Vietnam bahkan pernah memiliki ROE hanya sebesar 3,19 persen pada tahun 2014, dengan nilai tersebut maka perbankan di Vietnam dikategorikan kurang sehat (ROE < 5 persen).

4. Kesimpulan

Industri perbankan merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian dan menjadi penggerak pembangunan karena fungsi utamanya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kembali khususnya di sektor-sektor produktif. Mengingat perannya tersebut maka kinerja perbankan juga bisa menjadi cerminan dari kondisi ekonomi suatu negara. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kinerja perbankan di kawasan ASEAN dengan mengambil

beberapa indikator kualitas perbankan di antaranya rasio NPL, CAR, LDR, ROA dan ROE.

Rasio NPL negara di kawasan ASEAN selama sepuluh tahun terakhir bergerak fluktuatif. Perbankan Singapura memiliki kualitas kredit yang paling baik karena nilai NPL paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebaliknya Thailand memiliki nilai NPL tertinggi di kawasan ASEAN, artinya kualitas kredit perbankan negara tersebut tidak begitu baik. Dari sisi permodalan, secara umum industri perbankan di negara-negara ASEAN memiliki rasio CAR yang cukup baik selama sepuluh tahun terakhir. Negara yang memiliki permodalan disektor perbankan yang kuat adalah Kamboja yakni dikategorikan sangat sehat, sedangkan Vietnam memiliki rasio CAR yang paling rendah dan masuk kategori kurang sehat. Selanjutnya dari sisi profitabilitas, secara umum rasio ROA dan ROE industri perbankan di negara-negara ASEAN memiliki nilai yang stabil namun kebanyakan nilainya masih dalam kategori cukup sehat. Indonesia memiliki tingkat profitabilitas di sektor perbankan karena memiliki nilai ROA dan ROE paling tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Sebaliknya Vietnam memiliki nilai rata-rata ROA dan ROE paling rendah di kawasan ASEAN.

5. Daftar Pustaka

- Achmad, T., & Kusumo, W. K. (2003). Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia. *Media Ekonomi & Bisnis*, XV(1), 54-75.
- Alazis, M. (2020). Effect of CAR, LDR, ROA, and NIM Toward the Commercial Bank in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(1), 225-235.
- Almilia, L. S., & Herdiningtyas, W. (2005). Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000- 2002. *Jurnal Kuntansi & Keuangan*, 7(2), 131-147.
- Amanah. (2020). Determinant Return on Assets on Rural Banks in Indonesia. *Journal of Economics and Policy*, 13(2), 447-459. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.26458>
- ² Ashraf, B. N., Zheng, C., Jiang, C., & Qian, N. (2020). Capital Regulation, Deposit Insurance and Bank Risk: International Evidence from Normal and Crisis Periods. *Research in International Business and Finance*, 52, 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101188>
- Bank Indonesia. (2020). *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional* (3rd ed.). Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan* (2nd ed.). Ghalia.
- ² Ebenezer, O. O., Islam, M. A., Yusoff, W. S., & Rahman, S. (2019). The Effects of Liquidity Risk and Interest-Rate Risk on Profitability and Firm Value among Banks in ASEAN-5 Countries. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 337-349. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.29>

- Engle, R. F., & Ruan, T. (2019). Measuring the Probability of a Financial Crisis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(37), 18341-18346. <https://doi.org/10.1073/pnas.1903879116>
- European Commission. (2014). *Proposal for a Regulation on Structural Measures Improving the Resilience of EU Credit Institutions*. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014PC0043>
- Ghosh, A. (2015). Banking-Industry Specific and Regional Economic Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from US States. *Journal of Financial Stability*, 20, 93-104. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.08.004>
- Harkati, R., Alhabshi, S. M., & Kassim, S. (2020). Influence of Economic Freedom and Its Subcomponents on Risk-Taking Behavior: Evidence from Dual Banking System of Malaysia. *Review of Behavioral Finance*, 12(4), 335-356. <https://doi.org/10.1108/RBF-09-2019-0119>
- Hunjra, A. I., Hanif, M., Mehmood, R., & Nguyen, L. V. (2020). Diversification, Corporate Governance, Regulation and Bank Risk-Taking. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(1), 92-108. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0071>
- Jacques, K., & Nigro, P. (1997). Risk-Based Capital, Portfolio Risk, and Bank Capital: A Simultaneous Equations Approach. *Journal of Economics and Business*, 49(6), 533-547. [https://doi.org/10.1016/s0148-6195\(97\)00038-6](https://doi.org/10.1016/s0148-6195(97)00038-6)
- Junaidi, S., Sulastri, Isnurhadi, & Adam, M. (2019). Liquidity, Asset Quality, and Efficiency to Sustainable Growth Rate for Banking at Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(2), 308-319. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i2.2699>
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Le, T. H. (2021). Systemic Risk in ASEAN-6: A New Empirical Investigation. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0567>
- Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. *Journal of Banking and Finance*, 36(4), 1012-1027. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012>
- Mahmud, A. (2020). Bank-specific and Macroeconomic Determinants of Profitability: Evidence from Conventional Private Commercial Banks Listed on Dhaka Stock Exchange. *International Journal of Science and Business*, 4(10), 99-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4048039>
- Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). The Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence from European Banking Sector. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(1), 86-115. <https://doi.org/10.1108/jfra-05-2015-0060>

- Meuleman, E., & Vennet, R. Vander. (2020). Macroprudential Policy and Bank Systemic Risk. *Journal of Financial Stability*, 47, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100724>
- Narayan, P. K., Phan, D. H. B., & Liu, G. (2021). COVID-19 Lockdowns, Stimulus Packages, Travel Bans, and Stock Returns. *Finance Research Letters*, 38(101732), 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101732>
- Nguyen, Q. T. T., Gan, C., & Li, Z. (2019). Bank Capital Regulation: How Do Asian Banks Respond? *Pacific Basin Finance Journal*, 57(C), 1-25. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101196>
- Ozili, P. K. (2020). Non-Performing Loans in European Systemic and Non-Systemic Banks. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 409-424. <https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033>
- Phan, D. H. B., & Narayan, P. K. (2020). Country Responses and the Reaction of the Stock Market to COVID-19—a Preliminary Exposition. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2138-2150. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1784719>
- Rehman, Z. ur, Khan, S. A., Khan, A., & Rahman, A. (2018). Internal Factors, External Factors, and Bank's Profitability. *Sarhad Journal of Management Sciences*, 4(2), 246-259.
- Roy, P. Van. (2008). Capital Requirements and Bank Behavior in The Early 1990: Cross Country Evidence. *International Journal of Central Banking*, 4(3), 29-60.
- Suhendra, I., & Ronaldo, E. (2017). Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomika*, 12(1), 169-195. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4443>
- Tangngisalu, J., Hasanuddin, R., Hala, Y., Nurlina, & Syahrul, S. (2020). Effect of CAR and NPL on ROA: Empirical Study in Indonesia Banks. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(6), 9-18. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.009>
- Usman, B., Lestari, H. S., & Puspa, T. (2019). Determinants of Capital Adequacy Ratio on Banking Industry: Evidence in Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(3), 443-453. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i3.2981>
- Wilner, B. S. (2000). The Exploitation of Relationships in Financial Distress: The Case of Trade Credit. *The Journal of Finance*, 55(1), 153-178. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00203>
- Wójcik, D., & Ioannou, S. (2020). COVID-19 and Finance: Market Developments So Far and Potential Impacts on the Financial Sector and Centres. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 111(3), 387-400. <https://doi.org/10.1111/tesg.12434>

Wu, F. (2019). Stock Market Integration in East and Southeast Asia: The Role of Global Factors. *International Review of Financial Analysis*, 67(101416), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.112061>

Zaki, E., Bah, R., & Rao, A. (2011). Assessing Probabilities of Financial Distress of Banks in UAE. *International Journal of Managerial Finance*, 7(3), 304-320. <https://doi.org/10.1108/17439131111144487>

BAB VIII

PERTUMBUHAN EKONOMI, *ECONOMIC FREEDOM* DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

(Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan *Economic Freedom* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN-6)

Oleh:

Novi Eliza; Azwardi; Abdul Bashir

1. Pendahuluan

Beberapa tujuan dari pembentukan ASEAN sebagaimana yang tertuang dalam Piagam ASEAN, diantaranya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan, kerja sama dalam bidang pendidikan dan IPTEK guna terciptanya sumber daya manusia yang lebih unggul serta penyediaan akses yang setara untuk menstimulus taraf penghidupan dan kesejahteraan yang lebih layak. Pembangunan bagi rakyat di negara ASEAN merupakan peluang dalam meningkatkan kemakmuran serta menjadi fungsi dari Indeks Pembangunan Manusia guna melihat bagaimana kebijakan nasional yang diterapkan. Indeks pembangunan manusia diciptakan untuk berfokus pada orang dan kemampuan yang mereka miliki harus menjadi kriteria utama untuk pembangunan suatu negara.

Human Development Report 2020 yang dirilis oleh UNDP menganalisis peringkat pada 189 negara dunia berdasarkan capaian indeks pembangunan manusia pada setiap negara.

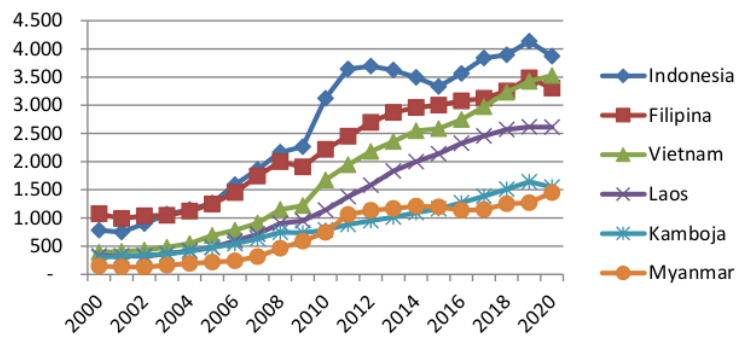
Tabel 8. 1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN Tahun 2020

Negara	Peringkat Dunia	Peringkat ASEAN	IPM
Singapura	11	1	0,938
Brunei	47	2	0,834
Darussalam	62	3	0,810
Malaysia	79	4	0,777
Thailand	106	5	0,718
Filipina	107	6	0,718
Vietnam	117	7	0,704
Laos	137	8	0,613
Kamboja	144	9	0,594
Myanmar	147	10	0,583

Sumber : UNDP, 2020. Data diolah.

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa dari sepuluh negara anggota ASEAN, hanya empat negara yang mencapai peringkat di atas 100, diantaranya yaitu Singapura, Brunei Darussalam Malaysia dan Thailand. Tiga negara teratas masuk dalam kategori negara dengan IPM sangat tinggi dan Thailand dikategorikan sebagai negara dengan IPM tinggi. Sedangkan enam negara ASEAN lainnya, seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar mencapai peringkat di bawah 100 serta masuk dalam negara dengan kategori IPM dibawah sangat tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan prioritas kebijakan pemerintah terutama di antara beberapa negara anggota sehingga belum mencapai posisi indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi serta mengindikasikan bahwa kurangnya pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara ASEAN.

Kondisi ekonomi dan tingkat pemerataan yang stabil menggambarkan tingkat kesejahteraan yang merupakan cerminan dari tercapainya standar hidup layak di suatu negara (Santoso et al., 2013). Tingkat kondisi ekonomi atau tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh suatu negara diukur dari capaian pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat besarnya produk domestik bruto (PDB) per kapita.



Gambar 8. 1 Grafik PDB per Kapita (US\$) ASEAN-6 Tahun 2000-2020

Sumber : World Bank (2021). Data diolah

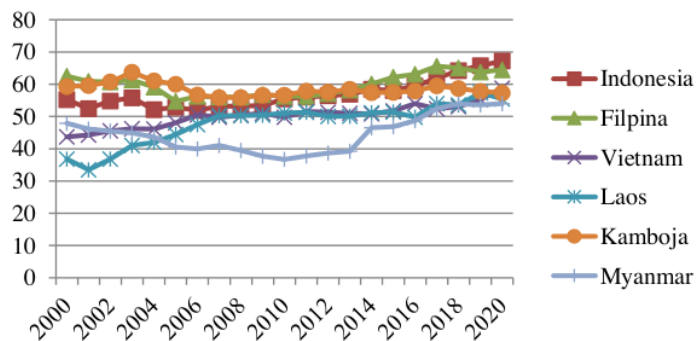
PDB per kapita pada 6 negara ASEAN memiliki pergerakan yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya saja, catatan tersebut harus diperburuk dengan adanya dampak krisis ekonomi global pada tahun 2009 serta imbas dari pandemi Covid-19 terutama sejak tahun 2019. Berdasarkan Gambar 8.1, empat negara dominan di kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam dan Laos. Sebaliknya, Kamboja dan Myanmar menjadi negara termiskin di kawasan ini dengan PDB per kapita yang kurang atau tidak lebih besar dari US\$ 2,000. Namun, secara keseluruhan PDB per kapita tahunan 6 negara ini rata-rata meningkat setiap tahun.

Selain faktor dari dalam negeri, faktor- faktor endogenous seperti faktor institusional di suatu negara sangat mempengaruhi pembangunan manusia (Laksono, 2010). Tingkat kondusifitas bagi para pelaku ekonomi untuk

menentukan berbagai keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang lebih efisien dan rasional menentukan sejahtera atau tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, perekonomian di suatu negara dapat tumbuh dengan cepat apabila sistem ekonomi yang berlaku mempunyai pengaruh yang besar. *Economic freedom* atau kebebasan ekonomi dalam bahasan ini merupakan sistem ekonomi yang dimaksud.

Peningkatan kebebasan ekonomi mampu meningkatkan keterampilan hukum antar para pelaku ekonomi, dengan peningkatan tersebut maka lapangan kerja ikut meningkat. Sebagai akibatnya, pendapatan per kapita semakin tinggi sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan pembangunan manusia juga akan meningkat (Suparyati, 2014).

Nilai indeks yang tertera pada *economic freedom* menunjukkan bahwa suatu negara akan semakin bebas dan tingkat perekonomiannya juga tinggi semakin tinggi apabila nilai indeks kebebasannya tinggi (Suparyati & Fadilah, 2015). *Country rankings index of economic freedom* menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina masing-masing menempati urutan 54 dan 70 di dunia dengan status *moderately free* (cukup bebas) sedangkan Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar memperoleh status *mostly unfree* (hampir tidak bebas). Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kawasan ASEAN-6.



Gambar 8. 2 Skor Index Economic Freedom ASEAN-6 Tahun 2000-2020

Sumber : Heritage Foundation, data diolah

Data menunjukkan bahwa empat negara terbawah yaitu Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar menyandang status negara “*mostly unfree*” untuk tingkat kebebasan ekonominya. Meskipun hanya Indonesia dan Filipina yang menjadi negara dengan status “*moderately free*” karena mempunyai skor direntang 60-69.9, namun berdasarkan Gambar 1.2, indeks kebebasan ekonomi ASEAN-6 dalam kurun waktu 2000 hingga 2020 menunjukkan pergerakan yang bervariasi,

walaupun terbilang cukup lambat, tetapi secara rata-rata meningkat setiap tahun.

2. Tinjauan Pustaka

1

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik oleh Solow dan Swan menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan output, maka harus memperoleh peningkatan dari satu atau lebih dari tiga faktor, diantaranya yaitu kuantitas yang diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang meningkat yang diperoleh melalui pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi serta tingkat tabungan dan investasi untuk memperoleh kekuatan modal. (Maharani & Isnawati, 2014). Kuznet menjelaskan bahwa kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang dan jasa kepada penduduknya merupakan faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Walt Whitman Rostow menerangkan teori derivasi perkembangan dan modernisasi yang membahas perkembangan revolusi suatu negara dari tahap tradisional hingga modern.

2.2. Teori Invisible Hand

Teori *Laissez Faire Capitalisme* atau faham kebebasan dalam berekonomi dikemukakan oleh Adam Smith mengenai sistem ekonomi liberal. Tujuan dari kebebasan berekonomi ini adalah untuk meningkatkan kemakmuran yang diperoleh oleh individu, dimana kemakmuran ini secara maksimum dengan sendirinya akan meluas dan merata hingga seluruh lapisan masyarakat. Konsep dari teori ini menitikberatkan pada mekanisme kekuatan *invisible hand* guna mencapai tingkat kemakmuran. Mekanisme pasar yang mengunggulkan peran swasta dijadikan sebagai alat alokasi sumber daya yang lebih efisien tanpa adanya campur tangan pemerintah (Sholekhah, 2018).

Peran pemerintah yang berlebihan dan distorsif akan merugikan kegiatan dari semua pelaku ekonomi sehingga terjadi suatu kondisi yang disebut dengan kegagalan pemerintah. Sumber timbulnya kegagalan pemerintah terdiri dari beberapa faktor (Mangkoesebroto, 2016), yaitu : (a) Kecenderungan pemerintah yang ingin mengatur kegiatan ekonomi hanya demi keuntungan pribadi; (b) Pelaksanaan program pemerintah bisa terjadi kegegalan; (c) Campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah; dan (d) Dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Keynes mengkritik konsep mekanisme pasar yang dicetuskan oleh aliran klasik. Ketidakseimbangan masalah sistemik sebagai dampak dari kegagalan dalam mempertemukan *demand* dan *supply* akan terjadi di suatu pasar. Ketidakseimbangan ini disebabkan karena daya beli masyarakat

mengalami kemerosotan sehingga kegagalan atas permintaan tidak bisa dihindari. Di tengah kondisi seperti ini, peran negara sangat dibutuhkan guna memulihkan dan menstabilkan perekonomian (Sholekhah, 2018).

2.3. Kebebasan Ekonomi (Economic Freedom)

Kebebasan ekonomi menggunakan pendekatan berdasarkan teori kebebasan ekonomi oleh Smith. Indeks kebebasan ekonomi menjelaskan otonomi atau kebebasan individu untuk dapat memperoleh, memanfaatkan serta menggunakan sumber daya ekonomi (Miller & Kim, 2013). Indeks kebebasan ekonomi secara umum terdiri dari 12 dimensi yang dibagi menjadi empat kategori diantaranya yaitu supremasi hukum yang terdiri dari hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan; ukuran pemerintah yang terdiri dari beban pajak, belanja pemerintah dan kesehatan fiskal; efisiensi regulasi yang terdiri dari kebebasan moneter, kebebasan bisnis dan kebebasan tenaga kerja; dan pasar terbuka yang terdiri dari kebebasan perdagangan, kebebasan finansial dan kebebasan investasi. Peringkat dalam rentang skala 0 sampai 100 mengisi setiap komponen kebebasan ekonomi.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara (Suparyati, 2014). Fokus indeks pembangunan manusia adalah pada peningkatan kualitas hidup. Dalam hal ini terdiri dari tiga aspek dimensi, diantaranya yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi daya beli yang masing-masing komponen diukur dengan harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta biaya pengeluaran per kapita (BPS, 2020).

3. Hasil Kajian

Penelitian ini menganalisis apakah kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, objek yang terpilih yaitu negara dengan status indeks pembangunan manusia berkategori di bawah sangat tinggi, yaitu 6 negara yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar selama periode 2000-2020. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah indeks pembangunan manusia yang diukur menggunakan angka indeks dalam skala 1 sampai 100, kemudian variabel independen yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDB per kapita yang diukur dengan satuan dolar AS atas harga konstan, dan variabel independen kedua yaitu kebebasan ekonomi yang diukur menggunakan skala dari 0 hingga 100.

Metode yang digunakan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG(IPMit)} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG(PEit)} + \beta_2 \text{LOG(EFit)} + e$$

Keterangan:

IPMit : Indeks Pembangunan Manusia di negara i pada tahun t

- B_0 : Konstanta
 B_1, B_2 : Koefisien regresi variabel bebas
 PE_{it} : Pertumbuhan ekonomi di negara i pada tahun t
 EF_{it} : *Economic freedom* di negara i pada tahun t
 i : Negara ke- i yang termasuk di ASEAN-6
 t : Periode ke- t yaitu dari tahun 2000-2020
 e : *Error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Dalam melakukan pengujian model regresi data panel dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan kesesuaian model dan uji hipotesis. Adapun susunannya sebagai berikut :

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai mean, nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi.

Tabel 8. 2 Hasil Statistik Deskriptif

	IPM	PE	EF
Mean	0.597270	1569.033	52.98889
Maximum	0.719000	4135.233	67.20000
Minimum	0.414000	128.0997	33.50000
Std. Dev.	0.082046	1099.712	7.255985
Observations	126	126	126

Sumber : Hasil Uji Statistik Deskriptif menggunakan Eviews 9, 2022

Tabel 8.2 memperlihatkan nilai rata-rata dari variabel IPM sebesar 0.597270, dengan nilai maksimum sebesar 0.719000 dan nilai minimum sebesar 0.414000 serta nilai dari standar deviasinya sebesar 0.082046. Berikutnya, untuk variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai rata-rata sebesar 1569.033, dengan nilai maksimum sebesar 4135.233 dan nilai minimum sebesar 128.0997 serta nilai dari standar deviasinya sebesar 1099.712. Kemudian, untuk variabel *economic freedom* sendiri mempunyai nilai rata-rata sebesar 52.98889, dengan nilai maksimum sebesar 67.20000 dan nilai minimum sebesar 33.50000 serta nilai dari standar deviasinya sebesar 7.255985.

3.2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, didapati hasil

bahwa model dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik. Sehingga, dapat dilakukan pemilihan kesesuaian model untuk tahap berikutnya.

3.3. Pemilihan Kesesuaian Model

Hasil pemilihan pengujian kesesuaian model dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.3

Tabel 8. 3 Uji Kesesuaian Model

Tipe Pengujian Model	Probabilitas <i>Chi-square</i>	Nilai Signifikansi	Hasil
Uji Chow	0.0000	0.05	Menggunakan model FEM
Uji Hausman	0.0333	0.05	Menggunakan model FEM
Uji Lagrange Multiplier	0.0000	0.05	Menggunakan model REM

Sumber : Data diolah dengan *Eviews 9*

Keterangan : LOG(IPM) C LOG(PE) LOG(EF)

Tabel 8.3 diperoleh hasil bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang sesuai untuk digunakan dalam persamaan penelitian adalah ini. Meskipun pada hasil pengujian *Lagrange Multiplier* LM menyatakan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model*, tetapi dari hasil Uji *Hausman* menyatakan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik yang digunakan dibandingkan *Random Effect Model*. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* menjadi model estimasi regresi yang akan digunakan pada persamaan penelitian ini.

3.4. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel Menggunakan Metode Fixed Effect Model

Hasil perhitungan regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* sebagai model terpilih menggunakan aplikasi *Eviews 9* adalah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8. 4 Hasil Estimasi Regresi Menggunakan Metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.354441	0.106273	-12.74495	0.0000
LOG(PE?)	0.108548	0.004003	27.11663	0.0000
LOG(EF?)	0.016016	0.029891	0.535835	0.5931

F statistic	518.4208
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* Menggunakan *Eviews*, 2022

Keterangan :

$$\text{LOG(IPM)} = -1.354441 + 0.108548 \cdot \text{LOG(PE)} + 0.016016 \cdot \text{LOG(EF)}$$

Berdasarkan dari hasil regresi, dapat diketahui bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di ASEAN-6. Perolehan nilai koefisien sebesar 0.108548 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0000 mengartikan bahwa kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.108548. Kemudian, variabel *economic freedom* dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif dan tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di ASEAN-6. Nilai koefisien *economic freedom* sebesar 0.016016 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.5931, sehingga dapat disimpulkan bahwa *economic freedom* tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia secara langsung. Berdasarkan hasil uji F, nilai probabilitas F-statistik menunjukkan hasil 0.000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan *economic freedom* secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

3.5. Uji F-Statistik

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan Uji F pada Tabel 8.4, menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah $0,000000 < 0,05$. Artinya, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel pertumbuhan ekonomi dan *economic freedom* mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

3.6. Uji t-Statistik

Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.108548 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini dapat dikatakan bahwa H_0

ditolak dan H_a diterima karena memiliki nilai < 0.05 . sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel *economic freedom* tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena mempunyai probabilitas $0.5931 > 0.05$ dan nilai koefisien 0.016016 , sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Persamaan regresi *Fixed Effect Model* yang diperoleh dari hasil estimasi model menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Signifikansi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di 6 Negara ASEAN yang berkategori dibawah “sangat tinggi” untuk peringkat IPM menjadi unsur krusial untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat, dimana peningkatan daya beli ini menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melalui pendapatan rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Rumah tangga cenderung membelanjakan pendapatannya untuk barang yang berkontribusi langsung bagi pembangunan manusia, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan sehingga akan mempengaruhi alokasi belanja dan pola konsumsi rumah tangga yang berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia secara besar.

Berdasarkan perkembangan PDB per kapita selama periode 2000 hingga 2020, memperlihatkan bahwa PDB per kapita di ASEAN-6 terus mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun dalam beberapa periode terjadi penurunan akibat krisis dan pandemi. ASEAN-6 termasuk dalam kategori negara berkembang, sebagaimana ciri negara berkembang yang dilihat dari indikator standar hidup, dimana pendapatan per kapitanya dibawah US\$ 9.000. PDB per kapita tertinggi diduduki oleh Indonesia, dengan jumlah penduduk terbanyak, Indonesia mampu memperoleh poin sebesar 0.718, sehingga menempatkan posisinya sebagai negara dengan status indeks pembangunan manusia “tinggi”. Posisi kedua ditempati oleh Filipina sebagai negara dengan PDB per kapita berada dibawah Indonesia. Meskipun demikian, kinerja perekonomian Filipina mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan menjadikannya sebagai negara dengan status indeks pembangunan manusia “tinggi”. Filipina memperoleh skor yang sama dengan Indonesia yaitu sebesar 0.718, hanya saja dimensi usia harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan pendapatan nasional per kapita Indonesia lebih unggul dari Filipina. Sedangkan, dimensi rata-rata lama sekolah Filipina lebih unggul daripada Indonesia. Vietnam merupakan negara yang memperoleh capaian laju pertumbuhan PDB per kapita yang positif sepanjang 2000 hingga 2020, hal tersebut menjadikannya sebagai satu-satunya negara

ASEAN-6 yang mampu merubah status negara berdasarkan besaran indeks pembangunan manusia yang mulanya berstatus “rendah” menjadi “sedang” pada tahun 2002 hingga menyandang status “tinggi” pada tahun 2019 yaitu sebesar 0.704.

Meskipun PDB per kapita untuk Laos, Kamboja dan Myanmar tergolong kecil, namun laju pertumbuhannya tergolong sangat pesat. Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat ini berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari besarnya indeks pembangunan manusia yang diperoleh oleh Laos yaitu sebesar 0.163 dengan status negara “sedang”. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kamboja dan Myanmar menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang tercermin dari perubahan besaran PDB per kapita, hanya saja, PDB yang cenderung lebih rendah dibanding negara lainnya ini harus membuat Kamboja dan Myanmar berada pada status indeks pembangunan manusia “rendah”.

Kinerja perekonomian yang mampu dicapai dengan baik oleh 6 negara ASEAN tersebut memberikan kontribusi besar terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hipotesis Kuznet, tingginya output per kapita menjadi salah satu karakteristik yang menandakan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan output perkapita, maka pola konsumsi yang menjadi komponen tingkat daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Rostow, masyarakat di negara berkembang akan terus melakukan konsumsi atau disebut dengan berperilaku konsumtif. Pernyataan mengenai perilaku konsumtif masyarakat sesuai dengan tahap pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W Rostow pada tahap konsumsi tinggi. Pada tahap ini, tingkat daya beli masyarakat akan permintaan barang dan jasa meningkat guna pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan.

Salah satu indikator dalam menghitung indeks pembangunan manusia adalah daya beli masyarakat yang mencerminkan dimensi standar hidup layak, indikator ini merepresentasikan aspek ekonomi dengan menggambarkan tingkat kesejahteraan melalui kualitas hidup masyarakat sebagai dampak positif dari kondisi ekonomi yang stabil dan membaiknya tingkat pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDB per kapita yang dicapai oleh negara Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar secara langsung dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Hasil temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Laode et al. (2020); Mirza (2015); Baeti (2013); Chalid & Yusuf (2014); dan Syofya (2018) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM. Namun, temuan lain menunjukkan hasil yang berbeda, Dewi et al. (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM.

3.8. Pengaruh *Economic Freedom* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel *economic freedom* tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di ASEAN-6. Perolehan hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi yang dimiliki oleh 6 negara di ASEAN ini belum efektif untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, keenam negara ini masih tertinggal jauh dari 3 negara lainnya telah mencapai skor diatas 0.80 atau berkategori “sangat tinggi”.

Hasil penelitian ini menolak teori *invisible hand* oleh Adam Smith yaitu dengan mengandalkan sistem pasar, maka tingkat kemakmuran dapat tercapai. Kebebasan ekonomi berarti individu berhak dan bebas untuk memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan sumber daya ekonomi sesuai kehendak pribadinya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kebebasan dalam hal ini berorientasi pada laba dan cara produksi secara individu atau hak milik perorangan. Dengan begitu, diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan tiap individu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Namun, jika kita ukur lebih jauh, ASEAN-6 merupakan kategori negara berkembang, dimana tidak semua individu di negara ini memiliki kemampuan yang sama untuk memegang kendali penuh dalam semua kegiatan ekonomi, akan selalu ada individu atau kelompok tertentu yang memonopoli dan menimbun kekayaannya sendiri, sehingga akan menimbulkan ketimpangan.

Hal ini sesuai dengan hipotesis Keynes bahwa suatu pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena masalah sistemik yaitu kegagalan mempertemukan sisi permintaan dan sisi penawaran. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh kegagalan permintaan yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari merosotnya daya beli masyarakat. Minimnya peran pemerintah dalam kebebasan ekonomi akan menggiring pada proses ketimpangan sosial yang membahayakan relasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini peran negara sangat dibutuhkan.

Berkaca dari pandemi Covid-19 yang telah mengacaukan perekonomian dunia. Berbagai macam strategi yang dilakukan para elit negara-negara di dunia untuk menghindari ancaman resesi global. Hasilnya, hanya sebagian kecil yang berhasil. Kondisi di tengah kegagalan pasar massif yang terjadi dan menyebabkan runtuhnya UMKM hingga industri berskala besar, mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan seperti *lock down* dan kebijakan makroprudensial guna intervensi pasar untuk mencegah jatuhnya perekonomian yang lebih dalam.

Intervensi pemerintah dapat direalisasikan melalui kebijakan fiskal, melalui pos belanja negara dan bantuan ke masyarakat guna menyeimbangkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ASEAN-6 selama dua tahun terakhir menunjukkan angka negatif. Dengan demikian, salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mendorong konsumsi yang memiliki kontribusi terbesar dalam

Produk Domestik Bruto yaitu dengan memanfaatkan alokasi anggaran belanja melalui APBN. Apabila konsumsi rumah tangga terdongkrak naik, maka diperkirakan mampu menciptakan keseimbangan sektor produksi baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Dengan adanya intervensi pemerintah dalam memelihara *equilibrium* perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, mampu menciptakan kestabilan perekonomian dan mengupayakan keadilan serta kesejahteraan suatu negara. Namun, intervensi pemerintah yang dibutuhkan akan menurun ketika suatu negara sudah masuk dalam tahap negara maju. ASEAN-6 belum siap untuk menerima kebebasan ekonomi, alasannya karena negara di kawasan ini merupakan negara berkembang yang masuk dalam tahapan pembangunan dan masih membutuhkan intervensi dari pemerintah.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan oleh Sekunmade (2021) dimana kebebasan ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara interaktif terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, temuan lain menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana Naanwaab (2018) menyelidiki pengaruh kebebasan ekonomi terhadap kondisi distribusi pembangunan manusia dari 88 pengembangan negara. Hasil menunjukkan bahwa justru negara-negara yang memiliki pembangunan manusia rendah memiliki keuntungan paling besar dari perbaikan dalam kebebasan ekonomi. Karena negara berkembang cenderung mendapat skor rendah pada indeks pembangunan manusia, negara-negara ini bisa mendapatkan keuntungan besar dari peningkatan kebebasan ekonomi mereka. Secara singkat, ada dividen pembangunan manusia yang bisa didapat dari peningkatan kebebasan ekonomi. Pembuat kebijakan di negara berkembang harus mengejar kebebasan ekonomi sebagai tujuan.

4. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di ASEAN-6. Baiknya kinerja perekonomian yang mampu dicapai memberikan kontribusi besar terhadap indeks pembangunan manusia, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin meningkatnya pertumbuhan output perkapita yang dapat mengubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat semakin tinggi yang mempresentasikan tingkat kesejahteraan melalui kualitas hidup masyarakat.

Economic freedom mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di ASEAN-6. Hasil yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa kebebasan ekonomi yang dimiliki oleh 6 negara di ASEAN belum efektif untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, dengan asumsi bahwa negara-negara yang dimasukkan dalam penelitian merupakan negara berkembang yang masih masuk dalam tahapan, sehingga belum siap untuk menerima kebebasan ekonomi.

5. Daftar Pustaka

- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85-98. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>
- ¹ BPS. (2020). Indeks Pembangunan Manusia 2020. *Publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2020*, 1-162. <https://doi.org/4102002>
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1-12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547>
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2017). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870-882.
- Laksono, R. (2010). Analisis Pengaruh Kebebasan Ekonomi dan Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Delapan Negara ASEAN Periode 1997-2007. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 11, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21002/jepi.v11i1.180>
- ¹ Laode, M., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2020). Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). *20(02)*, 58-67.
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 62-72.
- Mangkoesoebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (Edisi Keti). BPF.
- ¹ Miller, T., & Kim, A. B. (2013). Chapter 2: Defining Economic Freedom. In *2013 Index of Economic Freedom*. http://www.heritage.org/index/pdf/2013/book/index_2013.pdf
- Mirza, D. S. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 4(2), 102-113. <https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- ¹ Naanwaab, C. (2018). Does Economic Freedom Promote Human Development? New Evidence from a Cross-National Study. *The Journal of Developing Areas*, 52(3), 183-198. <https://doi.org/10.1353/jda.2018.0045>
- Santoso, S., Hamzah, A., & Syrchalad, N. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi*, 1(4), 76-88.

- ¹ Sekunmade, J. O. (2021). Fdi, Economic Freedom and Economic Growth of Nigeria. *Open Journal of Management Science (ISSN: 2734-2107)*, 2(2), 01-16. <https://doi.org/10.52417/ojms.v2i2.231>
- Sholekhah, U. (2018). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 6 Negara Asean). *Jurnal Ilmiah*.
- ¹ Suparyati, A. (2014). Pengaruh Economic Freedom Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi*, 22(2), 171-182.
- Suparyati, A., & Fadilah, N. (2015). Dampak Economic Freedom Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16(2), 158-176. <https://doi.org/10.18196/jesp.2015.0049.158-176>
- ¹ Swarmarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Econosains*, 9(2), 95-105. <https://doi.org/10.21009/econosains.0092.01>
- ¹ Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177-185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>

BAB IX

1 HUBUNGAN ANTARA URBANISASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI NEGARA ASEAN-5

Oleh:

Neldita Natama Situmeang; Azwardi; Abdul Bashir

1. Pendahuluan

Banyak Negara di dunia terutama Negara berkembang sedang mengalami fenomena “mainstream” yakni urbanisasi. Urbanisasi menjadi tantangan dalam pengembangan perekonomian di banyak negara berkembang (Fazaalloh, 2017). Urbanisasi terbentuk akibat dari meningkatnya bagian dari jumlah populasi di suatu daerah diperkotaan secara administrative. Penyebabnya infrastruktur di perkotaan sebagian besar mampu memenuhi keperluan tempat tinggal, industry, rekreasi dan layanan lain (Yakoob et al., 2010). Data berikut ini menunjukkan tingkat urbanisasi pada Negara ASEAN.

Tabel 9. 1 Urbanisasi di Negara ASEAN (%)

Negara	Indonesia	Filipina	Malaysia	Singapura	Thailand
Tingkat Urbanisasi Tahun 2015	53,7	44,4	74,7	100,0	50,4
Proyeksi tingkat perubahan tahunan (2015-2020)	2,30	1,57	2,19	1,50	2,20

Sumber: Worldbank, 2020

Tabel diatas menggambarkan bagaimana estimasi dari tingkat urbanisasi yang mana urbanisasi tertinggi sebanyak 2,30 persen terjadi di Indonesia dan 2,20 persen terjadi di Negara Thailand. Penyebab meningkatnya urbanisasi akibat sarana dan prasarana yang lengkap serta lapangan kerja di daerah perkotaan lebih banyak, Estimasi urbanisasi yang paling rendah yakni sebanyak 1,50 persen terjadi di Negara Singapura dan 1,57 persen di Negara Filipina. Hal ini karena di negara tersebut sudah terjadi pemerataan pembangunan baik di desa maupun kota.

Urbanisasi yang dilakukan oleh banyaknya penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang mana juga dapat memicu meningkatkan jumlah pengangguran akibat sumber daya manusia yang tidak memiliki produktivitas yang tinggi dan berkualitas, teknologi yang tinggi, serta kesempatan kerja yang luas. Pembangunan ekonomi di dalam Negara, pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting sebagai tolak pembangun¹ ekonomi berhasil atau tidak. Berikut ini tabel 9.2 yang menunjukkan data pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN.

Tabel 9. 2 Pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN (%)

Tahun	Negara					Rata-rata
	Indonesia	Filipina	Malaysia	Singapura	Thailand	
2014	5,00	6,34	6,00	3,93	0,98	4,45
2015	4,87	6,34	5,09	2,98	3,13	4,48
2016	5,03	7,14	4,44	3,24	3,42	4,65
2017	5,06	6,93	5,74	4,33	4,06	5,22
2018	5,16	6,34	4,74	3,43	4,15	4,76

Sumber: Worldbank, 2020

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN di tahun 2014-2018 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi yakni sebesar 5,22 persen di tahun 2017 dan yang paling rendah sebesar 4,45 persen di tahun 2014. Alasan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah peningkatan produk nasional bruto riil negara itu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi rendah dikarenakan oleh tingginya inflasi.

Langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah dengan terus mencari sumber baru pendanaan di dalam dan luar negeri. Salah satu pembiayaan yang berasal dari luar negeri tersebut adalah penanaman modal asing (Putra dan Radjamin, 2019). FDI menjadi harapan yang bisa berkontribusi tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak krisis ekonomi 1997-1998, FDI Asia Tenggara tumbuh hampir empat kali lebih tinggi yang mana menjadi daerah yang paling diminati menjadi Negara tujuan investasi. Peningkatan ini meningkatkan kepercayaan dari investor asing untuk berinvestasi (Putra dan Radjamin, 2019). Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia masuk ke dalam 20 negara yang menjadi empat negara penerima investasi asing terbesar dari tahun 2010 sampai 2012. Menurut survei kepada perusahaan-perusahaan transnasional dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dari tahun 2013 sampai 2015, Negara Asian Tenggara paling diutamakan menjadi *host country* sebagai penerima investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*).

Tabel 9. 3 Perkembangan Persentase Foreign Direct Investment Terhadap Gross Domestic Product di 5 Negara ASEAN Tahun 2012-2018

Tahun	Indonesia	Filipina	Malaysia	Singapura	Thailand
2012	2,31	1,23	2,83	18,74	3,25

2013	2,55	1,32	3,49	20,93	3,79
2014	2,82	2,02	3,14	21,82	1,22
2015	2,30	1,93	3,27	22,65	2,23
2016	0,49	2,72	4,47	22,24	0,68
2017	2,02	3,27	2,94	28,89	1,81
2018	1,81	2,97	2,39	25,00	2,62
Rata-rata	1,94	1,70	3,20	20,00	2,34

Sumber: Worldbank, 2020

Tabel 9.3. menunjukkan bahwa Negara Singapura menjadi Negara tertinggi dengan perkembangan jumlah investor asing yang selalu meningkat yakni dengan rata-rata sebesar 20 persen dari tahun 2012-2018. Sedangkan Negara terendah yakni Filipina sebesar 1,70 persen dan Indonesia sebesar 1,94 persen yang mana produk domestik bruto kurang dari 2 persen karena kondisi ekonomi negara yang tidak stabil. Investasi asing menjadi aspek yang sangat penting di semua Negara yang mana arusnya sudah di skala yang besar dan universal. Sebagian besar Negara dan wilayah berminat pada investasi asing yang beragam berdasarkan kuantitas dan kualitas yang aka memberikan keuntungan bagi semua pihak.

Pasar Asia Tenggara telah menjadi pasar yang sangat potensial karena pertumbuhan ekonomi Negara ASEAN yang di estimasi akan terus meningkat di masa depan. Populasi penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampu bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi global sehingga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Maka dari pada itu peneliti berminat untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan antara urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan FDI (Foreign Direct Investment) di 5 negara ASEAN.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kapasitas produktif yang selalu meningkat di dalam perekonomian secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang mana pendapatan dari total output yang juga semakin meningkat dan dihitung dengan perbandingan produk domestik bruto (PDB) tahun lalu dengan tahun sekarang.

PDB ialah jumlah total produksi jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu Negara satu tahun (Sukirno, 2013:34). Terdapat dua jenis perhitungan dari PDB yaitu dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu Negara dihitung dengan rumus dibawah ini:

$$G_t = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana; g_t adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun t , GDP_t adalah besarnya Gross Domestic Product pada tahun ke t , dan GDP_{t-1} adalah besarnya Gross Domestic Product pada tahun ke $t-1$.

Menurut teori pakar Keynes terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Investasi (I), Konsumsi (C), Ekspor Netto (NX),

Pengeluaran pemerintah (G). Namun selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi yakni nilai tukar, tingkat pendapatan, suku bunga, tingkat harga, tingkat inflasi, jumlah peredaran uang. Menurut Todaro (2015) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

(a) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar mengungkapkan suatu negara haruslah memiliki perkembangan ekonomi yang stabil dalam waktu jangka panjang. Kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam teori ini dan secara bersamaan memainkan dua peran dalam mempengaruhi perekonomian, yaitu efek positif pada pendapatan pemerintah dan peningkatan kapasitas produksi ekonomi modal.

Model Harrod-Domar didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

- (1) ekonomi memiliki pekerjaan penuh dan ekonomi tertutup,
- (2) tidak ada intervensi pemerintah,
- (3) APS sama dengan MPS dan MPS tetap konstan,
- (4) Rasio persediaan modal terhadap pendapatan diasumsikan tidak berubah,
- (5) tidak ada penyusutan barang modal,
- (6) tingkat harga umum konstan (upah riil sama dengan pendapatan riil),
- (7) tingkat bunga tidak berubah.

(b) Teori Neo Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada peningkatan pasokan faktor produksi (akumulasi modal, penduduk, tenaga kerja dan teknologi). Teori ini mengemukakan bahwa kondisi harus selalu cenderung ke arah persaingan sempurna agar perekonomian dapat tumbuh secara optimal.

2.1.3. Teori Modernisasi Pembangunan

Teori modernisasi akan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan yang selalu menjadi permasalahan di banyak Negara berkembang (Rahayu, 2014). Teori ini terdiri dari teori fungsional dan teori perkembangan. Dalam teori fungsional, modernisasi bersifat sistematis, transformatif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial bersifat lambat, linier dan bertahap serta masyarakat mengalami perkembangan dari tahap primitif ke tingkat yang lebih maju. Dengan demikian dari asumsi itu, para ahli teori modernisasi menyajikan referensi teoretis dan karya-karya yang mencirikan modernisasi sebagai proses yang tidak dapat diubah, homogenisasi, proses bertahap jangka panjang, dan proses Barat sebagai arah kebijakan industri dan ekonomi. perkembangan

2.1.4. Teori Urbanisasi

Fenomena meningkatnya populasi penduduk di daerah perkotaan yang beriringan dengan kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan disebut Urbanisasi. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah mortalitas dan natalis di suatu wilayah, kondisi ekonomi, sosial, pendapatan per kapita, kesehatan, pendidikan, industrialisasi fasilitas dasar, dan kebijakan pemerintah. Terdapat berbagai aspek yang mendukung dan mendorong masyarakat melakukan urbanisasi (Widiawaty, 2019). Urbanisasi yakni fenomena yang terjadi secara alami searah dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah (Adam et al., 2012).

2.1.5. Teori Investasi

Salah satu aspek yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi yaitu investasi. Di antara berbagai faktor percepatan pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan tingkat teknologi, investasi sebagai akumulasi modal merupakan faktor utama dalam meningkatkan dan mengandakan kualitas sumber daya fisik dan manusia (Todaro dan Smith, 2011). Rankiw (2007) berhipotesis bahwa jika suatu negara membuka ekonominya dan arus masuk modal bersih positif, jika tabungan domestik melebihi investasi domestik, maka surplus ekonomi akan mengalir ke luar negeri. Dalam perekonomian terbuka, jika arus masuk bersih negara negatif, akan ada arus masuk ke perekonomian. Dengan kata lain, investasi melebihi tabungan, dan ekonomi mengharapkan investasi asing langsung (FDI) untuk mendanai investasi. Secara garis besar, di negara-negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, terdapat tiga sumber utama modal asing: kredit luar negeri (utang), investasi asing langsung (FDI), dan investasi portofolio. Romana (2011:9-10) membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi asing langsung: pertumbuhan ekonomi, rasio ekspor-impor terhadap PDB, dan nilai tukar.

3. Hasil Kajian

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung di lima negara ASEAN: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Periode penelitian adalah dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2019. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas yaitu urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan FDI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model kausal yang dilakukan dalam beberapa tahapan: uji akar unit, uji lag optimal, uji kointegrasi Johansen, dan uji kausalitas Granger. Adapun tahap-tahap pengujian penelitian ini sebagai berikut :

3.1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Hasil pengujian ADF unit root diharuskan dibawah 0,05 agar data stasioner agar model yang dihasilkan tidak lancung (spurious regression).

Tabel 9. 4 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Indonesia

Variabel	Uji ADF								
	Urbanisasi			GDP			FDI		
Nilai Kritis	1%	5%	10%	1%	5%	10%	1%	5%	10%
Level	3,64 6,34 2	2,95 4,02 1	2,61 5,81 7	3,63 9,40 7	2,95 1,12 5	2,61 4,30 0	3,64 6,34 2	2,95 4,02 1	2,6 15, 817
Prob.	0,1379			0,9984			0,9551		
1 st differences	3,65 6,34 2	2,95 4,02 1	2,61 5,81 7	3,65 3,73 0	2,95 7,11 0	2,61 7,43 4	3,64 6,34 2	2,95 4,02 1	2,6 15, 817
Prob.	0,7663			0,0087			0,0000		

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel hasil uji akar unit diatas menunjukkan bahwa semua variable di Indonesia pada tingkat level masih berada diatas 0,05 yakni Urbanisasi sebesar 0,1379, GDP sebesar 0,9984, dan FDI sebesar 0,9551. Sehingga dilakukan uji kembali di tingkat 1st differences dan didapatkan bahwa variabel GDP dan FDI sudah dibawah 0,05 yakni 0,0087 dan 0,000 sehingga sudah stasioner. Dengan demikian hasilnya menunjukkan prob dibawah 0,05 atau Ho ditolak artinya seluruh variabel sudah stasioner di tingkat first difference.

Tabel 9. 5 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Filipina

Variabel	UJI ADF								
	Urbanisasi			GDP			FDI		
Nilai Kritis	1%	5%	10%	1%	5%	10%	1%	5%	10%
Level	3,646 ,342	2,954 ,021	2,615 ,817	3,639 ,407	2,951 ,125	2,614 ,300	3,639 ,407	2,951 ,125	2,614 ,300
Prob.	0,0121			0,0000			0,0079		
1 st differences	3,636 ,242	2,957 ,110	2,617 ,434	3,646 ,342	2,954 ,021	2,615 ,817	3,646 ,342	2,954 ,021	2,615 ,817
Prob.	0,1310			0,0000			0,0000		

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel hasil uji akar unit diatas menunjukkan bahwa di tingkat level semua variable urbanisasi, GDP dan FDI di Negara Filipina di tingkat level menunjukkan angka sebesar 0,0121, 0,000, 0,0079. Artinya semua variable yang diteliti menghasilkan prob MC Kinon Critical Value (5%) dan menolak Ho sehingga sudah stasioner di tingkat level. Dengan demikian semua data variable yang diteliti sudah stasioner dan tidak menimbulkan model yang dihasilkan lancung (spurious regression).

Tabel 9. 6 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Malaysia

Variabel	UJI ADF					
	Urbanisasi			GDP		
Nilai Kritis	1%	5%	10%	1%	5%	10%
Level	-	-	-	-	-	-
Prob.	3,646,342	2,954,021	2,615,817	3,639,407	2,951,125	2,614,3
		0,2954			0,0005	
1 st differences	-	-	-	-	-	-
Prob.	3,653,730	2,957,110	2,617,434	3,653,730	2,957,110	2,617,4
		0,0000			0,0000	

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel hasil uji akar unit diatas menunjukkan bahwa semua variable di Malaysia pada tingkat level hanya GDP yang prob nya sudah berada di bawah 0,05 yakni sebesar 0,0005 artinya Ho ditolak. sedangkan variable lainnya GDP prob nya 0,2954 dan FDI sebesar 0,07. Sehingga dilakukan pengujian kembali di tingkat 1st differences. Semua variabel di tingkat 1st differences menunjukkan berada di bawah nilai kritis 0,05 yaitu urbanisasi sebesar 0,000, GDP sebesar 0,000 dan FDI sebesar 0,0002. Maka Ho ditolak dan data sudah stasioner.

Tabel 9. 7 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Singapura

Variabel	UJI ADF					
	Urbanisasi			GDP		
Nilai Kritis	1%	5%	10%	1%	5%	10%
Level	-	-	-	-	-	-
Prob.	3,646,342	2,954,021	2,615,817	3,639,407	2,951,125	2,614,3
		0,7719			0,0007	
1 st differences	-	-	-	-	-	-
Prob.	3,643,730	2,957,110	2,617,434	3,653,730	2,957,110	2,617,4
		0,0381			0,0000	

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel hasil uji akar diatas menunjukkan bahwa variable di Singapura pada tingkat level GDP sebesar 0,0007 dan FDI sebesar 0,0192 berada di bawah nilai kritis 0,05 artinya data sudah stasioner. Namun urbanisasi lebih dari 0,05 yakni 0,7719 sehingga dilakukan pengujian kembali di tingkat 1st differences dan didapatkan semua variabel sudah berada di bawah 0,05. Sehingga semua variabel telah stasioner.

Tabel 9. 8 Hasil Unit Root Test Urbanisasi, GDP, dan FDI Thailand

Variabel	UJI ADF					
	Urbanisasi			GDP		
Nilai Kritis	1%	5%	10%	1%	5%	10%
Level	3,646,342	2,954,021	2,615,817	3,639,407	2,951,125	2,614,3
Prob.	0,9401			0,0445		
1 st differences	-	-	-	-	-	-
Prob.	3,653,730	2,957,110	2,617,434	3,646,342	2,954,021	2,615,8
	0,5057			0,0000		

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel hasil uji akar diatas menunjukkan bahwa variable di Thailand pada tingkat level GDP sebesar 0,0445 dan FDI sebesar 0,0084 berada di bawah nilai kritis 0,05 artinya data sudah stasioner. Namun urbanisasi lebih dari 0,05 yakni 0,9401 sehingga dilakukan pengujian kembali di tingkat 1st differences dan didapatkan semua variabel sudah berada di bawah 0,05 sehingga semua variabel telah stasioner.

3.2. Uji Lag Optimum

Uji ini agar mengetahui lag berapa agar hasil model yang dihasilkan optimum dengan pemilihan jumlah palig kecil dari Schwarz Criterion (SC), Hannan-Quinn Criterion (HQ) dan Akaike Information Criterion (AIC). Setelah dilakukan uji lag optimum untuk Negara Indonesia ditemukan bahwa bahwa lag optimum untuk penelitian pada lag ketiga (3).

Tabel 9. 9 Hasil Uji Lag Optimum 5 Negara ASEAN

Negara	Lag	Kriteria		
		AIC	SC	HQ
Indonesia	1	6.481861	7.031512	6.664055
	2	5.018167	5.980057	5.337006
	3	3.922243*	5.296371*	4.377728*
Filipina	1	6.701738	7.251389	6.883932

	2	5.482038*	6.443927*	5.800877*
	3	5.491551	6.865678	5.947035
Malaysia	1	86.71083	87.26592	86.89177
	2	84.56703*	85.53844*	84.88368*
	3	84.90657	86.29430	85.35893
Singapura	1	8.328173	8.877824	8.510366
	2	6.800025*	7.761914*	7.118864*
Thailand	1	9.477312	10.02696	9.659505
	2	8.042887	9.004777	8.361726
	3	7.354684*	8.728811*	7.810168*

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Negara Filipina lag optimum berada di lag kedua, Negara Malaysia pada lag kedua, Negara Singapura mempunyai nilai AIC, SC, HQ terkecil yang berada pada lag kedua. Sedangkan Negara Thailand lag optimum berada di lag ketiga.

3.3. Uji Kointegrasi Johansen

Tabel 9. 10 Hasil Uji Kointegrasi Johansen di 5 Negara ASEAN

Negara	Hypothesized	Uji Kointegrasi Johansen		Prob.*
		T-Statistik	Nilai Kritis	
Indonesia	None*	43.38650	29.79707	0.0008
	At most 1*	21.99464	15.49471	0.0045
	At most 2*	10.34058	3.841466	0.0013
Filipina	None*	41.46777	29.79707	0.0015
	At most 1*	18.83983	15.49471	0.0151
	At most 2*	6.141605	3.841466	0.0132
Malaysia	None*	64.79824	29.79707	0.0000
	At most 1*	37.81066	15.49471	0.0000
	At most 2*	15.68558	3.841466	0.0001
Singapura	None*	60.27100	29.79707	0.0000
	At most 1*	15.61511	15.49471	0.0480
	At most 2	2.607705	3.841466	0.1063
Thailand	None*	46.16772	29.79707	0.0003
	At most 1	13.13795	15.49471	0.1098
	At most 2	0.178027	3.841466	0.6731

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Hasil pengujian kointegrasi Johansen di Negara Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina didapatkan bahwa seluruh variable penelitian memiliki nilai trace statistic diatas di bawah nilai kritis 0,05 artinya menolak Ho dan menerima H1 sehingga terdapat kointegrasi seluruh variabel atau terdapat keseimbangan jangka panjang.

3.4. Uji Kausalitas Panel Granger

Tabel 9. 11 Hasil Uji Kausalitas Negara Indonesia

Hipotesis	F-Statistic	Prob.
GDP → URBANISASI	55.3571	4.00E-11
URBANISASI → GDP	1.5846	0.218
FDI → URBANISASI	3.69609	0.025
URBANISASI → FDI	1.67317	0.1982
FDI → GDP	0.24529	0.8639
GDP → FDI	4.02102	0.0183

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel 9.11 menunjukkan hasil uji *Granger causality* yang mana menemukan beberapa variabel memiliki prob dibawah nilai kritis 0,05 dengan hubungan searah. Variabel FDI terhadap urbanisasi dengan prob sebesar 0,0250 artinya variabel FDI mempengaruhi variabel urbanisasi secara signifikan namun tidak terjadi sebaliknya atau hubungan hanya satu arah. Variabel GDP atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi secara signifikan terhadap FDI dengan prob sebesar 0,0183 tau menolak Ho namun hubungan hanya searah.

Tabel 9. 12 Hasil Uji Kausalitas Negara Filipina

Hipotesis	F-Statistic	Prob.
GDP → URBANISASI	1.57823	0.2241
URBANISASI → GDP	1.60163	0.2195
FDI → URBANISASI	2.04635	0.1481
URBANISASI → FDI	0.48813	0.6189
FDI → GDP	2.51303	0.0991
GDP → FDI	0.33019	0.7215

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel 9.12 menunjukkan hasil uji *Granger causality* yang mana semua variabel memiliki prob di atas nilai kritis 0,05 sehingga tidak terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya secara signifikan.

Tabel 9. 13 Hasil Uji Kausalitas Negara Singapura

Hipotesis	F-Statistic	Prob.
GDP → URBANISASI	0.82722	0.4477
URBANISASI → GDP	3.07662	0.062
FDI → URBANISASI	4.31083	0.0237
URBANISASI → FDI	1.79006	0.1862
FDI → GDP	0.18038	0.836
GDP → FDI	1.75642	0.1918

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel 9.13 menunjukkan hasil uji *Granger causality* yang mana terdapat beberapa variabel memiliki prob dibawah nilai kritis 0,05 dengan hubungan searah. Variabel GDP atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi urbanisasi yang mana prob sebesar 0,0014 artinya secara signifikan mempengaruhi dan terjadi hubungan 2 arah yang mana urbanisasi juga mempengaruhi FDI dengan prob 0,0114.

Variabel FDI mempengaruhi secara signifikan terhadap urbanisasi dan juga sebaliknya atau terjadi hubungan dua arah karena nilai prob dibawah nilai kritis 0,05. Namun variabel FDI mempengaruhi GDP atau pertumbuhan ekonomi dengan hubungan searah karena GDP terhadap FDI berada diatas 0,05.

Tabel 9. 14 Hasil Uji Kausalitas Negara Thailand

Hipotesis	F-Statistic	Prob.
GDP → URBANISASI	5.80422	0.0037
URBANISASI → GDP	0.45443	0.7165
FDI → URBANISASI	8.05283	0.0006
URBANISASI → FDI	0.97427	0.4205
FDI → GDP	0.33609	0.7994
GDP → FDI	2.40353	0.0914

Sumber: Hasil Estimasi dengan Eviews 9

Tabel 9.14 menunjukkan hasil uji *Granger causality* yang mana terdapat beberapa variabel memiliki prob dibawah nilai kritis 0,05 dengan hubungan searah. Variabel GDP atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi urbanisasi yang mana prob sebesar 0,0037 artinya secara signifikan mempengaruhi dan tidak terjadi hubungan dua arah. Selanjutnya variabel FDI

mempengaruhi urbanisasi dengan prob di bawah nilai kritis 0,05 sehingga menolak H_0 . Namun hubungan hanya terjadi searah.

Hasil regresi data panel Negara Indonesia menggunakan uji akar unit menunjukkan probabilitas urbanisasi di Indonesia sebesar 0,1379, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0087 dan *Foreign Direct Investment* sebesar 0,0000 artinya probabilitas signifikan $\alpha < 0,05$. Uji kointegrasi menunjukkan bahwa trace statistik $< 0,05$ sehingga yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang. Variabel FDI mempengaruhi urbanisasi namun hanya satu arah yang mana hal ini didukung oleh penelitian dari Manullang & Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap FDI secara positif. Adapun teori yang sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu teori Harrod-Domar yang mengungkapkan bahwa investasi dan pembentukan modal akan memperkokoh pertumbuhan ekonomi (*steady growth*).

Negara Filipina melalui hasil data panel uji akar unit dengan nilai prob urbanisasi sebesar 0,0121, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0000 dan *Foreign Direct Investment* sebesar 0,0079.

Nilai prob tersebut dibawah nilai kritis 0,05 yang mana sudah signifikan. Hasil dari pengujian causality granger tidak ditemukan adanya variabel-variabel penelitian di Negara Filipina yang berpengaruh signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian Manullang & Hidayat (2015) yang menemukan pertumbuhan ekonomi dengan FDI saling tidak mempengaruhi.

Negara Malaysia melalui hasil data panel uji akar unit dengan nilai prob urbanisasi sebesar 0,0000, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0005 dan *Foreign Direct Investment* sebesar 0,0704. Nilai prob tersebut dibawah nilai kritis 0,05 yang mana sudah signifikan. Variabel GDP atau pertumbuhan ekonomi di Malaysia hanya variabel FDI yang mempengaruhi secara signifikan terhadap urbanisasi dengan prob sebesar 0,0237 atau menolak H_0 namun hubungan hanya searah. Persamaan kointegrasi menunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang di semua variabel. Makin maju kondisi ekonomi di suatu wilayah maka tingkat urbanisasi akan semakin tinggi. Menurut Adam, et al (2012) bahwa urbanisasi selalu beriringan dengan kesejahteraan dan kondisi ekonomi di suatu wilayah.

Negara Singapura melalui *unit root test* dengan nilai probabilitas urbanisasi sebesar 0,0381, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0007 dan *Foreign Direct Investment* sebesar 0,0192 artinya telah signifikan. Hasil penelitian mengemukakan persamaan kointegrasi memiliki keseimbangan jangka panjang dan terdapat hubungan timbal balik yakni GDP mempengaruhi urbanisasi dan sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian dari Agustin, dkk (2021) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh FDI di Singapura. Teori Neo klasik juga sejalan dengan penelitian ini yakni kondisi ekonomi bergantung terhadap tingkat modal, penduduk dan teknologi.

Hasil dari uji unit akar untuk Negara Thailand menunjukkan prob untuk variabel urbanisasi sebesar 0,9401 pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0445 dan *Foreign Direct Investment* sebesar 0,0084 artinya telah signifikan. Semua variabel berhubungan jangka panjang. Variabel GDP atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi urbanisasi yang mana prob sebesar 0,0037 artinya secara signifikan mempengaruhi dan tidak terjadi hubungan dua arah karena urbanisasi tidak diiringi dengan kualitas SDM dan produktivitas penduduk. Sedangkan

variabel lain FDI mempengaruhi urbanisasi. Hal ini dikarenakan investasi yang tinggi membuat sarana dan prasarana lebih lengkap, ekonomi lebih maju, lapangan kerja pun makin luas sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan urbanisasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul hubungan antara urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan foreign direct investment (fdi) di negara asean-5 dapat disimpulkan bahwa setiap variabel menunjukkan nilai probabilitas di negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) menghasilkan nilai probabilitas di bawah 5% sehingga data yang diteliti signifikan. Lag optimum di setiap objek penelitian beragam seperti Indonesia lag 3, Negara Filipina lag optimum berada di lag kedua, Negara Malaysia pada lag kedua, Negara Singapura mempunyai nilai AIC, SC, HQ terkecil yang berada pada lag kedua. Sedangkan Negara Thailand lag optimum berada di lag ketiga. Semua variabel di setiap Negara penelitian memiliki hubungan jangka panjang. Setiap variabel penelitian di Negara yang diteliti memiliki perbedaan. Ada Negara yang variabelnya terdapat hubungan timbal balik atau dua arah, terdapat juga yang hanya memiliki hubungan 1 arah serta Negara Filipina yang semua variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara satu sama lain.

5. Daftar Pustaka

- Adam, F. P. (2012). Tren Urbanisasi Di Indonesia. *Piramida*, 6(1), 1-15.
- Agung, P., Hartono, D., Awirya, A. A. (2017). Pengaruh urbanisasi terhadap konsumsi energi dan emisi CO₂: Analisis provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 9-17.
- Aprianto. (2018). Determinan aliran masuk FDI ke negara-negara berpendapatan rendah: Analisis data panel. *Jurnal Ekonomi dan kebijakan pembangunan*, hlm 174-188. Vol.7 no.2.
- ASEAN Investment Report. (2019). ASEAN Investment Report 2019. In *ASEAN Secretariat* (Issue 1).
- Aziz, N.N.A., Hassan, W.H.A.W., & Saud, N.A. (2012). The effect of urbanization towards social and cultural changes among Malaysia settlers in the Federal Land Development Schemes (FELDA), Johor Darul Takzim, *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 68, 910-920.
- Dao, M. (2002). An analysis of growth of urbanization in developing economies. *The Journals of Developing Areas*, 36 (1), 81-91.
- Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels, *Economic Modelling*, 29(4), 1450-1460.

- Enders, Walter. 2004. *Applied Econometric Time Series*. Edisi 2. University of Alabama S.
- Fajrianiingsih, N. (2018). *Analisis Kausalitas Antara Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1992-2015* (Doctoral issertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Fazaalloh, A. (2017). *Urbanisasi, Indutrialisasi, Pendapatan, dan Pendidikan di Indonesia*. Volume 1 No. 01 Tahun 2017.
- Febryani, T. (2017). *Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1).
- Gujarati, D. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Salemba Empat Jakarta
- Hakim, Abdul. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. McGraw-Hill. Internasional Edition. Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ikhwan dan Ariusni. (2019). *Analisis Kausalitas Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, Hal 383-392.
- Jhingan, M.L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Kuncoro, M, (2004), "Otonomi dan Pembangunan Daerah" , Erlangga, Jakarta.
- Kurniasih, E. P. (2020). *Perkembangan investasi asing di negara ASEAN*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 362-370.
- Liu, H. Y., and Deseatnicov, I. (2016). *Exchange rate and Chinese outward FDI*. *Applied Economics*, 48, 4961-4976. DOI: 10.1080/00036846.2016.1167831.
- Mankiw, N.G.,. (2007). *Makro Ekonomi*. Jakarta; Erlangga.
- Manullang & Hidayat. (2014). *Analisis kausalitas antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN*. Departemen ekonomi pembangunan USU, 2015.
- Mutmainah, D., & Rachmawati, N. (2016). *ASEAN sebagai instrumen Adaptasi Singapura terhadap Globalisasi*. *Transformasi Global*, J (1), 55-73. <http://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/11>
- Nusantara, A. (2013). *Faktor Pendorong Aliran Masuk Investasi Langsung Asing di Negara Sedang Berkembang*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Mei 2013, Hal: 52-65. ISSN: 1979-4878

- Putra & Radjamin. (2019). Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah ASEAN Periode 2004-2016. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23 (2), 57-66, 2019.
- Rahayu, T. I. (2014). Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar (Tabungan dan Investasi). *Gema Eksos*, 6(1), 218025.
- Rahman, Bagus Aditya, Mochammad Al Musadieq, and Sri Sulasmiyati. (2017). "Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 2005-2014)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 45(1): 55-62.
- Rahmawati, T. (2020). Urbanisasi dan polemik penduduk kota di Indonesia.
- Rohmana, Yana. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung di Indonesia Periode 1980-2008. *Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan* 5 Volume 6, No. 2. Training Manajer BRI, Jakarta.
- Saputra, I Gede, and I Wayan Wita Kesumajaya. (2016). "Pengaruh Utang Luar Negeri, Ekspor, Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1996-2013." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5(4): 385- 412.
- Shafiyah, Mas'udi Faridatush. (2013). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah terhadap Pembiayaan Investasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Shahbaz, M., Loganathan, N., Muzzafar, A.T, Ahmed, K., & Jabran, M.U. (2016). How urbanization affects CO₂ emissions in Malaysia? The application of STIRPAT model. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 57, 83-93
- Sukirno, S. (2013). "Makro ekonomi Teori Pengantar", Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto dkk. (2019). Investasi Asing Langsung dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN periode 2004-2016. *Ekonomi & bisnis: berkala publikasi gagasan konseptual, hasil penelitian, kajian dan terapan teori*. Vol.23 no.2.
- Tambunan, TH. Tulus, (2001), "Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori & Penemuan Empiris", Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Taufik, Muhammad, Rochaida Eny, and Fitriadi. (2014). "Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur." *Ekonomi Kuantitatif Terapan* 7(2): 90-101. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=366138&val=953&title=Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=366138&val=953&title=Pengaruh%20Investasi%20Dan%20Ekspor%20Terhadap%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Serta%20Penyerapan%20Tenaga%20Kerja%20Provinsi%20Kalimantan%20Timur).

Tjiptoherijanto, Prijono., (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan* Volume 10 Nomor 2 Tahun S1999. PPK UGM, Yogyakarta.

Theodoris dkk. 2017. Pengaruh indeks kemudahan berbisnis, *Foreign Direct Investment*, dan populasi penduduk terhadap perekonomian ASEAN. Vol.6 no.11 Nopember 2017 *E-Jurnal EP Unud*, 6[12]: 2322-2351. ISSN: 2303-0178.

UNPD - United Nations Population Division (2015) *World Urbanization Prospects- The 2014 Revision*, New York: United Nations.

Widiawaty. (2019). Faktor-faktor Urbanisasi di Indonesia.

¹ World Bank (2016). *World Development Indicators*, <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators> (diakses 12 Maret 2021).

World Bank (2020). *World Development Indicators*, <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators> (diakses 12 Maret 2021).

Yakoob, U., Masron, T., & Masami, F. (2010). Ninety years of urbanization in Malaysia: A geographical investigation of its trend and characteristic, *J. Ritsumeikan Soc Sci Humanit*, 4, 79-101.

BAB X

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di ASEAN-5

Oleh:

Sherly Monica; Azwardi; Sukanto

1. Pendahuluan

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan salah satu kawasan berkembang dengan aktivitas konsumsi paling dinamis di dunia. ASEAN adalah organisasi yang didirikan oleh lima negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Asosiasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, sehubungan dengan Deklarasi Bangkok. Sejauh ini, masing-masing otoritas ASEAN telah berkembang menjadi 10 negara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk memajukan masyarakat Asia Tenggara tanpa berhenti pada berbagai bentuk partisipasi, salah satunya adalah kerjasama di bidang keuangan. Selain itu, IMF menempatkan lima negara ASEAN sebagai negara ASEAN-5 karena memiliki ekonomi yang kuat di kawasan ASEAN. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sebagai negara di kawasan ASEAN dengan perekonomian yang kuat, negara-negara ASEAN-5 terus mengembangkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya. Aspek penting dalam perekonomian adalah aktivitas konsumsi (Matitamole, 2017). Konsumsi ini terdiri dari pengeluaran konsumsi sektor publik dan pengeluaran konsumsi rumah tangga swasta. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator pembangunan suatu negara (Chendrawan, 2017).

Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 pada Gambar 10.1 tampak fluktuatif bahkan menurun selama 11 tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir yaitu, tahun 2019-2020 terjadi penurunan drastis akibat wabah COVID-19. Pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 yang tidak menentu menunjukkan masih adanya pasang surut perekonomian. Sebagai indikator penting, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebiasaan konsumen.



Gambar 10. 1 Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-5, 2010-2020
Sumber: World Bank, (2021). Data diolah

Berbeda dengan Keynes yang menekankan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Wagner menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong fundamental pengeluaran konsumsi pemerintah (Sukartini & Saleh, 2012). Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan pengeluaran pemerintah (Hanifah et al., 2017). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pemerintah cenderung meningkatkan pengeluarannya untuk penyediaan layanan dan kebutuhan publik karena permintaan publik yang tinggi (Nahumuri, 2019). Alasan pentingnya konsumsi publik meningkat dengan pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas sektor publik menggantikan aktivitas sektor swasta karena tanggung jawab protektif dan manajerial negara ditekankan selama proses industrialisasi (Sudarsono, 2010). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan pertumbuhan pendapatan masyarakat, terlepas dari perubahan struktur ekonomi (Efendi et al., 2020). Nilai pertumbuhan ekonomi yang berubah setiap tahunnya juga mempengaruhi konsumsi masyarakat (Akrom, 2020). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian juga pendapatan. Daya beli riil masyarakat dan permintaan akan jasa dan barang juga meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga meningkat (Ali et al., 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diartikan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah ASEAN-5 dan pengeluaran konsumsi rumah tangga ASEAN-5. Namun, berbeda dengan data Bank Dunia, di mana tren pertumbuhan ekonomi bervariasi sesuai dengan perkembangan belanja konsumsi pemerintah dan rumah tangga di ASEAN-5.

Tabel 10. 1 Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Negara-Negara ASEAN-5 tahun 2020 (dalam persen)

Negara	Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Indonesia	-2,07	41	53
Malaysia	-5,59	62,55	77,17
Filipina	-9,57	119,99	57,20
Thailand	-6,09	28,22	29,96
Singapura	-5,39	58,44	18,60

Sumber: World Bank, (2021). Data diolah

Tabel 10.1 menunjukkan bahwa terdapat fenomena pertumbuhan ekonomi dengan tren negatif yang tidak berbanding lurus dengan pengeluaran konsumsi pemerintah dan rumah tangga yang menunjukkan tren positif. Dalam arti lain, fenomena ini bertentangan dengan (Nahumuri, 2019) dan (Ali et al., 2014). Perbedaan antara asumsi para ahli dan pengetahuan yang ada harus ditelaah lebih lanjut, karena dengan teori yang sudah terbukti berbeda maka

kebijakan pemerintah juga berbeda. Selain itu, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah dan rumah tangga di kawasan ASEAN-5 belum diteliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah dan rumah tangga di ASEAN-5 selama periode 2010-2020.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Konsumsi

Teori konsumsi modern dimulai dengan analisis Keynes tentang landasan psikologis perilaku konsumsi dalam bukunya *General Theory: "Human are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption, as their income increases, but not by as much as the increase in their income"*

Keynes menyatakan bahwa pendapatan berhubungan langsung dengan tingkat konsumsi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, fungsi konsumsi diformulasikan untuk mewakili tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan (Sukirno, 2001):

$$C = a + bY$$

Keterangan:

C = konsumsi rumah tangga (agregat)

a = besarnya konsumsi ketika pendapatan nol (konsumsi otonom)

b = MPC

Y = pendapatan disposibel

Asumsi teori konsumsi Keynesian berikut didasarkan pada fungsi ini:

- Ketika pendapatan meningkat, nilai konsumsi dan tabungan meningkat. Hal ini dicapai dengan mengasumsikan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC) adalah antara nol dan satu dari jumlah konsumsi pendapatan.
- Pendapatan dialokasikan untuk tabungan, sehingga kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (APC) turun ketika pendapatan tinggi. Orang berpenghasilan tinggi cenderung menabung dalam jumlah besar dibandingkan dengan orang berpenghasilan rendah.
- Dibandingkan dengan bunga, pendapatan merupakan penentu konsumsi yang penting.

Berdasarkan teori Keynesian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi seseorang. Menurut Duesenberry, semua lapisan masyarakat cenderung membelanjakan lebih banyak ketika pendapatan meningkat (Akrom, 2020). Namun, karena fluktuasi tingkat

pendapatan, dan ada perbedaan perilaku rumah tangga dalam jangka pendek atau panjang. Dua asumsi yang digunakan oleh James Duesenberry adalah sebagai berikut:

- a) Selera masyarakat terhadap barang konsumsi dipengaruhi oleh pengeluaran tetangganya.
- b) Pola konsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau dikatakan irreversible.

Menurut Duesenberry, fungsi konsumsi masyarakat adalah:

$$C / Y_t = f (Y / Y^*)$$

Keterangan:

- C = konsumsi rumah tangga
Y_t = income pada tahun t
Y = income saat ini
Y* = income tertinggi yang pernah diraih

Duesenberry menunjukkan bahwa konsumsi tidak langsung meningkat ketika pendapatan berubah karena pengaruh kecil dari konsumsi masa lalu. Begitu pula dengan pendapatan yang lebih rendah, konsumsi tidak langsung menurun karena kebiasaan konsumsi yang tinggi, sehingga porsi konsumsi semakin meningkat (Iskandar, 2017). Di sisi lain, konsumsi dan pendapatan biasanya tinggi pada saat perekonomian sedang tidak baik dan sebaliknya.

2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mewakili strategi sektor publik suatu negara. Dengan asumsi bahwa lembaga publik mengembangkan strategi untuk mendapatkan tenaga kerja dan produk, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus ditanggung oleh lembaga publik untuk melaksanakan pengaturan (Mangkoesebroto, 2008). Teori pengeluaran pemerintah oleh Adolf Wagner menjelaskan bahwa seiring dengan peningkatan pembayaran per kapita, belanja publik juga cenderung meningkat. Hasil penelitian Wagner menunjukkan bahwa "the law of everincreasing state activity" yaitu aktivitas pemerintah dalam perekonomian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan belanja publik.

Selanjutnya teori pengeluaran pemerintah oleh Rostow & Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan fase-fase pembangunan ekonomi (Nurhayani & Rosmeli, 2012). Pada tahap awal pembangunan ekonomi, komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi serta melayani masyarakat mengakibatkan investasi pemerintah mendominasi total investasi negara. Selanjutnya, pembangunan ekonomi (tahap menengah), dimana investasi publik mulai menurun sementara investasi swasta meningkat. Yang terakhir adalah tahap lanjut, fokus belanja publik adalah pada kegiatan sosial seperti program bantuan pendapatan dan skema pensiun daripada penyediaan infrastruktur.

2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Para peneliti telah mengidentifikasi dua model pertumbuhan ekonomi: model pertumbuhan neoklasik dan model pertumbuhan baru. Model pertumbuhan neoklasik atau model pertumbuhan eksogen menyatakan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, akumulasi modal dan variabel teknologi mempengaruhi produktivitas jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi (Solow, 1956). Model pertumbuhan baru atau model pertumbuhan endogen berpendapat bahwa faktor pertumbuhan bersifat endogen daripada eksogen. Investasi dalam inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia dan pengetahuan adalah faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Model ini berkonsentrasi pada eksternalitas positif dan efek limpahan dari ekonomi berbasis pengetahuan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

(Sims & Wolff, 2018) mengembangkan model yang memasukkan pengeluaran pemerintah dengan asumsi bahwa konsumsi pemerintah memasuki fungsi utilitas dengan konsumsi swasta dan modal pemerintah memasuki fungsi produksi agregat. Pengeluaran pemerintah ditemukan memiliki efek multiplier yang kuat pada output, lapangan kerja, dan konsumsi individu. Meskipun peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan tarif pajak, manfaat multiplier kesejahteraan untuk konsumsi pemerintah lebih besar daripada biaya. Mari kita pertimbangkan bahwa ada agen perwakilan dalam perekonomian yang ingin memaksimalkan utilitas dengan fungsi berikut:

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \delta^{t-1} u(c_t, l_t, g_t)$$

Dalam persamaan, δ adalah faktor diskon, di mana $0 < \delta < 1$, c adalah konsumsi, l adalah upaya kerja dan g mencerminkan total pengeluaran pemerintah. Konsumsi dan upaya kerja terkait dengan utilitas dan disutilitas. Diasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan dengan utilitas pengeluaran swasta melalui konsumsi pribadi barang atau kegiatan rekreasi. Maka dapat digambarkan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = F_t(L, K, G) = AL^\alpha K^\beta G^\gamma \quad (1)$$

di mana L adalah tenaga kerja, K adalah kontribusi swasta dalam persediaan modal, G adalah kontribusi pemerintah dalam modal saham dan A adalah koefisien teknis.

Mari pertimbangkan $\alpha + \beta + \gamma = 1$ dengan $\gamma > 0$ di mana investasi/modal pemerintah adalah faktor independen seperti dua faktor lainnya. Ketika stok modal publik independen dan melengkapi modal swasta dan tenaga kerja, maka peningkatan modal publik secara langsung mempengaruhi output. Mengambil

turunan dari tenaga kerja, modal swasta, dan stok modal publik dalam Persamaan (1), kita dapatkan

$$\begin{aligned}
 Y &= \frac{dF}{dL} L + \frac{dF}{dK} K + \frac{dF}{dG} G \\
 &= (\alpha AL^{\alpha-1} K^{\beta} G^{\gamma}) L + (\beta AL^{\alpha} K^{\beta-1} G^{\gamma}) K + (\gamma AL^{\alpha} K^{\beta} G^{\gamma-1}) G \\
 &= \left(\alpha \frac{Y}{L}\right) L + \left(\beta \frac{Y}{K}\right) K + \left(\gamma \frac{Y}{G}\right) G \\
 &= MPL^* L + MPK^* K + MPG^* G
 \end{aligned}$$

Sampai produktivitas marjinal modal publik, tenaga kerja dan modal swasta sama, akan ada penyesuaian tenaga kerja dan modal untuk mencapai keseimbangan.

Menempatkan nilai $\alpha=1-\beta-\gamma$, kita dapatkan

$$\ln \frac{Y}{L} = \ln A + \beta \ln \frac{K}{L} + \gamma \ln \frac{G}{L}$$

$a=\ln A$, $y=Y/L$, $k=K/L$, $g=G/L$, kita bisa menulis

$$\ln \ln y = a + \beta \ln \ln k + \gamma \ln \ln g$$

dengan menyesuaikan dua periode, t dan $t-1$, kita dapat memperoleh

$$\ln \ln (y_t/y_{t-1}) = a_t/a_{t-1} + \beta \ln (k_t/k_{t-1}) + \gamma (g_t/g_{t-1})$$

Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang konstan,

$$\ln \ln (Y_t/Y_{t-1}) = \alpha + \beta \ln (K_t/K_{t-1}) + \gamma (G_t/G_{t-1})$$

Dua persamaan terakhir menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung antara investasi publik dan investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi dan itu sangat tergantung pada pemerintah dan investasi swasta.

3. Hasil Kajian

Penelitian ini mencakup lima negara ASEAN yakni, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2010-2020. Variabel yang digunakan penelitian ini terdiri dari variabel

bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. Kemudian, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam satuan dolar AS.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

- a. Pengaruh X terhadap Y_1

$$PKP_{it} = \alpha + \beta PE_{it} + e \dots \dots \dots (3.1)$$

- b. Pengaruh X terhadap Y_2

$$PKRT_{it} = \alpha + \beta PE_{it} + e \dots \dots \dots (3.2)$$

Transformasi data dilakukan dengan menggunakan LOG karena data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki skala yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan nilai data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, estimasi regresi untuk penelitian ini diubah menjadi:

- a. Pengaruh X terhadap Y_1

$$LOG(PKP_{it}) = \alpha + \beta PE_{it} + e \dots \dots \dots (3.3)$$

- b. Pengaruh X terhadap Y_2

$$LOG(PKRT_{it}) = \alpha + \beta PE_{it} + e \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

- PKP = Pengeluaran konsumsi pemerintah
- PKRT = Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi
- LOG = Logaritma
- B_0 = Konstanta
- B_1 = Koefisien regresi
- ϵ_t = *Error term*
- i = data *cross section* (5 negara ASEAN-5)
- t = data *time series* (2010-2020)

3.1. Pemilihan Kesesuaian Model

Untuk menentukan model mana yang akan digunakan pertama dilakukan uji chow pada data jika hipotesis uji Chow ialah *pooled least square model* maka dilanjutkan uji Hausman terhadap data jika hipotesis untuk uji Hausman ditolak

maka model *Fixed Effect* digunakan dalam pemodelan. Selanjutnya, dilakukan uji Breusch Pagan untuk melihat apakah terdapat efek waktu atau *cross section* di dalam data. Jika hipotesis *Breusch Pagan* tidak ditolak maka dilakukan analisis dengan menggunakan model regresi panel/*pooling*. Hasil pengujian kesesuaian model pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10.2:

Tabel 10. 2 Hasil Uji Kesesuaian Model Persamaan Regresi Data Panel

Jenis Uji	Prob. Chi-square	Tingkat Signifikansi	Keterangan
Uji Chow	0,0000	0,05	Model FEM
Uji Hausman	0,7043	0,05	Model REM
Uji LM	0,0000	0,05	Model REM

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil dari pemilihan estimasi regresi data panel yang telah dilakukan dengan Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, maka model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* dengan nilai probabilitas < 0.05.

3.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Tabel 10. 3 Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di ASEAN-5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24,62657	0,237723	103.5936	0,0000
PE?	-0,023732	0,004935	-4.809067	0,0000
R-squared	0,307251			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan menggunakan metode *random effect* pada Tabel 10.3, variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih rendah dari $\alpha = 5$ persen (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara individu, variabel bebas atau independen (Pertumbuhan Ekonomi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah di Lima Negara ASEAN. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.023732 yang dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan relatif turun pula tingkat pengeluaran konsumsi pemerintah di Lima Negara ASEAN dan sebaliknya. Berdasarkan Tabel 10.3 dapat dilihat dari slope, jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat 1 persen per tahun maka pengeluaran konsumsi pemerintah akan relatif turun 0,02 persen dan sebaliknya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi

yang meningkat membuat pengeluaran konsumsi pemerintah di Lima Negara ASEAN turun.

Studi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah didukung oleh hasil penelitian (Hanifah et al., 2017), (Kufiwa & Odhiambo, 2013), (Sudarsono, 2010), (Marpaung et al., 2017), (Sari et al., 2021), yaitu pertumbuhan ekonomi berdampak besar terhadap pengeluaran pemerintah, namun arah asosiasinya berbeda, dan hasil penelitian ini menunjukkan asosiasi negatif. Korelasi negatif yang dihasilkan antara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi pemerintah disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara ASEAN-5 masih tergolong sebagai negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 yang merupakan negara berkembang cenderung lebih lambat dibandingkan negara maju karena stabilitas ekonomi belum tercapai. IMF menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 disebabkan oleh tertundanya pemulihan ekonomi pada masing-masing negara.

Meskipun pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 cenderung lambat, berdasarkan teori pengeluaran pemerintah dari Rostow-Musgrove yang membahas keterkaitan antara tahapan pembangunan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah negara yang berada pada tahap awal pembangunan ekonomi harus menyediakan layanan bagi warganya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik termasuk transportasi. Selain itu, pemerintah akan terus melakukan pengeluaran rutin seperti penyediaan dana rutin ke daerah, pengeluaran gaji pegawai, dana pensiun, tunjangan, dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan dalam perekonomian. Hal ini membuat pengeluaran konsumsi pemerintah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkat, tetapi permintaan akan ketersediaan barang publik yang diminta oleh masyarakat selalu meningkat terutama di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Untuk memenuhi permintaan ini, pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran. Hal ini sejalan dengan teori Wagner yang menemukan hukum slalu tingginya peran pemerintah (Sukartini & Saleh, 2012).

3.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Tabel 10. 4 Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di ASEAN-5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26,12331	0,301075	86,76691	0,0000
PE?	-0,016188	0,005194	-3,116435	0,0030
R-squared	0,156648			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Terlihat pada Tabel 10.4, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0030 yang lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara eksklusif, faktor bebas (Pertumbuhan Ekonomi) secara signifikan mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Lima Negara ASEAN. Nilai koefisien dari variabel standar konversi adalah - 0,016188 yang dapat dikatakan bahwa semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga di Lima Negara ASEAN secara umum meningkat. Dilihat dari Tabel 10.4, dapat dilihat dari slope, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% setiap tahun, pengeluaran konsumsi rumah tangga akan berkurang sebesar 0,016 persen. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga di lima negara ASEAN.

Kemampuan yang buruk dari pertumbuhan ekonomi untuk menjelaskan pengeluaran konsumsi rumah tangga mendukung asumsi Duesenberry bahwa perubahan pendapatan tidak mengakibatkan perubahan langsung pada konsumsi, karena dampak konsumsi masa lalu yang kecil. Ketika pendapatan menurun, pangsa konsumsi semakin tinggi karena konsumsi tidak langsung menurun karena kebiasaan mengkonsumsi yang tinggi (Iskandar, 2017). Sebaliknya, konsumsi pemerintah cenderung lebih tinggi pada masa ekonomi yang buruk, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif di negara-negara berkembang.

Sebagai bagian dari indikator kebijakan pemerintah di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai prasyarat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Ali et al., 2014). Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang cenderung terfokus pada aspek fisik seperti penyediaan infrastruktur sehingga dampaknya terhadap konsumsi pribadi kurang signifikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak negatif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah dan rumah tangga di ASEAN-5. Artinya, dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi pemerintah akan meningkat sejalan dengan permintaan ketersediaan barang-barang ekonomi publik dan permintaan masyarakat. Di sisi lain, negara anggota ASEAN-5 merupakan negara berkembang dan cenderung masyarakatnya berperilaku konsumtif, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan konsumsi pribadi rumah tangga individu. Koefisien determinasi pertumbuhan ekonomi untuk pengeluaran konsumsi pemerintah dan rumah tangga di ASEAN-5 mencapai 30% dan 15%, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi cukup menjelaskan kedua variabel dalam penelitian ini.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 cenderung fluktuatif, dan mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat pengeluaran konsumsi oleh pemerintah dan rumah tangga, maka hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, jika pemerintah lebih memperhatikan sumber penerimaan, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan berdampak positif pada berbagai aspek, tidak hanya konsumsi. Karena belanja

pemerintah mencerminkan peran pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan publik terhadap masyarakat lokal, dan belanja konsumsi rumah tangga mencerminkan kapasitas aktual atau daya beli masyarakat lokal. Pemerintah daerah cenderung melihat tren positif yang berkelanjutan pada kedua indikator ini, dan diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif ini.

5. Daftar Pustaka

- Akrom, H. M. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN RUMAH TANGGA DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Ali, N., Engka, D., & Tumangkeng, S. (2014). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).
- Chendrawan, T. S. (2017). Sejarah Pertumbuhan Ekonomi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(1), 123-145.
- Efendi, Z., Laut, L. T., & Prasetyanto, P. K. (2020). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(3), 810-820.
- Hanifah, N. B., Kadir, S. A., & Yulianita, A. (2017). Analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 15-34.
- Iskandar, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 127-134.
- Kunofiwa, T., & Odhiambo, N. M. (2013). Government expenditure and economic growth in Zimbabwe: an ARDL-bounds testing approach. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 6(1), 78-90.
- Mangkoesebroto, G. (2008). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Marpaung, J. M., Sari, L., & Eriyati, E. (2017). *Pengaruh Migrasi Masuk dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014*. Riau University.
- Matitamole, H. K. (2017). *Estimasi arah hubungan antara konsumsi energi dan pendapatan nasional di 5 negara ASEAN*.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1-12.
- Nurhayani, N., & Rosmeli, R. (2012). ANALISIS PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PERKAPITA DI KABUPATEN BATANGHARI. *Jurnal Paradigma Ekonomika*,

April.

- Sari, Y., Winarni, E., & Amali, M. (2021). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Di Provinsi. Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 565-571.
- Sims, E., & Wolff, J. (2018). The output and welfare effects of government spending shocks over the business cycle. *International Economic Review*, 59(3), 1403-1435.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Sudarsono, H. (2010). *The relationship between economic growth and government spending: A case study of OIC countries*.
- Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 19(1).
- Sukirno, S. (2001). *Ekonomi Pembangunan* (edisi kedua). Prenada Media Group.

TENTANG EDITOR

Dr. Azwardi, S.E., M.Si.



Dr. Azwardi, S.E., M.Si. adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dari tahun 1992 hingga saat ini. Beliau menyelesaikan Kuliah Sarjana pada tahun 1993 dengan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya. ia mendapatkan gelar Magister Sains pada tahun 1996 dengan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Syah Kuala. Kemudian, ia mendapatkan gelar Doktor pada tahun 2007 dengan Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran.

Mengajar pada berbagai mata kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya seperti Ekonomi Publik, Teori Ekonomi Makro, Seminar Kebijakan Publik, Ekonomi Regional, Perencanaan Pembangunan, Evaluasi Proyek dan Pembangunan, serta Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Beliau pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 1998. Pada tahun 2010 menjadi Ketua Peneliti Ekonomi P3EM. Kemudian, beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan (S1) pada tahun 2011 dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi (S2) pada tahun 2015. Hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi di Bidang Akademik dari tahun 2020 serta menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi (S3) dari tahun 2021.

MODAL MANUSIA, URBANISASI, MAKROEKONOMI, DAN PERBANKAN: PERSPEKTIF KAWASAN ASEAN

Book Chapter ini merupakan rangkuman dari hasil tulisan atau penelitian yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan kajian tentang fenomena modal manusia, urbanisasi, makroekonomi, dan perbankan yang terjadi di kawasan ASEAN. Adapun mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang turut serta dalam menulis *Book Chapter* ini:

1. Dr. Azwardi, S.E., M.Si.
2. Imelda, S.E, M.S.E.
3. Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
4. Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si.
5. Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
6. Mardalena, S.E., M.Si.
7. Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.
8. Ariodillah Hidayat, S.E., M.Si.
9. Dr. Suhel, S.E., M.Si.
10. Gustriani, S.E., M.Si.
11. Alghifari Mahdi Igamo, S.E., M.S.E.
12. Nazeli Adnan, S.E., M.Si.
13. Ayu Sagita, S.E.
14. Soni Afriansyah Palka, S.E.
15. Shelly Atika Adriyanti, S.E.
16. Devy Mayang Sari, S.E.
17. Zakenia Choirunnisah, S.E.
18. Andini Fiorentina Valentine, S.E.
19. Novi Eliza
20. Neldita Natalia Nata Situmeang
21. Sherly Monica

Book Chapter ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik pada fenomena modal manusia, urbanisasi, makroekonomi, dan perbankan yang terjadi di kawasan ASEAN. *Book Chapter* ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.



Modal manusia, urbanisasi, makroekonomi, dan perbankan : perspektif kawasan ASEAN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

14%

2

ijsoc.goacademica.com

Internet Source

1%

3

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On